



PENGANTAR PENYULUHAN PERTANIAN

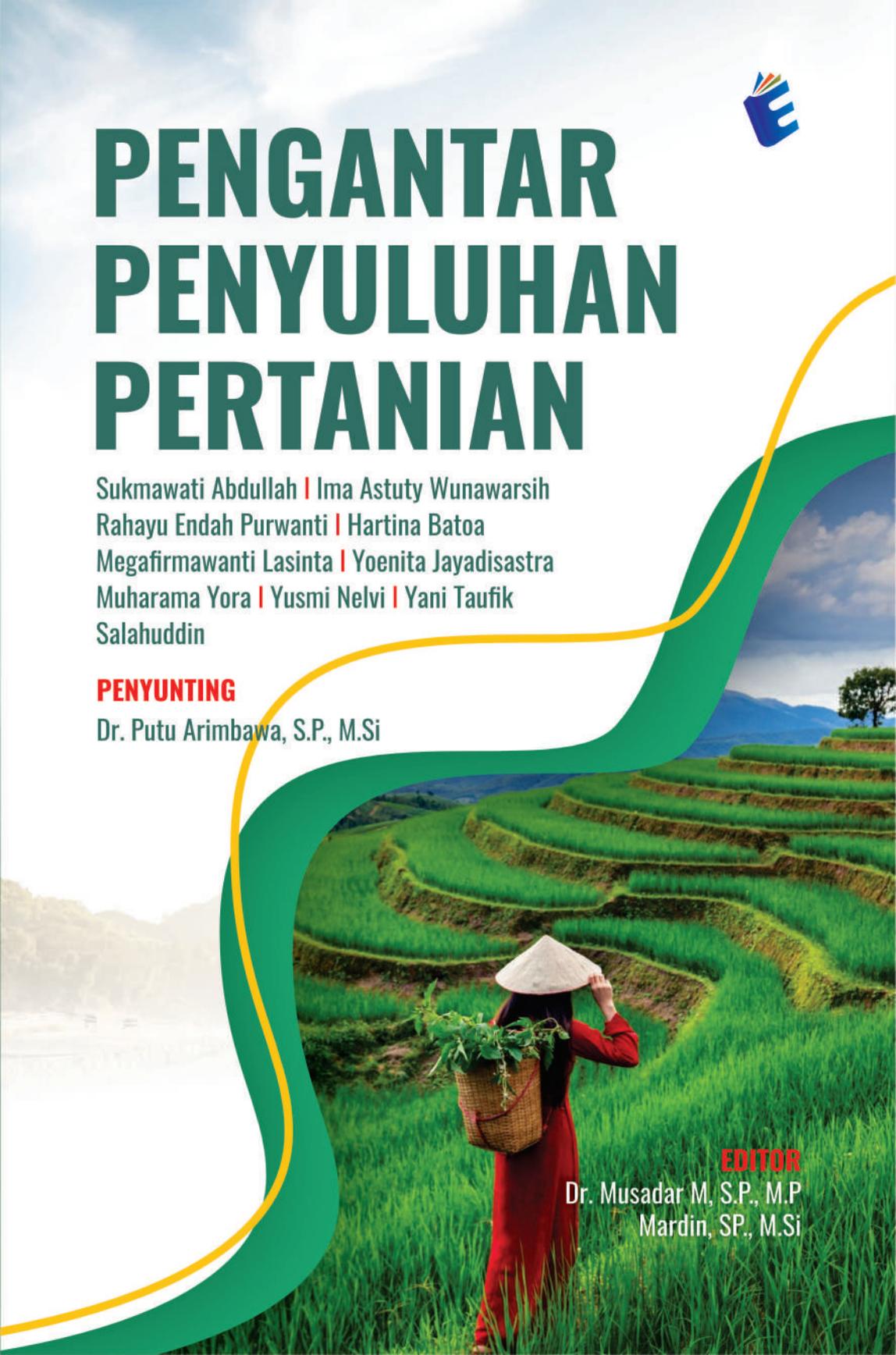
Sukmawati Abdullah | Ima Astuty Wunawarsih
Rahayu Endah Purwanti | Hartina Batoa
Megafirmawanti Lasinta | Yoenita Jayadisastra
Muharama Yora | Yusmi Nelvi | Yani Taufik
Salahuddin

PENYUNTING

Dr. Putu Arimbawa, S.P., M.Si

EDITOR

Dr. Musadar M, S.P., M.P
Mardin, SP., M.Si



PENGANTAR PENYULUHAN PERTANIAN

Sistematika penulisan buku ini diuraikan dalam 10 bab yang memuat tentang :

Bab 1. Sejarah dan Pengertian Penyuluhan

Bab 2. Konsep Penyuluhan Pertanian

Bab 3. Peran Strategis Penyuluhan dalam Pembangunan Pertanian

Bab 4. Sejarah Perkembangan Penyuluhan Pertanian di Indonesia

Bab 5. Proses Adopsi & Difusi Inovasi dalam Pembangunan Pertanian

Bab 6. Metode, Materi, Media, dan Alat Bantu dalam Penyuluhan Pertanian

Bab 7. Dinamika Kelompok

Bab 8. Partisipasi Petani dalam Penyuluhan

Bab 9. Pengembangan Sumber Daya Penyuluh yang Profesional dan Kompeten

Bab 10. Perencanaan Penyuluhan Pertanian



0858 5343 1992
eurekamediaaksara@gmail.com
Jl. Banjaran RT.20 RW.10
Bojongsari - Purbalingga 53362

ISBN 978-623-151-606-0



PENGANTAR PENYULUHAN PERTANIAN

Sukmawati Abdullah, S.P., M.Si.

Dr. Ima Astuty Wunawarsih, S.P., M.Si.

Rahayu Endah Purwanti, S.P., M.Si.

Dr. Hartina Batoa, S.P., M.Si.

Megafirmawanti Lasinta, S.I.Kom., M.Si.

Yoenita Jayadisastra, S.ST., M.Si.

Muharama Yora, S.P., M.Si.

Yusmi Nelvi, S.P., M.Si.

Ir. Yani Taufik, M.Si., Ph.D.

Salahuddin, S.P., M.Sc.



PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA

PENGANTAR PENYULUHAN PERTANIAN

Penulis : Sukmawati Abdullah, S.P., M.Si.
Dr. Ima Astuty Wunawarsih, S.P., M.Si.
Rahayu Endah Purwanti, S.P., M.Si.
Dr. Hartina Batoa, S.P., M.Si.
Megafirmawanti Lasinta, S.I.Kom., M.Si.
Yoenita Jayadisastra, S. ST., M.Si.
Muharama Yora, S.P., M.Si.
Yusmi Nelvi, S.P., M.Si.
Ir. Yani Taufik, M.Si., Ph.D.
Salahuddin, S.P., M.Sc.

Editor : Dr. Musadar M, S.P., M.P.
Mardin, S.P., M.Si.

Penyunting : Dr. Putu Arimbawa, S.P., M.Si.

Desain Sampul : Ardyan Arya Hayuwaskita

Tata Letak : Herlina Sukma

ISBN : 978-623-151-606-0

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, OKTOBER 2023**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi:

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekaediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2023

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesempatan dan rahmat-Nya sehingga buku kolaborasi ini dapat rampung dan dinikmati oleh para pembaca. Kehadiran Buku Pengantar Penyuluhan Pertanian ini disusun oleh para akademisi, pakar, dan praktisi yang ada di seluruh Indonesia dalam bentuk buku kolaborasi. Walaupun buku ini masih jauh dari kesempurnaan, tetapi kami mengharapkan buku ini dapat menjadi referensi atau bahan bacaan dalam menambah khasanah keilmuan khususnya mengenai Pengantar Penyuluhan Pertanian.

Sistematika penulisan buku ini diuraikan dalam 10 bab yang memuat tentang :

- Bab 1 Sejarah dan Pengertian Penyuluhan
- Bab 2 Konsep Penyuluhan Pertanian
- Bab 3 Peran Strategis Penyuluhan dalam Pembangunan Pertanian
- Bab 4 Sejarah Perkembangan Penyuluhan Pertanian di Indonesia
- Bab 5 Proses Adopsi & Difusi Inovasi dalam Pembangunan Pertanian
- Bab 6 Metode, Materi, Media, dan Alat Bantu dalam Penyuluhan Pertanian
- Bab 7 Dinamika Kelompok
- Bab 8 Partisipasi Petani dalam Penyuluhan
- Bab 9 Pengembangan Sumber Daya Penyuluh yang Profesional dan Kompeten
- Bab 10 Perencanaan Penyuluhan Pertanian

Ucapan banyak terima kasih yang tak terhingga kami sampaikan kepada keluarga, rekan, dan sahabat tercinta yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada kami. Tak lupa terima kasih juga kami ucapkan kepada berbagai pihak yang telah berjasa dan membantu selama proses penulisan dan penerbitan buku ini, khususnya Penerbit Buku Pengantar Penyuluhan Pertanian sebagai inisiator dan fasilitator dalam perwujudan book chapter ini. Kami menyadari bahwa buku ini tidak lepas dari kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, kami mengharapkan dukungan dan masukan dari para pembaca, agar kedepannya kami bisa berkarya lebih baik lagi. Akhir kata, selamat membaca dan semoga bermanfaat.

September, 2023

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB 1 SEJARAH DAN PENGERTIAN PENYULUHAN	1
A. Pendahuluan	1
B. Sejarah Penyuluhan Pertanian.....	4
C. Pengertian Penyuluhan Pertanian	16
D. Daftar Pustaka.....	22
BAB 2 KONSEP PENYULUHAN PERTANIAN	25
A. Pendahuluan	25
B. Konsep Penyuluhan Pertanian	26
C. Klasifikasi Konsep Konseling	29
D. Daftar Pustaka.....	33
BAB 3 PERAN STRATEGIS PENYULUHAN DALAM PEMBANGUNAN PERTANIAN	35
A. Pendahuluan	35
B. Peran Penyuluhan Pertanian dalam Pembangunan.....	37
C. Strategi Penyuluhan Pertanian	39
D. Pemilihan Metode Penyuluhan Pertanian	42
E. Faktor-faktor Penentu Keberhasilan Penyuluhan Pertanian.....	43
F. Daftar Pustaka.....	44
BAB 4 SEJARAH PERKEMBANGAN PENYULUHAN PERTANIAN DI INDONESIA	46
A. Masa Sebelum Kemerdekaan (1817-1945).....	46
B. Masa Kemerdekaan (1945-1966).....	51
C. Masa Orde Baru (1966-1998)	52
D. Masa Setelah Reformasi atau Otonomi Daerah (1998- Saat Ini)	57
E. Daftar Pustaka.....	60
BAB 5 PROSES ADOPTSI & DIFUSI INOVASI DALAM PEMBANGUNAN PERTANIAN	61
A. Pendahuluan	61
B. Pengertian Adopsi dan Difusi Inovasi	62
C. Tahapan-tahapan dalam Difusi Inovasi	65

	D. Daftar Pustaka	72
BAB 6	METODE, MATERI, MEDIA, DAN ALAT BANTU DALAM PENYULUHAN PERTANIAN	74
	A. Pendahuluan.....	74
	B. Metode dan Teknik Penyuluhan Pertanian.....	78
	C. Daftar Pustaka	97
BAB 7	DINAMIKA KELOMPOK.....	101
	A. Pendahuluan.....	101
	B. Kelompok Tani	102
	C. Dinamika Kelompok.....	103
	D. Daftar Pustaka	111
BAB 8	PARTISIPASI PETANI DALAM PENYULUHAN	112
	A. Pendahuluan.....	112
	B. Partisipasi Petani.....	115
	C. Jenis Partisipasi Kelompok Tani	117
	D. Penyuluhan Pertanian	118
	E. Tujuan Penyuluhan Pertanian.....	119
	F. Daftar Pustaka	121
BAB 9	PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PENYULUH YANG PROFESIONAL DAN KOMPETEN	124
	A. Pendahuluan.....	124
	B. Profesionalisme Penyuluh	126
	C. Kompetensi Penyuluh	132
	D. Daftar Pustaka	140
BAB 10	PERENCANAAN PENYULUHAN PERTANIAN.....	142
	A. Pengertian Perencanaan Program Penyuluh Pertanian	142
	B. Tahapan Perencanaan Program Penyuluhan Pertanian	146
	C. Manfaat Program Penyuluhan	151
	D. Daftar Pustaka	151
	TENTANG PENULIS.....	153

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peran Penyuluhan Pertanian sebagai Jembatan Perantara.....	36
Gambar 2 Sumber: Rogers 1983	63
Gambar 3 Keputusan Adopsi Inovasi	66
Gambar 4 Unsur Penting dalam Dinamika Kelompok.....	107
Gambar 5 Prinsip Perumusan Tujuan Kelompok.....	108



PENGANTAR PENYULUHAN PERTANIAN

Sukmawati Abdullah, S.P., M.Si.
Dr. Ima Astuty Wunawarsih, S.P., M.Si.
Rahayu Endah Purwanti, S.P., M.Si.
Dr. Hartina Batoa, S.P., M.Si.
Megafirmawanti Lasinta, S.I.Kom., M.Si.
Yoenita Jayadisastra, S.ST., M.Si.
Muharama Yora, S.P., M.Si.
Yusmi Nelvi, S.P., M.Si.
Ir. Yani Taufik, M.Si., Ph.D.
Salahuddin, S.P., M.Sc.



BAB

1

SEJARAH DAN PENGERTIAN PENYULUHAN

Sukmawati Abdullah, S.P., M.Si.

A. Pendahuluan

Karakteristik perilaku manusia (pengetahuan, sikap dan keterampilan), yang dimiliki setiap manusia berbeda sesuai dengan kodratnya, karena masing-masing memiliki daya nalar dan kreativitas yang tidak selalu sama dengan orang lainnya. Karakteristik yang dimiliki setiap manusia sangat menentukan kinerja dan produktivitasnya sehingga Anwarudin *et al.*, (2020) menjelaskan bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai sumber daya yang memegang posisi strategis dalam pembangunan, hal ini disebabkan karena SDM selain sebagai salah satu unsur sumber daya, SDM juga merupakan pengelola sumber daya lainnya. Oleh karena itu, pengalaman menunjukkan bahwa bangsa yang maju adalah bangsa yang melakukan investasi besar-besaran dalam rangka meningkatkan kualitas SDM warga negaranya. Namun demikian pengembangan SDM merupakan proses yang tidak pernah berakhir (*never ending process*) yang hasilnya baru dapat dipanen pada waktu yang relatif panjang. Sumber daya manusia berbeda dengan sumber daya yang lain yang relatif lebih mudah dan lebih cepat disediakan atau dibeli dengan uang. Untuk mendapatkan sumber daya manusia sesuai dengan kualifikasi tertentu memerlukan proses seperti pendidikan,

pelatihan, penyuluhan dan pengalaman dalam waktu yang relatif lama.

Komponen pengembangan sumber daya manusia (SDM) menurut Armstrong dan Taylor, (2013) meliputi: (1) learning, proses di mana seseorang memperoleh dan mengembangkan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, perilaku dan sikap. Ini melibatkan modifikasi perilaku melalui pengalaman serta metode yang lebih formal untuk membantu orang belajar di dalam atau di luar tempat kerja; (2) development, pertumbuhan atau perwujudan kemampuan dan potensi seseorang melalui penyediaan pengalaman belajar dan pendidikan; (3) training, aplikasi sistematis dari proses formal untuk menanamkan pengetahuan dan membantu orang untuk memperoleh keterampilan yang diperlukan bagi mereka untuk melakukan pekerjaan mereka secara memuaskan; dan (4) education, pengembangan pengetahuan, nilai-nilai dan pemahaman yang diperlukan dalam semua aspek kehidupan daripada pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan bidang-bidang kegiatan tertentu.

Penyuluh pertanian memiliki peranan yang sangat vital dalam membangun SDM pertanian. Mardikanto (2009) berbeda pendapat dengan pernyataan Mosher (1987) yang menyatakan bahwa penyuluhan pertanian hanya sebagai "faktor pelancar". Hal ini karena pengalaman di Indonesia menunjukkan bahwa penyuluhan pertanian menjadi sangat mutlak, sebagai pemicu sekaligus pemacu, atau yang lebih sering dikatakan sebagai "ujung tombak" pembangunan pertanian. Hanya saja, sejak bergulirnya era reformasi melanda Indonesia pada awal 1998, peran penyuluhan pertanian yang dilakukan pemerintah semakin menurun. Hal ini karena sebagai ujung tombak, peran penyuluhan pertanian sangat ditentukan oleh "pemegang tombaknya", sehingga penyuluh pertanian dituntut memiliki kompetensi yang baik dan berkualitas dalam melaksanakan tugasnya. Kompetensi penyuluh yang berarti seseorang penyuluh pertanian memiliki kecakapan dan kemampuan dalam bidangnya tentunya sesuai dengan jenjang tingkat dan

jabatanya sebagai seorang penyuluh. Secara umum, jasa penyuluhan pertanian seharusnya berkontribusi terhadap perbaikan mata pencaharian untuk semua kelompok petani serta untuk meningkatkan produksi pertanian suatu negara secara keseluruhan termasuk penyediaan devisa dari ekspor produk pertanian (Haug, 1999). Penyuluhan pertanian tidak hanya berkaitan dengan masalah teknis di lapangan, tetapi memiliki peran dalam mendukung kehidupan sosial masyarakat yang adil dan sejahtera. Penyuluh pertanian sebagai aktor di lapangan harus menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan aturan yang berlaku. Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) secara langsung berinteraksi dengan petani atau masyarakat dan hampir seluruh aktivitas PPL ini berada di lapangan.

Dunia penyuluhan di Indonesia mengalami pasang surut yang cukup dinamis dari waktu ke waktu. Semenjak dibangun pada awal 1970-an, satu momentum penting sehingga kelembagaan penyuluhan mulai menata diri dengan baik adalah lahirnya Undang-Undang No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan. Salah satu poin penting dalam Undang-Undang ini adalah perlunya membangun kelembagaan penyuluhan di daerah pada level provinsi maupun kabupaten/kota (Syahyuti, 2016). Lebih lanjut, setelah adanya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, dianggap mempengaruhi bahkan mengancam keberadaan penyuluhan karena tidak mengakomodasi penyuluhan pertanian secara jelas.

Penyuluhan pertanian memiliki dinamika perkembangan sejarah yang cukup panjang, dengan berbagai tujuan dan penyesuaian kegiatannya, misal berawal dari upaya memperbaiki pertanian rakyat, meningkatkan produksi pertanian, memenuhi kebutuhan pangan, dan meningkatkan kesejahteraan petani. Upaya tersebut tidak akan pernah terwujud dengan sendirinya tetapi perlu suatu proses belajar petani untuk memperoleh dan memahami informasi sehingga menjadi pengetahuan, melatih diri agar mampu berbuat, dan termotivasi agar mau benar-benar bertindak memperbaiki diri

(Slamet, 2001). Proses belajar petani dapat dipercepat dengan usaha khusus yang bersistem dan berstrategi melalui sistem pendidikan non-formal, sehingga petani benar-benar mau bertindak memperbaiki diri dan berpartisipasi dalam pembangunan pertanian. Proses belajar petani dengan sistem pendidikan non-formal inilah yang dimaksud sebagai kegiatan penyuluhan pertanian agar penyuluh memiliki kemampuan mengembangkan proses belajar kepada petani sampai petani mau melakukan perbaikan secara berkelanjutan.

Perkembangan penyuluhan pertanian di Indonesia, tidak lepas dari kebijakan pembangunan pertanian yang diterapkan pada waktunya, mulai masa penjajahan Belanda sampai dengan masa reformasi bersamaan dengan penerapan otonomi daerah. Demikian juga di luar Indonesia, para pakar memiliki pengertian penyuluhan masing-masing sesuai bidang atau latar belakang yang mendasari proses berpikirnya, yang dipengaruhi kebijakan masing-masing negara pada waktunya. Namun, pengertian-pengertian penyuluhan yang dikembangkan tersebut memiliki konsep-konsep yang hampir sama, antara lain penyuluhan merupakan proses pendidikan dengan sistem non-formal, perubahan perilaku, dan pemberdayaan yang ketiganya harus ada dalam setiap kegiatan penyuluhan pertanian.

B. Sejarah Penyuluhan Pertanian

1. Sejarah Penyuluhan Pertanian di Dunia

Penyuluhan Pertanian sebagai ilmu, ditandai oleh tulisan William Sewell berjudul: *Suggestions for the Extension of the University* pada tahun 1850 (Ban and Hawkins, 1999). Kemudian masuk ke Amerika pada awal abad 20 ketika Cooperative Extension Services mengembangkan Land Grant College. Tetapi, menurut sejarah purbakala, kegiatan penyuluhan pertanian sudah dimulai di lembah Mesopotamia sekitar 1800 tahun (Saad, 1990) dan di China dimulai pada abad ke 6 SM, ditandai dengan catatan tertulis tentang teknik-teknik esensial dan

pertanian pada 535 SM pada masa Dinasti Han (Swanson, 1997).

Pada abad ke2 SM sampai dengan abad ke4 Masehi, banyak di jumpai tulisan-tulisan berbahasa Latin, seringkali disertai dengan gambar-gambar tentang pengalaman praktek Bertani (White, 1977). Mengutip Roling (1988), Swanson (1997) mengemukakan bahwa akar kegiatan penyuluhan pertanian dapat ditelusuri bersamaan dengan jaman Renaisans yang diawali sejak abad 14, yaitu sejak adanya Gerakan tentang pentingnya kaitan Pendidikan dengan kebutuhan hidup manusia.

Pada 1304, Pietro de Crescenzi menulis buku teks tentang pertanian dalam Bahasa Latin yang kemudian banyak diterjemahkan dalam bahasa Itali dan Perancis. Sejak saat itu, kegiatan penulisan buku-buku pertanian semakin banyak bermunculan. Pada abad 17 dan 18, banyak ditulis pustaka tentang pertanian di banyak negara Eropa. Di Inggris sendiri, sebelum tahun 1800 tercatat sekitar 200 penulis. Dan pada tahun 1784 di London terbit majalah pertanian yang dipimpin Arthur Young, sebagai majalah yang tersebar luas di Eropa dan Amerika. Pada pertengahan abad 18, banyak kalangan tuan-tanah (bangsawan) progresif yang mengembangkan kegiatan penyuluhan pertanian melalui berbagai pertemuan, demonstrasi, perkumpulan pertanian, dimana terjadi pertukaran informasi antara pemilik-tanah dengan para tokoh-petani. Hal ini disebabkan menurut (Lippit, Watson and Westley, 1961), karena:

- a. Adanya keinginan belajar tentang bagaimana mengembangkan produktivitas dan nilai produknya, serta sistem penyakapan danbagi-hasil yang perlu dikembangkan.
- b. Adanya perkembangan ilmu pengetahuan modern dalam bidang pertanian, khususnya penggunaan agrokimia dan ilmu fisiologi tanaman.

Kelahiran penyuluhan pertanian modern, sebenarnya baru dimulai di Irlandia pada tahun 1847, yaitu sejak terjadinya krisis penyakit tanaman kentang yang terjadi pada 1845-1851(Dilts, 1992). Modernisasi penyuluhan pertanian secara besar-besaran, justru terjadi di Jerman pada akhir abad 19, yang kemudian menyebar ke Denmark, Swis, Hungaria dan Rusia. Sementara itu, Perancis tercatat sebagai negara yang untuk pertama kali mengembangkan penyuluhan pertanian yang dibiayai negara sejak tahun 1879. Pada awal abad 20, kegiatan penyuluhan pertanian umumnya masih dilakukan dengan skala kecil-kecil baik yang diorganisir oleh lembaga/instansi pemerintah maupun perguruan tinggi. Tetapi, seiring dengan perkembangannya, organisasi penyuluhan pertanian tumbuh semakin kompleks dan semakin birokratis.

Kelahiran penyuluhan pertanian "modern" disebabkan oleh beberapa kondisi yang diperlukan bagi kelahiran penyuluhan pertanian, yang ditandai oleh (Swanson, 1997):

- a. Adanya praktek-praktek baru dan temuan-temuan penelitian Kebutuhan tentang pentingnya informasi untuk diajarkan kepada petani.
- b. Tekanan Terhadap Perlunya organisasi penyuluhan
- c. Ditetapkannya Kebijakan Penyuluhan.
- d. Adanya masalah-masalah yang dihadapi di lapangan.

Pada perkembangan terakhir, dewasa ini penyuluhan pertanian telah diakui sebagai suatu sistem penyampaian informasi dan pemberian nasehat penggunaan input dalam pertanian modern.

2. Sejarah Penyuluhan Pertanian Indonesia

Mengenai sejarah perkembangan penyuluhan pertanian terjadi perdebatan dari berbagai kalangan, Sebagian kalangan mengatakan bahwa penyuluhan pertanian sudah dimulai pada tahun 1817 dengan sebutan *voorlichting* (Bahasa Belanda) yang berarti penerangan bersamaan dengan pembangunan Kebun Raya Bogor. Sedangkan Prof. Iso Hadiprodjo keberatan akan hal

itu. Beliau mengatakan penyuluhan lahir bersamaan dengan berdirinya Departemen Pertanian pada tahun 1905, tepatnya di Kebun Raya Bogor. Saat itu tugasnya adalah melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian sebagai kegiatan penyuluhan pertanian di Indonesia. Pendapat Prof. Iso Hadiprojo tersebut disebabkan karena kegiatan penyuluhan sebelum tahun 1905 lebih berupa pemaksaan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tanam paksa "Culture stelsel" (Sumaryo and Listiana, 2018).

Pada saat itu pembentukan Departemen Pertanian bertujuan untuk memajukan pertanian rakyat dan memiliki empat (4) lembaga yaitu Kebun Raya Bogor Dan Laboratoriumnya, Balai Penelitian Padi dan Palawija, Sekolah Pertanian Dan Kebun Percobaan Tanaman Tahunan. Meskipun pembentukan Departemen Pertanian didirikan dengan tujuan pro terhadap kemajuan pertanian saat itu namun belum berjalan dengan baik.

Keadaan mulai membaik ketika Departemen tersebut berganti pimpinan. Awalnya dipegang oleh Prof. Dr. Melchoir Treub selanjutnya tahun 1910-1918 dipimpin oleh Dr. N.J. Lovink. Lovink berpandangan bahwa pendidikan pertanian merupakan salah satu cara yang berguna dalam memajukan dan memperbaiki pertanian. Atas dasar hal tersebut maka pada tahun 1911 didirikannya sekolah pertanian (Landbouw Voorlichtings Dienst/LVD) dan kemudian pada tahun 1913 didirikan sekolah pertanian menengah atas (Middlebare Landbouw School/MLS). Lovink menyadari bahwa perlu adanya lembaga yang dapat menyampaikan pengetahuan melalui proses pendidikan pertanian kepada rakyat. Dinas Penyuluhan Pertanian berperan dalam proses pendidikan pertanian yang didukung oleh tenaga pertanian yang merupakan lulusan SPMA, (Harijati, 2014).

Setelah masa jabatan Lovink habis pada tahun 1918 Departemen Pertanian dipimpin oleh Sibinga Mulder. Sibinga Mulder sendiri menjabat dari tahun 1918-1922.

Mulder melakukan evaluasi terhadap Departemen Pertanian Setelah berdiri 13 tahun yang lalu. Kebijakan penting dalam evaluasi tersebut adalah pertama melaksanakan kegiatan pendidikan pertanian. Kedua Dinas Penyuluhan pertanian perlu melakukan koordinasi dengan sumber atau penyedia informasi dan dilakukan secara berkesinambungan. Alasan tersebut yang menjadikan terbentuknya Balai Besar Penelitian Pertanian (*Het algemene Profestation Voor Den Landbouw/APL*).

Sumaryo and Listiana (2018), Pada tahun 1921 Dinas Penyuluhan Pertanian lepas dari Pangreh Praja dan dijadikan Dinas Daerah Provinsi. Mulai saat itu para petugas Dinas Penyuluhan Pertanian berdiri sendiri dan bertanggung jawab kepada Departemen Pertanian. Dinas Penyuluhan Pertanian selanjutnya menangani penyuluhan tanaman pangan dan perkebunan dan ikut dalam perkreditan. Dinas Penyuluhan pun semakin berkembang sampai tahun 1942 sampai pada akhirnya datang tentara jepang.

Pada saat Penjajahan jepang yaitu rentang tahun 1942-1945, kegiatan penyuluhan terhenti. Para petani dipaksa menanam tanaman pangan dan komoditas strategis. Kemudian setelah kemerdekaan kegiatan penyuluhan belum memperlihatkan kegiatannya secara maksimal terutama Periode Liberal Dan Periode Terpimpin. Pada periode berikutnya setelah kemerdekaan adalah Periode Konsolidasi, Periode Pemantapan I, Periode Pemantapan II dan Periode Agribisnis-Agroindustri.

Pada Periode Konsolidasi yaitu rentang tahun 1963-1974 terdapat beberapa progres, pertama terdapat gagasan pengembalian asas penyuluhan pertanian yaitu asas sukarela, oto aktiviti, demokrasi dan lain-lain. Kedua; usaha penyempurnaan kegiatan penyuluhan pertanian. Penyempurnaan tersebut dilakukan dengan upaya kerja sama antara Fakultas Pertanian (perguruan tinggi pertanian) seperti IPB dengan lembaga koordinasi Pengabdian Masyarakat Departemen Pendidikan tinggi Ilmu

Pengetahuan (PTIP) mengadakan pilot Project penyuluhan yang efektif, untuk meningkatkan produksi padi dengan penerapan Panca Usaha Lengkap. Penerapannya yaitu di Kabupaten Karawang. Kegiatan tersebut dipimpin oleh Dr. Ir. Gunawan Satari, Petani dibimbing secara intensif sehingga berhasil meningkatkan produksi padi dua kali lipat. Ketiga Sebagai kelanjutan Swasembada Bahan Pangan (SSBM) yang gagal pada Periode Terpimpin maka dilanjutkan dengan Demonstrasi Massal (DEMAS) pada MT 1964/1965, dan diperluas lagi pada MT 1965/1966. Proyek DEMAS ini diubah menjadi BIMAS SSBM dan pada akhirnya menjadi Sistem BIMAS. Sistem Bimas ini mengalami perbaikan dan menjadi BIMAS berdikari, BIMAS Biasa, BIMAS Baru, BIMAS Gotong Royong dan BIMAS yang Disempurnakan, (Harijati, 2014). Sistem BIMAS (Harijati, 2014), yang dilaksanakan meliputi input produksi yang diatur oleh Inpres No 4/1973 tentang unit Desa terdiri dari:

- a. Penyediaan kredit dalam hal ini BRI yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai bank yang menyediakan kredit.
- b. Pelayanan penyuluhan oleh PPL Dinas Pertanian.
- c. Penyediaan Sarana Produksi yang murah dan mudah oleh distributor, kios yang ditunjuk dan KUD.
- d. Pengolahan dan pemasaran oleh KUD, Kelompok tani dan swasta perorangan.

Keempat INMAS adalah petani yang telah mendapatkan bantuan kredit dari pemerintah diharapkan mampu melaksanakan pertanian secara mandiri dan diberi kesempatan membeli sarana produksi secara tunai. Kelima; program BIMAS dan INMAS dapat dilaksanakan dengan pendekatan kelompok oleh Penyuluh Pertanian Lapangan dengan kualifikasi SPMA dan dibantu oleh Penyuluh Sukarela yang berasal dari kalangan petani itu sendiri yang disebut juga dengan Kontak tani.

Keenam; penerapan metode massal dalam rangka peningkatan produksi secara menyeluruh dengan menggunakan radio (Siaran Pedesaan), pameran, penerbitan

dan pertunjukan film maupun kesenian tradisional. Semua kegiatan tersebut masih bersifat insidental, belum sistematis dan belum berkesinambungan. Ketujuh bersamaan dengan itu terjadi perubahan politik, masa Orde Baru pemerintah mencanangkan Pembangunan Lima Tahun (PELITA), BIMAS diartikan juga dengan penyuluhan massal untuk meningkatkan produksi pertanian dengan cara intensifikasi khusus untuk komoditi padi.

Kedelapan mengharuskan Lembaga Penyuluhan menunjang secara nyata dalam pembangunan pertanian agar tercapai Swasembada Beras. Penyelenggaraan penyuluhan pertanian harus memiliki pola dasar yang kuat, meliputi penguatan kelembagaan, ketenagaan ASN dan fasilitas fisik. Hal ini dikuatkan dengan Keppres No 95/1969 yaitu dengan membentuk Badan Pengendali BIMAS yang kedudukannya setara dengan Dirjen. Lingkup Departemen Pertanian, yang diketuai oleh Menteri Pertanian dan Sekretaris BPBIMAS. Terakhir yaitu Kesembilan pada Periode Konsolidasi ini Metode Kelompok tani dan peranan Kontak tani mulai didudukkan sekaligus perekrutan PPL sebanyak 2.100 orang dan PPS sebanyak 113 orang yaitu pada tahun 1971, (Sumaryo and Listiana, 2018).

Periode selanjutnya yaitu rentang tahun 1974-1983, disebut juga dengan periode pematangan (Sumaryo and Listiana, 2018), hal ini disebabkan karena pada periode ini terdapat beberapa kemajuan, yaitu:

- a. Pertama Pembentukan Badan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian tingkat nasional dengan Keppres No. 44 dan 45/1974. Hal ini sesuai dengan UU No. 5/1975 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah.
- b. Kedua Pembentukan Forum Koordinasi Penyuluhan Pertanian di tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) yaitu berdasarkan SK Menteri No. 664/1975.
- c. Ketiga pada tahun 1976 mulai diberlakukan Sistem Kerja Latihan dan Kunjungan (LAKU). Teknisnya adalah PPL,

PPM mendapatkan pelatihan guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tentang teknik pertanian sesuai dengan kalender produksi pertanian setempat yang dilakukan sekali dalam 2 minggu kerja. PPL, PPM dan PPS selaku korp penyuluhan pertanian mendapatkan pelatihan dasar tentang berbagai subjek dan komoditas yang diatur oleh Balai Latihan Pegawai Pertanian (BLPP) dengan bantuan Dinas dan Pendidikan Tinggi serta Peneliti. Bahan materi penyuluhan berupa terbitan, film dan kaset yang digunakan dalam siaran Sistem Penyuluhan Pertanian Pedesaan melalui Radio yang merupakan perlengkapan para penyuluh dan disediakan oleh Balai Informasi (BIP), di wilayah bersangkutan. PPL dan PPM merupakan lulusan SPMA negeri, daerah atau swasta, dengan pelaksana teknis BLPP dan BIP dan diawasi oleh Kakanwil Departemen Pertanian setempat.

- d. Keempat mencetuskan 4 kategori demonstrasi yaitu Demplot perorangan, Demfarm oleh kelompok primer, Dem Area oleh kelompok tani dan Dem Unit Dilakukan oleh KUD.
- e. Kelima formasi penyuluhan diperbesar menjadi 20.626 orang dengan rincian PPL dan PPM sebanyak 19.513 orang dan PPS sebanyak 1.113 orang.
- f. Keenam pemberlakuan Sistem LAKU yang pada tahun 1976 terdapat 9 provinsi selanjutnya tahun 1977 menjadi 14 provinsi dan pada tahun 1980 diberlakukan di seluruh Indonesia.
- g. Ketujuh Pekan Nasional (PENAS) kembali dilaksanakan yang ke III di Bali Tahun 1980 pada rebug KTNA di Bali disepakati penerapan metode penyuluhan berupa Mimbar Sarasehan, Temu Wicara dan Temu Karya dan yang ke IV adalah di Kalimantan Selatan Tahun 1981.
- h. Kedelapan Badan Diklatlul meningkatkan kesejahteraan penduduk/Kelompok Petani Nelayan Kecil (KPK) yang dilakukan dengan pendekatan partisipatif melalui Proyek Pembinaan Peningkatan Pendapatan Petani Nelayan Kecil

(P4K) di 8 propinsi. Selanjutnya Pemberian stimulus kepada peserta INSUS dalam peningkatan intensifikasi padi dengan perlombaan. Pemenang diberi penghargaan dari presiden secara langsung.

Periode Pemantapan II (Sumaryo and Listiana, 2018), yaitu berada pada rentang tahun 1983-1993. Kemajuan Yang dapat dicapai antara lain:

- a. Pembentukan Direktorat Jenderal Penyuluhan pada semua Direktorat Jenderal Lingkup Pertanian dan Pusat Penyuluhan pada Badan Diklatluh, melalui KEPPRES No. 24/1983. Pada Dinas Tingkat I dan II dibentuk Sub Dinas dan Seksi Penyuluhan.
- b. Pola Supra Insus dikembangkan pada tahun 1987. Keberhasilan pengembangannya terletak pada kerja sama antar Kelompok tani dalam intensifikasi di satu WKPP, menerapkan pola tanam yang dapat menjamin terwujudnya panen yang serentak, Keragaman Varietas yang digunakan pada satu areal WKPP yang seragam.
- c. Metode Massal yang diterapkan sebelumnya relatif berkurang dan lebih banyak menerapkan Metode Kelompok dan Perorangan. Pendekatan yang dilakukan adalah Pendekatan Partisipatif. Pendekatan ini lebih menarik seperti Mimbar Sarasehan, Temu Wicara, Temu Karya, Temu Usaha dan PENAS. Pada tahun 1983 PENAS V berlangsung di Lampung dan PENAS VI tahun 1986 dilakukan di Sumatera Utara.
- d. Puncak prestasi Indonesia terjadi pada tahun 1984 yaitu Indonesia Mencapai Swa Sembada Beras yang diakui Oleh badan Pangan dan pertanian dunia (FAO).
- e. Penetapan Jabatan Fungsional Penyuluh mulai diberlakukan pada tahun 1986. Penetapan angka kredit diberlakukan untuk peningkatan jenjang karir penyuluh. Penyuluh yang memiliki kualifikasi setingkat SLTA ditingkatkan pendidikannya melalui Akademi Penyuluhan Pertanian, maupun pendidikan jarak jauh yang bekerja sama antar Departemen Pertanian dengan

Universitas Terbuka. Penyuluh yang sudah mencapai strata 1 (S1) ditingkatkan ke jenjang S2 dan S3 Walaupun secara bertahap dan terbatas.

- f. Pada tahun 1991 Terjadi perubahan koordinasi penyuluhan. Hal tersebut berdasarkan SK Mentan No. 58/Kpts/LP.120/2/1991. Pada Tingkat Provinsi dipegang oleh Kakanwil Deptan, tingkat Kabupaten Oleh Kepala Dinas Lingkup Pertanian/Ketua Pelaksana Harian BINAS. Tugas BPP bukan lagi sebagai Unik Pelaksana, melainkan sebagai Instalasi Penyuluhan.
- g. Berdasarkan KEPPRES No. 83/1993, menghapus Direktorat Penyuluhan pada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan. Jumlah personil penyuluh mulai ditingkatkan.
- h. Peranan dan kemampuan kelompok tani dan kontak tani semakin meningkat.

Periode berikutnya disebut Periode Agribisnis-Agroindustri yang berada pada rentang tahun 1993 - 1997. Pada periode ini Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian mengalami tantangan berupa perubahan lingkungan Sosial ekonomi dan globalisasi yang dinamis (Sumaryo and Listiana, 2018), yaitu:

- a. Orientasi Pembangunan pertanian menerapkan pendekatan Agribisnis.
- b. Terjadi peningkatan peranan dan partisipasi petani dan masyarakat desa Sistem Penyuluhan Pertanian.
- c. Penerapan otonomi daerah telah dilaksanakan secara luas dan lebih bertanggung jawab.

Selain itu banyak perubahan yang terjadi, antara lain Penyuluh pertanian yang awalnya berada pada Dinas Pertanian Pangan selanjutnya menjadi bagian dari Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Peternakan dan Dinas Perkebunan sesuai dengan tugas monovalennya. Petani dalam hal ini belum terbiasa dengan sistem penyuluhan

monovalen, maka dalam hal ini perlu inovasi oleh penyuluh sesuai dengan keragaman wilayahnya. Perubahan sistem kerja penyuluhan pertanian telah mempengaruhi eksistensi diri penyuluh sekaligus mempengaruhi perkembangan penyuluhan pertanian akibat berkurangnya minat masyarakat terhadap penyuluhan pertanian. Keadaan tersebut memicu terbitnya Surat Keputusan bersama menteri dalam Negeri dan Menteri Pertanian yaitu SKB No. 54 tahun 1996 dan No. 301/Kpts/LP.20/4/1996 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian. Namun SKB ini penerapannya belum berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Selama periode Orde Baru yang dimulai dari Periode Konsolidasi sampai dengan Periode Agribisnis-Agroindustri, penyelenggaraan Penyuluhan pernah mengalami kejayaan dengan prestasi Swa-Sembada Beras tahun 1984 dan pada akhir Orde Baru justru mengalami keterpurukan, Hal ini diakibatkan oleh pendekatan penyuluhan yang diterapkan tidak sesuai dengan dinamika perkembangan zaman (Harijati, 2014)

Periode terakhir adalah Periode Reformasi dan Otonomi Daerah yaitu tahun 1998 sampai sekarang. Era Reformasi merupakan penanda akhir kekuasaan Orde Baru yaitu tahun 1998. Pada Era Orde Baru segala penyelenggaraan kegiatan selalu terpusat dan masyarakat sudah terbiasa dengan keadaan penyeragaman. Masyarakat saat itu dalam kondisi yang membutuhkan bantuan dan bimbingan. Lambat laun dengan proses berbagai bentuk pembangunan maka menjadikan masyarakat semakin mandiri dan dapat menentukan alternatif dalam usaha tani mereka.

Kemandirian dan kemampuan menentukan berbagai alternatif pilihan dalam kegiatan pertanian, membuat masyarakat membutuhkan suasana lingkungan yang mengakui kemampuan mereka dan potensi wilayah yang beragam dan bukan bersifat seragam. Dengan demikian maka pembangunan pertanian yang dilakukan harus mampu

mengakomodir keinginan dan kemampuan masyarakat di wilayah itu (Harijati, 2014). Setelah reformasi penyelenggaraan Penyuluhan mengalami berbagai perubahan. Terutama setelah dikeluarkannya UU No 22 tahun 1990 tentang otonomi daerah. Penerapan UU ini telah merubah kebijakan pemerintah mengenai pembangunan pertanian, termasuk kebijakan dalam penyuluhan pertanian. Penyelenggaraan penyuluhan pertanian yang pada awalnya terpusat setelah diberlakukan UU tersebut menjadi tanggung jawab daerah.

Perubahan tanggung jawab penyelenggaraan penyuluhan tersebut mengakibatkan perubahan pada aspek kelembagaan penyuluhan pertanian. Penyelenggaraan Program penyuluhan yang awalnya bersifat “penyeragaman” beralih menjadi bersifat “spesifik lokal”. Petani diberi kebebasan dalam menentukan komoditi apa yang akan diusahakan. Pada era reformasi ini dapat dikatakan bahwa kegiatan pembangunan pertanian pada umumnya dilakukan atas dasar prakarsa masing-masing daerah. Keadaan ini mendorong dibutuhkannya sumber daya manusia dengan kualitas yang semakin tinggi. Penyuluh dituntut untuk terus melakukan peningkatan pengetahuan dan keterampilannya. Penyuluh juga dituntut untuk mampu melakukan pendekatan yang sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini dan memperhatikan ragam wilayah, potensi wilayah dan kebutuhan masyarakat. Upaya ini dilakukan agar penyuluh mampu mendampingi petani dan mampu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan petani. Perubahan-perubahan yang terjadi pada saat reformasi ini mendorong dilakukannya revitalisasi. Pada tanggal 11 juni 2005 di Purwakarta dicanangkan revitalisasi pertanian, perikanan dan kehutanan (RPPK) di tanggal 15 November 2006 berhasil terbentuknya undang-undang sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang diharapkan mampu memberikan landasan, kebijakan, program, kelembagaan,

ketenagaan, penyelenggaraan, pembiayaan dan pengawasan penyuluhan pertanian yang diberi nama UU No 16 Tahun 2006 (Fachri, 2007).

Terbitnya UU No 16 tahun 2006 dapat memberikan kesamaan persepsi tentang sistem penyuluhan pertanian. Undang-Undang tersebut sampai saat ini masih digunakan sebagai pedoman dalam pengelolaan dan penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan. Sebagai pedoman, UU tersebut dapat mengakomodasi apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan masyarakat pertanian dan sebagai acuan kerja para penyuluh pertanian dilapangan dan sampai di mana tanggung jawabnya sebagai korp penyuluhan pertanian. Terakhir, Perkembangan penyuluhan pertanian yang telah bangsa Indonesia Melalui, yang mengalami pasang surut mula dari zaman penjajahan, setelah kemerdekaan, era reformasi dan sekarang era globalisasi dan digitalisasi tentu merupakan tantangan tersendiri bagi penyelenggaraan penyuluhan pertanian, termasuk kesiapan para korp penyuluh pertanian yang harus senantiasa mengupdate, pengetahuan, keterampilan dalam mengakses teknologi, inovasi mampu memanfaatkan teknologi digital dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian.

C. Pengertian Penyuluhan Pertanian

Istilah penyuluhan pertanian dikenal dengan istilah extension, dalam Bahasa Belanda disebut voorlichting yang berarti penerangan untuk menolong orang untuk menemukan jalan. Istilah voorlichting digunakan pada masa kolonial Belanda bagi negara-negara jajahan Belanda. Indonesia memilih penyuluhan sebagai istilah voorlichting sedangkan Malaysia memilih Perkembangan (Extension). Selain Bahasa Belanda, penyuluhan dalam bahasa Jerman disebut Aufklarung Yang artinya pencerahan. Austria sendiri menyebut penyuluhan dengan istilah Forderung yang artinya menggiring seseorang ke arah yang diinginkan, sedangkan Bahasa Prancis menyebut

penyuluhan dengan istilah vulgarization yang artinya pentingnya penyederhanaan pesan bagi orang awam (Mardikanto, 1993).

Penyuluhan pertanian pada awalnya disebut sebagai Agricultural Extension, dalam Bahasa Indonesia penyuluhan berasal dari kata suluh yang artinya pemberi penerangan di tengah kegelapan. Penerangan yang dimaksud adalah penerangan yang dilakukan secara terus menerus hingga apa yang diterangkan dapat dipahami, dihayati dan dilaksanakan oleh masyarakat, sejalan pendapat Mardikanto (1993) bahwa istilah penyuluhan pada dasarnya diturunkan dari kata "Extension" yang dipakai secara meluas di banyak kalangan. Dalam Bahasa Indonesia istilah penyuluhan berasal dari kata dasar "Suluh" yang berarti pemberi terang di tengah kegelapan. penyuluhan dapat diartikan sebagai proses penyebarluasan informasi yang berkaitan dengan upaya perbaikan cara-cara berusaha tani demi tercapainya peningkatan pendapatan dan perbaikan kesejahteraan keluarganya.

Pengertian penyuluhan dalam arti umum adalah ilmu sosial yang mempelajari sistem dan proses perubahan pada individu serta masyarakat agar dapat terwujud perubahan yang lebih baik sesuai dengan yang diharapkan (Soekartawi, 1988). Penyuluhan dapat dipandang sebagai suatu bentuk pendidikan untuk orang dewasa. Dalam bukunya Van den Ban and Hawkins (1999) menulis bahwa penyuluhan merupakan keterlibatan seseorang untuk melakukan komunikasi informasi secara sadar dengan tujuan membantu sesamanya memberikan pendapat sehingga bisa membuat keputusan yang benar.

Penyuluhan merupakan pendidikan luar sekolah terhadap segenap anggota masyarakat agar dinamika, keterampilan dan pengetahuan akan memperbaiki kehidupan dan penghidupan dapat dilakukan secara mandiri, dapat berkembang sehingga dapat memberikan peranan dalam Pembangunan (Erwadi, 2012).

Pendapat Mardikanto penyuluhan merupakan sistem belajar untuk menjadi mau, tahu, dan bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi (Mardikanto, 1993). Tujuan dari penyuluhan pertanian adalah menumbuhkan perubahan perilaku petani dan keluarganya, sehingga tumbuh minat untuk mengembangkan kemauan guna melaksanakan kegiatan usaha taninya agar tercapai produktivitas usaha yang tinggi. Perubahan perilaku yang ada diharapkan petani lebih terbuka dalam menerima petunjuk dan bimbingan serta lebih aktif dan dinamis dalam melaksanakan usaha taninya (Wiriadmadja, 1973).

Menurut Van den Ban dan Hawkins (1999), Penyuluhan pertanian adalah suatu bentuk pengaruh sosial yang dilakukan secara sadar. Mengkomunikasikan informasi dengan sadar untuk membantu masyarakat membentuk pendapatan yang wajar dan mengambil keputusan yang tepat Menurut Padmanegara (1978), Penyuluhan pertanian adalah sistem pendidikan luar sekolah (non formal) untuk para petani dan keluarganya. Menurut Zakaria (2006), Penyuluhan pertanian adalah upaya pemberdayaan petani dan nelayan beserta keluarganya melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, sikap dan kemandirian agar mereka mau dan mampu, sanggup dan berswadaya memperbaiki/meningkatkan daya saing usahanya, kesejahteraan sendiri serta masyarakatnya (Zakaria, 2006); Penyuluhan juga dapat diartikan sebagai perubahan perilaku (sikap, pengetahuan dan keterampilan) petani, sehingga fungsi penyuluhan dapat tercapai, yaitu sebagai penyebar inovasi, penghubung antara petani, penyuluh dan lembaga penelitian, melaksanakan proses pendidikan khusus, yaitu pendidikan praktis dalam bidang pertanian dan mengubah perilaku lebih menguntungkan (Kindervatter, 1979). Penyuluhan pertanian sebenarnya merupakan perubahan perilaku melalui pendidikan non-formal. Penyuluhan sebagai proses pendidikan memiliki ciri-ciri (Mardikanto, 1993), antara lain:

- a. Penyuluhan adalah sistem pendidikan non-formal (di luar sekolah) yang terencana, dapat dilakukan di mana saja, tidak terikat waktu, disesuaikan dengan kebutuhan sasaran dan pendidikan dapat berasal dari salah satu anggota peserta didik.
- b. Penyuluhan merupakan pendidikan orang dewasa.

Sebagai ilmu Sosial yang mempelajari sistem dan proses perubahan pada individu serta masyarakat agar dapat perubahan yang diharapkan yaitu perubahan perilaku dan peningkatan kesejahteraan petani. Rekeyasa sosial menerapkan konsep “to do to”, pengambilan keputusan berada ditangan perekeyasa. Perekeyasa biasanya adalah pihak luar. Jika perubahan perilaku dan peningkatan taraf hidup bisa terjadi pada suatu masyarakat maka rekeyasa sosial di Wilayah tersebut terwujud (Romadi dan Warnaen, 2021).

Departemen Pertanian (2002) menyatakan bahwa Penyuluhan pertanian adalah pemberdayaan petani dan keluarganya serta masyarakat pelaku agribisnis melalui kegiatan pendidikan non formal di bidang pertanian agar mereka mampu menolong dirinya sendiri, baik di bidang ekonomi, sosial maupun politik sehingga peningkatan pendapatan dan kesejahteraan mereka dapat dicapai Dalam UU RI No. 16, tentang SP3K, Tahun 2006 disebutkan bahwa sistem penyuluhan pertanian merupakan seluruh rangkaian pengembangan kemampuan, pengetahuan, keterampilan serta sikap pelaku utama (pelaku kegiatan pertanian) dan pelaku usaha melalui penyuluhan. Penyuluhan pertanian adalah suatu proses pembelajaran bagi pelaku utama (pelaku kegiatan pertanian) serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. Sedangkan sistem penyuluhan adalah seluruh rangkaian pengembangan kemampuan, pengetahuan, keterampilan serta

sikap pelaku utama dan pelaku usaha melalui penyuluhan. Melalui penyuluhan diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia bagi pelaku utama dan pelaku usaha yang menjadi sasaran penyuluhan tersebut, (Undang-Undang No. 16, 2006).

Pengertian tersebut mengandung makna bahwa didalam proses pembelajaran inheren adanya proses-proses lain yang terjadi secara simultan, yaitu:

1. Proses komunikasi persuasif, yang dilakukan oleh penyuluh dalam memfasilitasi sasaran (pelaku utama dan pelaku usaha) beserta keluarganya guna membantu mencari pemecahan masalah berkaitan dengan perbaikan dan pengembangan usaha mereka, komunikasi ini sifatnya mengajak dengan menyajikan alternatif-alternatif pemecahan masalah, namun keputusan tetap pada sasaran.
2. Pemberdayaan masyarakat implikasinya adalah masyarakat menjadi mandiri dengan potensi dan modal sosial yang dimiliki. Teknisnya adalah mendorong penguatan kemampuan, keberanian, daya penafsiran dan keterbatasan masyarakat atau kelompok yang berada di bawah dominasi penguasa agar berdaya dan mandiri (Subejo, 2006). Proses pemberdayaan, maknanya adalah memberikan “kuasa dan wenang” kepada pelaku utama dan pelaku usaha serta mendudukkannya sebagai “subyek” dalam proses pembangunan pertanian, bukan sebagai “objek”, sehingga setiap orang pelaku utama dan pelaku usaha (laki-laki dan perempuan) mempunyai kesempatan yang sama untuk:
 - a. Berpartisipasi;
 - b. Mengakses teknologi, sumberdaya, pasar dan modal;
 - c. Melakukan kontrol terhadap setiap pengambilan keputusan; dan
 - d. Memperoleh manfaat dalam setiap lini proses dan hasil pembangunan pertanian.
3. Proses pertukaran informasi timbal-balik antara penyuluh dan sasaran (pelaku utama maupun pelaku usaha). Proses pertukaran informasi timbal-balik ini mengenai berbagai

alternatif yang dilakukan dalam upaya pemecahan masalah berkaitan dengan perbaikan dan pengembangan usahanya.

Mardikanto (1993), menyatakan bahwa pendidikan dalam penyuluhan pertanian adalah usaha untuk menghasilkan perubahan-perubahan pada perilaku manusia, yang mencakup:

1. Perubahan dalam pengetahuan atau hal yang diakui.
2. Perubahan dalam keterampilan atau kebiasaan dalam melakukan sesuatu.
3. Perubahan dalam sikap mental.

Slamet (2001), bahwa penyuluhan pertanian harus memiliki:

1. Pengertian yang jelas tentang perubahan perilaku yang harus dihasilkan atau perilaku baru apa (pengetahuan, pengertian, keterampilan, kebiasaan, sikap, perasaan) dan tentang apa yang harus dihasilkan.
2. Pengertian tentang bagaimana caranya orang belajar, yaitu bagaimana orang dapat dipengaruhi agar berubah cara berpikir dan bertindakya.
3. Pengertian yang jelas tentang bagaimana caranya mengajar yaitu cara mempengaruhi orang lain. Ini mencakup pengetahuan dan keterampilan menggunakan berbagai metode penyuluhan paling efektif untuk mengubah perilaku orang-orang tertentu.

Penyuluh sebagai ujung tombak kemajuan di bidang pertanian diharapkan mampu memberikan kontribusi yang baik di segala bidang khususnya pertanian, dengan tidak melupakan visi dan misi awal penyuluhan sebagai usaha penyebaran informasi dan inovasi pembangunan pertanian dalam rangka meningkatkan harkat, martabat serta terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Tujuan penyuluhan pertanian adalah dalam rangka menghasilkan SDM pelaku pembangunan pertanian yang kompeten sehingga mampu mengembangkan usaha pertanian yang tangguh, bertani lebih baik (*better farming*), berusaha tani lebih menguntungkan (*better business*), hidup lebih sejahtera (*better living*) dan lingkungan lebih sehat. Penyuluhan pertanian

dituntut untuk mampu menggerakkan masyarakat, memberdayakan petani-nelayan, pengusaha pertanian dan pedagang pertanian, serta mendampingi petani untuk:

1. Membantu menganalisis situasi-situasi yang sedang mereka hadapi dan melakukan perkiraan ke depan.
2. Membantu mereka menemukan masalah.
3. Membantu mereka memperoleh pengetahuan/informasi guna memecahkan masalah.
4. Membantu mereka mengambil keputusan, dan
5. Membantu mereka menghitung besarnya risiko atas keputusan yang diambilnya.

D. Daftar Pustaka

- Anwarudin, O. *et al.* (2020) 'Peranan Penyuluh Pertanian dalam Mendukung Keberlanjutan Agribisnis Petani Muda di Kabupaten Majalengka', *Jurnal Agribisnis Terpadu*, 13(1), pp. 17-36.
- Armstrong, M. and Taylor, S. (2013) *Handbook of Human Resource Management Practice*. 3rd edn. USA: Kogan Page Limited.
- Van den Ban, A.W. and Hawkins, H.S. (1999) *Penyuluhan Pertanian*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Departemen Pertanian (2002) *Naskah Akademik Penyuluhan Pertanian*. Jakarta: Jakarta.
- Dilts, R. (1992) *Sekolah Lapangan: Suatu Upaya Pembaharuan Penyuluhan Pertanian*. Jakarta: Program Nasional Pengendalian Hama Terpadu, Departemen Pertanian.
- Erwadi, D. (2012) *Peran Penyuluh Pertanian Dalam Mengaktifkan Kelompok Tani di Kecamatan Lubuk Alung*. Universitas Andalas.
- Fachri, Y.A. (2007) *Agribisnis Riau dalam Kemelut*. 1st edn. Edited by U. Ismail, Asrol, and S. Bahri. Pekanbaru: UIR Press.

- Harijati, S. (2014) Sejarah dan pengertian Penyuluhan Pertanian, in Dasar-Dasar Penyuluhan Pertanian. 1st edn. Banten: Universitas Terbuka.
- Haug, R. (1999) 'Some leading issues in international agricultural extension, a literature review', *The Journal of Agricultural Education and Extension*, 5(4), pp. 263-274. Available at: <https://doi.org/10.1080/13892249985300061>.
- Kindervatter, S. (1979) *Non Formal Education as an Empowering Process*. Amherst: Massachussets; Centre for International Education University of Massachussets.
- Lippit, Watson, R.J. and Westley, B. (1961) *The Dynamic of Planned Change*. New York: Harcourt, Barance and World. Inc.
- Mardikanto, T. (1993) *Penyuluhan Pembangunan Pertanian*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Mardikanto, T. (2009) *Sistem Penyuluhan Pertanian*. Surakarta : LPP UNS Press.
- Mosher, A.T. (1987) *Menggerakkan dan Membangun Pertanian: Syarat-Syarat Pokok Pembangunan dan Modernisasi*. Jakarta: CV. Yasaguna.
- Padmanegara, S. (1978) *Membina Penyuluhan Pertanian*. Jakarta: Balai Pendidikan dan Penelitian.
- Roling, N. (1988) *Extension Science*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Romadi, U. and Warnaen, A. (2021) *Sistem Penyuluhan Pertanian "Suatu Pendekatan Penyuluhan Pertanian Berbasis Modal Sosial Pada Masyarakat Suku Tengger"*. Makassar: Tohar Media.
- Saad, B. (1990) *An Analysis of the needs and Problems of Iraqi Farm Women: Implications for Agricultural Services*. University College.

- Slamet, M. (2001) 'Paradigma Penyuluhan Pertanian dalam Era Otonomi Daerah', Makalah Pelatihan Penyuluhan Pertanian di Universitas Andalas.
- Soekartawi (1988) Prinsip Dasar Komunikasi Pertanian. Jakarta: UI Press.
- Subejo, S. (2006) 'Penyuluhan Pertanian Indonesia di Tengah Isu Desentralisasi, Privatisasi dan Demokratisasi', *Jurnal Penyuluhan*, 2(2). Available at: <https://doi.org/10.25015/penyuluhan.v2i2.2132>.
- Sumaryo, S. and Listiana, I. (2018) *Dinamika Penyuluhan Pertanian: dari Era Kolonial Sampai dengan Era Digital*. Lampung: AURA Publishing.
- Swanson (1997) *Improving Agricultural Extension*. Rome: FAO.
- Syahyuti (2016) 'Modernisasi Penyuluhan Pertanian Di Indonesia: Dukungan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terhadap Eksistensi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Daerah', *Analisis Kebijakan Pertanian*, 14(2), pp. 83–96.
- Undang-Undang No. 16. (2006) *Sistem Penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.*, Indonesia. Indonesia.
- White, K.D. (1977) *Country Life in Classical Times*. London: Eiek Book.
- Wiriadmadja, S. (1973) *Pokok-pokok Penyuluhan Pertanian*. Jakarta: Yasaguna.
- Zakaria (2006) *Modul Dasar-Dasar Penyuluhan Pertanian*. Bogor: Pusat Manajemen Pelatihan Sumberdaya Manusia Pertanian.

BAB

2

KONSEP PENYULUHAN PERTANIAN

Dr. Ima Astuty Wunawarsih, S.P., M.Si.

A. Pendahuluan

Berbicara mengenai pembangunan pertanian pada dasarnya adalah pengembangan sumber daya manusia petani, yaitu upaya peningkatan produktivitas petani dan kualitas sumber daya manusia. tujuannya untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas sumber daya manusia petani melalui konsultasi pertanian.

Misi penyuluhan pertanian adalah melaksanakan proses pembelajaran bagi petani dan keluarganya untuk mencapai pertanian yang lebih baik, bisnis yang lebih baik, perumahan yang lebih baik dan komunitas yang lebih baik. dalam bahasa indonesia dikenal dengan istilah kondisi pertanian yang lebih baik, pertanian yang lebih menguntungkan, kehidupan yang lebih sejahtera, dan mewujudkan masyarakat petani yang sejahtera.

Hakikat pembelajaran adalah mengubah perilaku dan kepribadian petani (*to change behavior and personality*), yaitu mengubah kepribadian petani menjadi petani yang mandiri, tangguh dan patuh. kemandirian tersebut ditunjukkan oleh seorang petani yang cakap, kreatif, proaktif, mampu menganalisis dan mengambil keputusan dalam mengelola usahataniannya, mampu bekerjasama dan memimpin

anggota/keluarganya. kemampuan petani adalah berwirausaha.

Oleh karena itu, melanjutkan pendidikan di bidang pertanian mempunyai motto/motto: membantu masyarakat membantu dirinya sendiri. ini adalah filosofi dan teori penyuluhan pertanian.

Dalam proses penyuluhan pertanian, penyuluh berperan sebagai mitra, pelatih dan pembimbing petani. Peran, tanggung jawab dan akuntabilitas penyuluh pertanian memerlukan keterampilan, etos kerja dan penguasaan filosofi, prinsip, pendekatan, metode dan teknik penyuluhan pertanian, psikologi dan pendidikan orang dewasa. berdasarkan filosofi dan misi penyuluhan pertanian.

Istilah “ekstensi” pertama kali dibahas pada pertengahan abad ke-19 sekitar tahun 1850 oleh universitas oxford dan cambridge (swanson, 1997). selama perjalanannya van den ban (1985); taufiq (2023) mencatat beberapa istilah, misalnya di belanda disebut voorlichting, di jerman lebih dikenal dengan istilah “kerja konsultasi” (beratung), vulgarisasi (perancis) dan kapasitas. (spanyol). roling (1988) berpendapat bahwa freire (1973) menentang kegiatan penyuluhan yang lebih bersifat bottom-up. Oleh karena itu, ia kemudian mengajukan berbagai syarat untuk perluasan kompensasi, seperti animasi, mobilisasi, hati nurani. di malaysia, istilah pembangunan digunakan sebagai terjemahan dari extension, dan di indonesia, istilah extension digunakan sebagai terjemahan dari voorlichting (Totok Mardikanto, 1993a).

B. Konsep Penyuluhan Pertanian

Membahas konsep ini sama saja dengan membahas pengertian penyuluhan pertanian. Pengertian penyuluhan pertanian dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu pengertian luas dan pengertian sempit.

Dalam pengertian yang lebih luas, penyuluhan pertanian mengacu pada suatu layanan atau sistem yang membantu petani meningkatkan metode dan teknik bertani melalui metode

pelatihan, meningkatkan pendapatan dan efisiensi produksi, meningkatkan standar hidup, dan meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat petani. Pelatihan dalam pengertian umum adalah ilmu sosial yang mempelajari sistem dan proses perubahan pada individu dan masyarakat agar perubahan yang lebih baik dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan (Setiana, 2005).

Penyuluhan pertanian merupakan pelatihan informal yang ditujukan kepada petani, yang dapat mengubah sikap dan perilaku pertanian, memperkuat kedudukan petani, meningkatkan kesejahteraan petani, menciptakan kehidupan masyarakat dan menjaga lingkungan sekitar (kementerian pertanian, 2009).

Penyuluhan merupakan suatu bentuk pelatihan informal kepada masyarakat khususnya petani dan keluarganya, dengan tujuan agar sasaran mampu, mampu dan mandiri dalam meningkatkan kegiatan pertaniannya guna meningkatkan kesejahteraan petani. Pandangan mardikanto mengatakan bahwa konseling adalah suatu sistem pembelajaran, dimana seseorang mau, mengetahui dan mampu menyelesaikan permasalahan yang timbul (totok mardikanto, 1993a).

Tujuan penyuluhan pertanian adalah mendorong perubahan perilaku petani dan keluarganya untuk meningkatkan minat dan kemauan melakukan kegiatan pertanian untuk mencapai produktivitas komersial yang tinggi. Petani mengharapkan perubahan perilaku saat ini agar lebih terbuka menerima petunjuk dan bimbingan serta lebih aktif dan dinamis dalam kegiatan usahatani (azwar, 2001).

Penyuluhan juga dapat diartikan sebagai perubahan perilaku petani (sikap, pengetahuan dan keterampilan) sehingga tugas penyuluhan dapat tercapai, yaitu sebagai penyalur inovasi, penghubung petani, penyuluh dengan lembaga penelitian, sebagai pembawa inovasi (lewis, 1996).

Penyuluhan pertanian sebenarnya adalah perubahan perilaku melalui pendidikan nonformal. Kepemimpinan sebagai suatu proses pembelajaran mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Pendampingan merupakan suatu sistem pelatihan informal (di luar sekolah) yang dikembangkan yang dapat dilakukan dimana saja, tidak dibatasi waktu, disesuaikan dengan kebutuhan sasaran, dan pelatihan dapat berasal dari anggota siswa;
2. Kepemimpinan adalah pendidikan orang dewasa (totok mardikanto, 1993b) (subejo, 2010) manajemen adalah proses mengubah perilaku suatu masyarakat agar mereka mengetahui, menginginkan dan dapat melakukan perubahan untuk meningkatkan produksi, pendapatan atau keuntungan serta meningkatkan kesejahteraannya.

Istilah ekstensi pada dasarnya berasal dari kata “ekspansi” yang banyak digunakan di banyak kalangan. Dalam bahasa indonesia istilah konseling berasal dari kata “suluh” yang berarti memberi terang di tengah kegelapan. Menurut (t. Mardikanto, 1993), penyuluhan dapat diartikan sebagai suatu proses penyebaran informasi yang berkaitan dengan upaya perbaikan cara bertani untuk meningkatkan pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Pengertian kepemimpinan secara umum adalah ilmu sosial yang mempelajari sistem dan proses perubahan pada individu dan masyarakat agar perubahan yang lebih baik dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan (setiana, 2005). Mengajar dapat dilihat sebagai salah satu bentuk pendidikan orang dewasa. Dalam bukunya, a.w. Van den ban dkk. (1999) menulis bahwa konseling adalah partisipasi seseorang dalam komunikasi terpelajar dengan tujuan membantu orang lain mengungkapkan pendapatnya sehingga dapat mengambil keputusan yang tepat.

Menurut vanden ban dan hawkins (2003), penyuluhan pertanian merupakan suatu bentuk pengaruh sosial secara sadar. Penyebaran pengetahuan secara sadar untuk membantu masyarakat memperoleh pendapatan yang wajar dan mengambil keputusan yang tepat menurut salmon padmanagara (1972), penyuluhan pertanian merupakan suatu

sistem pendidikan ekstrakurikuler (non formal) bagi petani dan keluarganya (zakarian, 2006).

Penyuluhan pertanian adalah upaya penguatan petani dan nelayan beserta keluarganya dengan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap dan kemandirian sehingga siap dan mampu, mampu dan mandiri untuk meningkatkan/meningkatkan daya saing usaha, kesejahteraannya. -keberadaan dan komunitasnya (Zakaria, 2006); kementerian pertanian (2002) menyatakan bahwa penyuluhan pertanian adalah pemberdayaan petani dan keluarganya serta pengusaha pertanian melalui kegiatan pendidikan pertanian informal sehingga mereka dapat membantu dirinya sendiri dalam bidang ekonomi, sosial dan politik. Bahwa pendapatan dan kesejahteraan mereka dapat ditingkatkan melalui UU RI No. 16, SP3K, 2006 menyatakan bahwa sistem penyuluhan pertanian adalah pengembangan keterampilan, pengetahuan, kemampuan dan sikap pelaku utama (pelaku pertanian) dan pelaku usaha melalui penyuluhan. Penyuluhan pertanian merupakan proses pembelajaran bagi aktor kunci (operator).

C. Klasifikasi Konsep Konseling

Menurut Mardikanto Mardikanto, membagi konsep konseling sebagai berikut:

1. Konseling sebagai proses penyebaran informasi
Diterjemahkan dari kata "ekstensi", konseling dapat diartikan sebagai proses penyebaran informasi. Informasi yang diberikan berupa ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan untuk keperluan praktik atau kegiatan praktik. Pemahaman ini berarti bahwa setiap penyuluh harus mengumpulkan dan menggunakan semua informasi yang dianggap relevan untuk menyelesaikan kebutuhan dan/atau permasalahan masyarakat. Selain itu, penyuluh harus mampu mengoptimalkan sarana yang dapat mereka gunakan untuk menyebarkan informasi yang mereka terima dan dapat

menemukan cara terbaik agar informasi tersebut mencapai tujuan yang diinginkan.

2. Konseling sebagai proses penjelasan/klarifikasi Konseling, yang berasal dari kata dasar "obor" atau obor, dan terjemahannya "voorlichting" dapat diartikan sebagai penerangan atau penerangan kepada mereka yang berada dalam kegelapan. Berdasarkan pengertian tersebut, konseling sering diartikan sebagai suatu kegiatan yang bersifat informatif. Sebagai proses informasi, kegiatan penyuluhan tidak hanya sebatas penyebaran informasi.

Konseling juga menjelaskan seluruh informasi yang disampaikan kepada kelompok sasaran (beneficiary) penerima manfaat konseling, sehingga mereka benar-benar memahami informasi tersebut sesuai dengan maksud penyampai atau penjelasannya. Terkait dengan konsep informasi, maka penyuluhan kepada penyuluh tidak boleh hanya bersifat "satu arah" tetapi bertujuan pada komunikasi (pendekatan) yang bersifat "timbang balik", sehingga penyuluh juga memahami aspirasi masyarakat. menolak atau bersiap menerima informasi yang diberikan. Penting agar konseling tidak "dipaksakan" (indoktrinasi, dorongan, dll).

3. Konseling sebagai proses perubahan perilaku Dalam perkembangannya, konsep konseling diartikan sebagai suatu proses aktif yang memerlukan komunikasi antara ekstender dan pihak yang terpapar. Tujuan interaksi adalah membangun suatu proses perubahan "perilaku", yang diwujudkan dalam: pengetahuan, sikap, dan keterampilan seseorang, yang dapat diamati oleh orang/pihak lain baik secara langsung (ucapan, tindakan, atau bahasa tubuh) maupun tidak langsung. (melalui kinerja dan/atau hasil kerja).

Berdasarkan pengertian tersebut maka kegiatan penyuluhan tidak hanya sebatas "menyebarkan ilmu/berita" dan "memberi informasi", tetapi merupakan proses yang dilakukan secara terus menerus, dengan penuh tenaga dan

nalar, memakan waktu dan melelahkan hingga terjadi perilaku Perubahan. menunjukkan kepada penerima manfaat Konseling (beneficiaries), yang menjadi "klien" Konseling.

4. Pelatihan sebagai proses pembelajaran Konseling sebagai suatu proses pendidikan atau pembelajaran berarti berbagi informasi dan penjelasan yang diberikan dapat merangsang proses perubahan perilaku melalui kegiatan belajar atau belajar tersebut. Pendidikan yang disebutkan di sini bukanlah pendidikan vertikal yang lebih bersifat "instruksional", melainkan pendidikan horizontal dan lateral bagi orang dewasa (Mead, 1959) yang seperti halnya pembelajaran bersama, lebih bersifat "partisipatif".
5. Konseling sebagai proses perubahan sosial Konseling bukan hanya sekedar proses mengubah perilaku seseorang, namun merupakan proses perubahan sosial. Proses ini melibatkan perubahan hubungan antar individu dalam masyarakat, termasuk struktur, nilai-nilai, dan institusi sosial seperti demokratisasi, keterbukaan, supremasi hukum, dan lain-lain. Perubahan tersebut melibatkan banyak aspek, termasuk perubahan politik dan ekonomi, yang dalam jangka panjang secara bertahap dapat diandalkan untuk mengambil pilihan-pilihan baru guna meningkatkan taraf hidup masyarakat. Misalnya saja saat ini penyuluhan tidak lagi didasarkan pada kepentingan "top-down" yang seringkali diterapkan dari atas, namun berdasarkan karakteristik masing-masing tempat sesuai kebutuhan sasaran penyuluhan.
6. Ekspansi sebagai proses rekayasa sosial Sejalan dengan konsep konseling sebagai proses perubahan sosial di atas, penyuluhan sering disebut sebagai proses rekayasa sosial. Pengertian tersebut berkaitan dengan segala upaya untuk mempersiapkan sumber daya manusia agar mengetahui, mau, dan mampu menjalankan peranannya sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam sistem sosialnya. Karena kegiatan rekayasa sosial dilakukan oleh "pihak luar", maka

tujuan rekayasa sosial adalah melaksanakan proses perubahan sosial untuk menciptakan kondisi sosial yang diinginkan oleh pihak luar (insinyur).

Pemahaman seperti ini tidaklah salah, namun tidak sepenuhnya dapat diterima. Sebab, rekayasa sosial yang tujuan utamanya adalah meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan kelompok sasarannya, sering kali menimbulkan dampak negatif jika hanya dikaitkan dengan kepentingan sang insinyur, sedangkan masyarakat menjadi korban dari penerapan rekayasa sosial tersebut. rekayasa. wasiat itu.

7. Konsultasi sebagai proses pemasaran sosial (social marketing) "Pemasaran sosial" mengacu pada penerapan konsep dan/atau teori pemasaran pada proses perubahan sosial. Berbeda dengan rekayasa sosial yang lebih banyak berkonotasi "membentuk" (membuat) masyarakat atau melakukan sesuatu yang "baru" sesuai keinginan insinyur, proses pemasaran sosial lebih dimaksudkan untuk "menentang" (melakukan) sesuatu terhadap masyarakat. Jika dalam perencanaan sosial proses pengambilan keputusan sepenuhnya berada di tangan para insinyur, maka dalam pemasaran sosial pengambilan keputusan sepenuhnya berada di tangan masyarakat itu sendiri.
8. Penyuluhan sebagai proses pemberdayaan masyarakat (Slamet, 2000) menegaskan bahwa inti kegiatan penyuluhan adalah pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan berarti memberikan kekuasaan kepada pihak yang tidak berdaya dan/atau mengembangkan kekuasaan yang ada agar lebih berguna bagi masyarakat yang terlibat. Konsep pemberdayaan adalah pengertian bahwa pemberdayaan ini bertujuan untuk terwujudnya masyarakat madani (beradab) dan mandiri dalam arti dapat mengambil keputusan (terbaik) untuk kesejahteraannya sendiri. Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk memperkuat kapasitas (capacity building) serta kapasitas individu,

kapasitas umum dan kapasitas sistem (jaringan), yang meliputi: kapasitas manusia, kapasitas dunia usaha, kapasitas lingkungan hidup, dan kapasitas kelembagaan.

9. Ekspansi sebagai proses komunikasi evolusioner Sebagai proses komunikasi pembangunan, penyuluhan tidak hanya sekedar upaya menyampaikan pesan-pesan pembangunan, namun yang lebih penting adalah mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan (Mardikanto, 2010).
Yang dimaksud dengan “tumbuh dan berkembang” adalah:
 - a. Menyadarkan masyarakat bahwa mereka ingin berpartisipasi secara sukarela, bukan karena paksaan atau ancaman;
 - b. Meningkatkan pengembangan kapasitas masyarakat (baik dari segi kehidupan fisik, sikap mental, kecerdasan, aspek ekonomi dan non ekonomi);
 - c. Menunjukkan bahwa masyarakat mempunyai peluang untuk berpartisipasi.
10. Mendefinisikan Ulang Penyuluhan Pertanian Dalam literatur yang ditemukan selama ini, sering kali dikemukakan bahwa penyuluhan pertanian diartikan sebagai pendidikan non-formal yang ditujukan kepada petani dan keluarganya agar mereka dapat mempraktikkan pertanian yang lebih baik dan menguntungkan. kehidupan yang sejahtera bagi keluarga dan masyarakatnya ((Wriatmadja, 1976); Mardikanto dan Sutarni, 1981; Mardikanto, 1993).

D. Daftar Pustaka

- Azwar, S. (2001) Peranan Pelatihan Kerja Dalam Usaha Meningkatkan Produktivitas Kerja Karyawan Bagian Produksi Pada Pt. Mertex Mojokerto'. Universitas Airlangga.
- Freire, P. (1973) Extension or communicating in education for critical consciousness. New York: Seaberg Press.
- Mardikanto, Totok (1993a) 'Penyuluhan pembangunan pertanian'. Surakarta: Sebelas Maret University Press.

- Mardikanto, Totok (1993b) 'Penyuluhan Pembangunan Pertanian', in. *Sebelas Maret University: Press. Surakarta.*
- Mardikanto, T. (1993) *Penyuluhan Pembangunan Pertanian.* Surakarta: *Sebelas Maret University Press.*
- Mardikanto, T. (2009) *Sistem penyuluhan pertanian.* Diterbitkan atas Kerja sama Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) dan UPT
- Margono slamet (1989) *Kumpulan Bacaan Penyuluhan Pertanian.* Bogor: *institut Pertanian Bogor.*
- Mead, J. and Gaensler, E.A. (1959) 'Esophageal and pleural pressures in man, upright and supine', *Journal of applied physiology*, 14(1), pp. 81-83.
- Saragih, A.E. (2014) 'Analisis Sistem Pemasaran Beras Ciherang di Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur'.
- Setiana, L. (2005) 'Teknik penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat', Bogor: *Ghalia Indonesia [Preprint].*
- Slamet, P.H. (2000) 'Manajemen berbasis sekolah', *Jurnal Pendidikan dan kebudayaan*, 6(07).
- Subejo (2010) *Penyuluhan Pertanian Terjemahan dari Agriculture Extention.* Edisi 2. Jakarta.
- Taufiq, M.S. (2023) 'Kinerja Penyuluh Pertanian di Kabupaten Mamuju Tengah', *Jurnal Arajang*, 6(1), pp. 39-49.
- Zakaria (2006) *Modul Dasar-Dasar Penyuluhan Pertanian.* Pusat Manajemen Pelatihan Sumberdaya Manusia Pertanian. Ciawi, Bogor.

BAB 3

PERAN STRATEGIS PENYULUHAN DALAM PEMBANGUNAN PERTANIAN

Rahayu Endah Purwanti, S.P., M.Si.

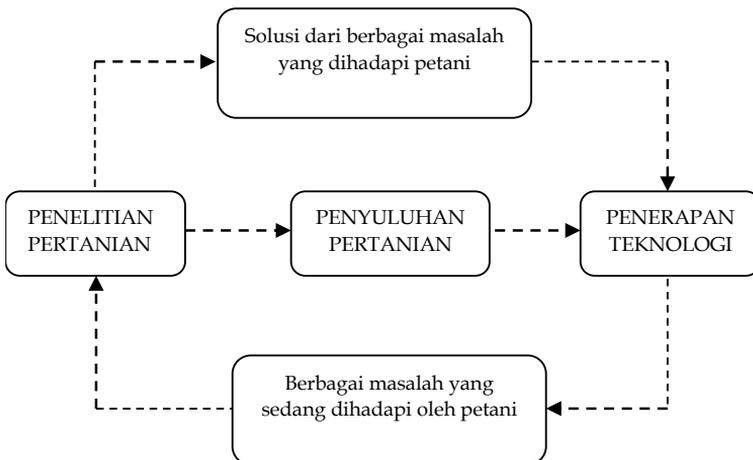
A. Pendahuluan

Salah satu pilar utama pembangunan pertanian di Indonesia adalah penyuluhan pertanian. Penyuluhan pertanian memberikan kontribusi positif terhadap perbaikan kesejahteraan ekonomi petani, melalui berbagai bentuk kegiatan peningkatan produktivitas hingga penyediaan devisa dari ekspor produk-produk pertanian Indonesia. Kegiatan penyuluhan mutlak menjadi “ujung tombak” pembangunan pertanian (Mardikanto, 2010). Penyuluhan pertanian tidak hanya menyangkut masalah teknis tetapi juga membantu kehidupan sosial masyarakat ketika diterapkan di lapangan.

Penyuluh pertanian Lapangan (PPL) sebagai aktor di lapangan harus menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan aturan yang berlaku. Secara langsung berinteraksi dengan petani dan hampir seluruh aktivitas PPL ini berada di lapangan (Vintarno, Sugandi and Adiwisastra, 2019). Melalui kebijakan pemerintah “satu desa satu penyuluh” diharapkan penyuluh akan mampu memaksimalkan Penyuluhan adalah proses penyebaran informasi, penerangan, perubahan perilaku, dan transformasi sosial, yang tentunya harus didukung oleh ketersediaan sumber daya penyuluh pertanian yang unggul untuk mencapai tujuan pembangunan pertanian di Indonesia.

Sejalan dengan hal tersebut, maka setiap pelaksanaan penyuluhan pertanian perlu dilandasi oleh strategi kerja tertentu demi keberhasilan dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Perlu untuk selalu diingat bahwa peran penyuluhan bersifat sebagai jembatan antara kegiatan penelitian pertanian yang tujuannya menghasilkan beragam inovasi baru dengan penerapan teknologi oleh petani sasaran.

Dari kegiatan penelitian pertanian akan memberikan output berupa temuan inovasi maupun teknologi baru yang akan menjadi pemecahan dari berbagai masalah yang dihadapi oleh petani sasaran dilapangan selama ini. Setelah petani sasaran menerapkan inovasi baru tersebut maka biasanya akan muncul masalah-masalah terkait ketidak sesuaian antara inovasi dengan kondisi geografis maupun teknis di lapangan, kemudian umpan balik mengenai masalah tersebut akan dihimpun oleh penyuluh yang kemudian akan disampaikan kembali kepada peneliti untuk kemudian dicarikan solusinya di lembaga-lembaga penelitian pertanian yang bersangkutan. Hanya dengan memposisikan diri seperti ini maka penyuluh diharapkan akan mampu melaksanakan tugasnya dengan baik, sebagaimana dijabarkan dalam skema gambar berikut:



Gambar 1 Peran Penyuluhan Pertanian sebagai Jembatan Perantara

Berdasarkan gambar di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penyuluhan pertanian merupakan bagian integral dari keseluruhan sektor yang saling berkaitan dalam menunjang terlaksananya pembangunan pertanian. Pada posisi ini, efektivitas penyuluhan pertanian akan sangat ditentukan oleh seberapa jauh lembaga penyuluhan diperhatikan oleh subsistem lain yang saling menunjang agar dapat mengembangkan dirinya menjadi suatu kegiatan strategis yang unggul dan tepat sasaran.

B. Peran Penyuluhan Pertanian dalam Pembangunan

Menurut KBBI pembangunan berarti usaha untuk mengubah suatu pembangunan yang bertujuan untuk menciptakan sesuatu yang belum ada atau memperbaiki yang sudah ada sehingga menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Perubahan ini akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat pada umumnya.

Perubahan fisik, sosial, dan ekonomi yang selalu berubah disebut pembangunan. Menurut Soedjatmoko (1972) dan Tjokroamidjojo (1980), perubahan budaya dan struktur sosial adalah bagian dari proses pembangunan. Setelah membaca uraian ini, dapat disimpulkan bahwa pembangunan adalah proses memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia.

Tujuan pembangunan pertanian itu sendiri adalah salah satunya untuk mencapai kesejahteraan petani utamanya di bidang ekonomi. Pertanian sebagai salah satu cabang perekonomian masyarakat, kegiatannya mencakup:

1. Kegiatan-kegiatan untuk mendapatkan bagian-bagian atau keseluruhan dari tanaman maupun hewan, seperti biji, umbi, daun, getah, telur, daging, serat, kulit dan sebagainya.
2. Kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan kegunaan ekonomi dari hasil- hasil tersebut, seperti pengolahan, penyimpanan, packaging, dan sebagainya.

3. Kegiatan-kegiatan untuk memelihara potensi produksi dari sumber-sumber alam, seperti reboisasi, daur ulang, dan sebagainya.

Sejalan dengan prinsip ekonomi maka pertanian sebagai sistem produksi, harus selalu meningkatkan kemampuannya untuk memanfaatkan sumber daya alam yang terbatas untuk menghasilkan barang yang beraneka ragam, cukup dalam jumlah kuantitas, serta berkualitas tinggi. Pertanian yang berkemampuan menjawab tantangan untuk meningkatkan produktivitasnya adalah pertanian maju. Sebaliknya pertanian yang tidak mampu menjawab tantangan tersebut adalah pertanian tradisional yang menggunakan pengetahuan, teknologi, modal dan cara usahatani yang diperoleh secara turun-temurun dari generasi sebelumnya.

Pembangunan pertanian adalah proses dinamis untuk meningkatkan kemampuan sektor pertanian untuk menghasilkan barang-barang yang dibutuhkan masyarakat (pasar) dengan memanfaatkan dan melestarikan sumber daya alam untuk menjamin kesejahteraan dan kelangsungan hidup masyarakat. Dengan kata lain, pembangunan pertanian adalah upaya sadar untuk mengubah pertanian tradisional menjadi pertanian maju yang memiliki tingkat produktivitas yang terus meningkat. Tugas pokok dari pembangunan pertanian menurut (Mosher, 1971) adalah:

1. Mencari cara usahatani yang efektif sehingga mudah diterapkan oleh petani.
2. Mencari cara-cara praktis untuk meningkatkan produktivitas usahatani yang mendukung pertanian berkelanjutan.
3. Menciptakan sumber daya yang memudahkan petani untuk meningkatkan produktivitasnya, seperti pendidikan, sarana produksi usahatani, modal, dan pasar.

C. Strategi Penyuluhan Pertanian

Strategi penyuluhan pertanian adalah metode atau cara untuk mencapai suatu tujuan dalam pelaksanaan penyuluhan pertanian. Sebagai bahan evaluasi penentu strategi yang akan diterapkan menurut (Sabir *et al.*, 2021), perlu diperhatikan beberapa hal yang berhubungan dengan:

1. Kebijakan Pertanian dan Tujuan Pembangunan

Sebelum melakukan kegiatan penyuluhan perlu mengetahui adanya ketegasan mengenai kebijakan pertanian untuk mencapai tujuan pembangunan di tingkat lokal, regional, dan nasional.

Seberapa tegas kebijakan pertanian ini akan menentukan seberapa jauh campur tangan yang dilakukan oleh penguasa wilayah dan PPL untuk mendorong partisipasi masyarakat. Sebelum pelaksanaan penyuluhan, penguasa harus membuat komitmen terhadap kepentingan pembangunan masyarakat, untuk mencapai tujuan pembangunan.

Ada empat kategori teknologi pertanian alternatif yang dapat digunakan oleh petani di suatu daerah, yaitu:

- a. Teknologi hemat tenaga
- b. Teknologi hemat lahan
- c. Teknologi berskala netral
- d. Teknologi tepat guna

Keempat macam teknologi ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda serta menuntut kondisi teknis wilayah tertentu agar dapat diterapkan dengan baik oleh petani. Sehingga dalam pemilihan strategi penyuluhan wajib memperhatikan karakteristik dari masing-masing teknologi pertanian yang akan disuluhkan. Baik yang berkaitan dengan kesesuaian kondisi wilayah, maupun karakteristik petani yang menjadi sasaran penyuluhan.

Teori difusi, yang menggunakan petani perintis sebagai sasaran utama penyuluhan, kerap digunakan sebagai strategi penyuluhan selama ini. Dengan harapan petani perintis akan menjadi inspirasi bagi petani lain, strategi ini

dipilih agar proses adopsi inovasi berlangsung lebih cepat. Namun, pada realitanya di lapangan, ternyata menimbulkan gap sosial-ekonomi yang semakin renggang antar kelompok petani di satu wilayah tertentu. Hal ini terjadi karena:

- a. Keengganan kelompok petani perintis untuk menularkan keberhasilannya pada kelompok-kelompok tani lain.
- b. Keengganan kelompok petani lain untuk mengikuti jejak keberhasilan petani perintis, disebabkan oleh beberapa faktor mendasar seperti adanya ketidaksamaan wilayah secara geografis, kondisi teknis ataupun ketidakberanian mereka untuk menghadapi resiko gagal.

2. Identifikasi Kategori Petani

Dalam setiap pelaksanaan kegiatan penyuluhan pasti akan dihadapkan dengan sasaran yang beragam, baik kondisi wilayahnya, maupun keadaan sosial ekonominya. Dengan mencermati hal tersebut, maka haruslah kita memperhatikan tujuan penyuluhan dengan strategi penyuluhan pertanian yang akan dipilih sehingga senantiasa berlandaskan pada keragaman keadaan sasaran, serta sedapat mungkin strategi tersebut dapat meminimalisir timbulnya masalah-masalah yang biasanya muncul sebagai konsekuensi dari hadirnya keragaman sasaran tersebut.

Keanekaragaman sasaran penyuluhan itu sendiri, ada beberapa tantangan yang sering muncul dalam pelaksanaan penyuluhan pertanian. Beberapa di antaranya adalah:

- a. Keanekaragaman zona ekologi pertanian, yang seringkali hanya cocok untuk pengembangan komoditi tertentu dan penerapan teknologi tertentu;
- b. Keanekaragaman sumber daya yang diperlukan, seperti pengetahuan, keterampilan, dana, dan kelembagaan; dan
- c. Keanekaragaman jenis kelamin dan nilai sosial budaya, yang sering Karena kaum perempuan jarang dilibatkan dalam kegiatan penyuluhan, meskipun mereka juga merupakan tenaga kerja yang potensial untuk usaha tani.

- d. Keragaman umur sasaran: kelompok pemuda tani usia 15 - 24 tahun merupakan sasaran potensial untuk penyuluhan, tetapi seringkali tidak terlibat secara aktif dalam kegiatan penyuluhan.

Sehubungan dengan kendala-kendala tersebut, maka strategi penyuluhan harus mempertimbangkan beberapa hal diantaranya:

- a. Pengklasifikasian wilayah penyuluhan berdasarkan keragaman ekologi pertaniannya;
- b. Upaya melibatkan seluruh lapisan masyarakat, termasuk jenis kelamin, umur, dan klasifikasi inovasi, dan kemampuan mereka untuk menyediakan sumber daya untuk mengikuti kegiatan penyuluhan pertanian.
- c. Membuat saran teknologi yang tepat guna dan tepat sasaran.

3. Perumusan Strategi Penyuluhan untuk Penerapan

Ada 6 (enam) tahapan pembangunan pertanian yang penting dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan (Kulp, 1977) yaitu:

- a. Tahapan pra pembangunan. Tahapan ini ditandai dengan belum dilaksanakannya penyuluhan namun sedang direncanakan.
- b. Tahapan eksperimental. Pada tahapan ini \pm 20% petani sasaran telah dijadikan pelaksana pengujian atau demonstrator yang dikembangkan oleh penyuluh pertanian.
- c. Tahapan pengembangan komoditi. Pada titik ini, diharapkan 20-40% petani sudah menerima penyuluhan pertanian..
- d. Tahapan pengembangan komoditi. Pada tahap ini, diharapkan penyuluhan mencapai 100% petani yang dilibatkan dalam proses usaha tani secara keseluruhan, yang mencakup alokasi sumber daya, pengorganisasian, pemasaran, dan upaya untuk mengubah perilaku dari petani subsisten ke petani komersial.

- e. Tahapan diversifikasi usaha tani bernilai tinggi. Diharapkan penyuluhan telah mencapai seratus persen petani komersial yang mampu menghasilkan produk yang bernilai ekonomi tinggi.
- f. Tahapan intensifikasi modal. Pada tahapan ini, diharapkan penyuluhan telah mencapai seratus persen petani yang terlibat dalam mengoptimalkan pemanfaatan lahan dengan modal yang insentif untuk investasi dan eksploitasi.

Kemudian, perumusan strategi penyuluhan pertanian juga harus diarahkan pada peningkatan partisipasi keterlibatan perempuan, karena:

- a. Kaum perempuan terbukti memberikan kontribusi besar namun jarang dilibatkan dalam penyuluhan pertanian
- b. Kaum perempuan belum memperoleh perhatian yang setara seperti kaum pria dalam pelaksanaan penyuluhan pertanian.

Meningkatkan peran generasi muda juga dilakukan dengan tujuan mendidik mereka menjadi petani handal secara komersial di masa yang akan datang. Beberapa contoh program yang harus dibuat adalah sebagai berikut:

- a. Pengembangan kepemimpinan, agar generasi muda dapat menjadi pelopor pembangunan di masa depan;
- b. Pengembangan kewarganegaraan, agar orang menjadi lebih peka terhadap masalah pembangunan nasional dan sadar akan pentingnya pembangunan; dan
- c. Pengembangan kepribadian, melalui kegiatan organisasi masyarakat, untuk menumbuhkan perilaku, kepercayaan diri, dan keterampilan berpendapat.

D. Pemilihan Metode Penyuluhan Pertanian

Kebutuhan untuk metode penyuluhan harus disesuaikan dengan tingkat adopsi petani sasaran. Tiga strategi yaitu: partisipasi social, pemasaran sosial, dan rekayasa sosial yang ditawarkan sebagai strategi alternatif untuk penyuluhan pertanian (Van Den Ban and Hawkins, 1985). (Mardikanto, 1995)

Mengungkapkan bahwa tidak ada strategi penyuluhan yang baik dan benar-benar efektif yang dapat diterapkan pada semua kelompok sasaran di seluruh wilayah. Ini karena pilihan strategi bergantung pada motivasi penyuluh dan mempertimbangkan kondisi kelompok sasaran secara konsisten.

E. Faktor-faktor Penentu Keberhasilan Penyuluhan Pertanian

Semua telah tahu bahwa penyuluhan adalah proses mengubah perilaku manusia melalui sistem pendidikan non-formal. Oleh karena itu, efektivitas penyuluhan dapat diukur dari seberapa jauh perubahan perilaku (petani) telah terjadi, baik dalam hal pengetahuan, sikap, dan keterampilannya. Kesemuanya itu dapat diamati pada:

1. Di antara perubahan yang terjadi dalam kegiatan usahatani adalah perubahan dalam keragaman dan jumlah sarana atau teknik usahatani yang digunakan;
2. Perubahan dalam jumlah produktivitas dan pendapatan;
3. Dan perubahan dalam pengelolaan organisasi pertanian, baik usaha perorangan, kelompok, atau koperasi, serta pengelolaan pendapatan dari usahatani.

Meskipun demikian, ini tidak berarti bahwa penyuluhan pertanian adalah satu-satunya faktor yang menyebabkan perubahan terjadi. (Lionberger, 1983) dengan jelas menyatakan bahwa kegiatan penyuluhan pertanian adalah salah satu dari banyak faktor yang mempengaruhi tujuan dan perilaku petani. Dengan kata lain, tujuan pembangunan tidak selalu tercapai melalui penyuluhan yang baik, dan kegagalan pembangunan pertanian tidak selalu disebabkan oleh penyuluhan pertanian yang buruk.

Ada beberapa faktor pendorong yang mempengaruhi proses perubahan sebagai hasil dari pelaksanaan penyuluhan pertanian, yaitu:

1. Keadaan pribadi penerima manfaat, terutama yang berkaitan dengan motivasinya untuk melakukan perubahan (kebutuhan, keinginan, harapan, dan perasaan tentang tekanan atau dorongan).

2. Keadaan lingkungan fisik, yang mencakup karakteristik alami sumber daya alam, teknologi yang tersedia, ketidakpastian keadaan fisik dan ketidakpastian keberhasilan teknologi yang digunakan, status penguasaan lahan, dan luas lahan yang diusahakan.
3. Lingkungan sosial di mana mereka tinggal: budaya, pendapat publik, proses pengambilan keputusan keluarga, dan kekuatan lembaga social
4. Kekuatan ekonomi, politik, pendidikan, dan lingkungan kelembagaan mencakup berbagai jenis dan aktivitas kelembagaan yang tersedia untuk mendukung kegiatan penyuluhan.

Sangat sering terjadi, ketika keberhasilan penyuluhan pertanian akan mampu mempengaruhi perhatian penguasa atau pimpinan wilayah setempat. Sehingga para administrator penyuluhan pun dituntut agar mampu merancang program yang dapat meyakinkan penguasa, serta harus benar-benar mampu bekerja keras untuk mencapai tujuan kegiatannya agar mereka dapat menarik perhatian penguasa atau pihak lain yang terkait dengan sistem pembangunan pertanian dan pembangunan wilayah atau nasional secara keseluruhan.

F. Daftar Pustaka

- Van Den Ban, A.W. and Hawkins, H.S. (1985) *Agricultural Extention London*.
- Lionberger, H.F. (1983) *Communication Strategies*.
- Mardikanto, T. (1995) *Dasar-Dasar Pengembangan Masyarakat*.
- Mardikanto, T. (2010) *Sistem Penyuluhan Pertanian*.
- Mosher, A.. (1971) *To Create a Modern Agriculture: Organization and Palanning*.
- Sabir *et al.* (2021) *Seri I Penyuluhan Pertanian*.
- Vintarno, J., Sugandi, Y.S. and Adiwisastra, J. (2019) 'Perkembangan Penyuluhan Pertanian Dalam Mendukung Pertumbuhan Pertanian Di Indonesia',

Responsive, 1(3), p. 90. Available at:
<https://doi.org/10.24198/responsive.v1i3.20744>.

BAB 4

SEJARAH PERKEMBANGAN PENYULUHAN PERTANIAN DI INDONESIA

Dr. Hj. Hartina Batoa, S.P., M.Si.

Sejarah penyuluhan pertanian di Indonesia memiliki dinamika yang panjang sejalan dengan perubahan kebijakan pembangunan pertanian pada waktunya. Berawal dari upaya peningkatan produksi pertanian, kebutuhan komoditas baru, kebutuhan ilmu pengetahuan baru yang dihasilkan melalui penelitian, dan kebutuhan penyampaian hasil penelitian kepada sasaran melalui proses pendidikan dan pelatihan, serta yang lebih penting adalah upaya perubahan pada diri petani. Harijati (2014) menjabarkan perkembangan penyuluhan pertanian di Indonesia, tidak lepas dari kebijakan pembangunan pertanian yang diterapkan pada waktunya, mulai masa penjajahan Belanda sampai dengan masa reformasi bersamaan dengan penerapan otonomi daerah. Kemudian perkembangan penyuluhan pertanian terus berlanjut dengan berbagai perubahan dan dinamika yang terjadi sampai dengan saat ini.

A. Masa Sebelum Kemerdekaan (1817-1945)

Pembangunan pertanian pada masa ini belum mengenal istilah penyuluhan pertanian, meskipun ada kegiatan mengenalkan pengetahuan baru, misalnya mengenalkan jenis-jenis tanaman baru. Menurut Departemen Pertanian (1978), pendirian Kebun Raya di Bogor pada 17 Mei 1817 oleh C.G.L.

Reinwardt dianggap sebagai awal dari usaha Pembangunan pertanian di Indonesia.

Kebun Raya Bogor mengumpulkan tanaman-tanaman yang bisa tumbuh baik di daerah tropis dari berbagai negara. Selanjutnya koleksi berbagai jenis tanaman ini dilakukan penelitian secara intensif mengenai metode budidaya yang tepat. Jika pada permulaan pandirian Kebun Raya Bogor hanya sampai pada penelitian tanaman-tanaman tertentu maka selanjutnya Kebun Raya Bogor mengadakan demonstrasi. Tetapi yang memperoleh manfaat dari kegiatan demonstrasi hanya terbatas pada petani sekitar dan pihak swasta asing yang aktif mencari informasi untuk kemajuan usahanya. Demonstrasi yang pertama diadakan ini merupakan titik tolak usaha penyuluhan, walaupun belum berarti penyuluhan yang sebenarnya karena terbatasnya pihak yang memperoleh manfaat (Sumaryo and Listiana, 2018).

Pada saat itu diperkenalkan banyak jenis tanaman baru, antara lain kelapa sawit dan 50 jenis ketela pohon. B erawal dari kebutuhan perbaikan produksi pertanian oleh penjajah, pada tahun 1831 dimulai sistem tanam paksa (*cultur stel sel*) untuk tanaman nila/tarum, kopi, tebu, dan tembakau. Petani diwajibkan menanam tanaman tersebut. Selama sistem tanam paksa, Pangreh Praja merupakan satu-satunya badan yang berhadapan langsung dengan rakyat. Pangreh Praja adalah penguasa lokal pada masa penjajahan Belanda untuk menangani daerah jajahannya. Usaha memperbaiki pertanian lebih didasarkan atas perintah atau paksaan kepada rakyat untuk menanam tanaman yang telah ditentukan

Usaha-usaha memperbaiki jenis dan jumlah produksi tanaman diwujudkan dengan mendirikan Kebun Tanaman Dagang (*cultuurtuin*) pada tahun 1876, pusat-pusat penyelidikan (sekarang lembaga penelitian) pada tahun 1880, sekolah pertanian (*Land-en Tuinbouw Cursus*) pada tahun 1877 (tahun 1884 ditutup dan dibuka lagi tahun 1903). Pada masa itu telah dihasilkan tenaga pertanian tetapi tidak diberi kewenangan, Pangreh Praja tetap memiliki wewenang memberi

perintah langsung kepada petani. Petani melaksanakan perintah karenatakut, namun hanya dilakukan selama ada kontrol, akibatnya cara perintah tidak memberikan hasil yang baik dalam upaya memperbaiki pertanian rakyat. Dengan demikian, sistem tanam paksa hanya berupaya meningkatkan produksi pertanian untuk kepentingan penguasa, bukan memperbaiki kesejahteraan masyarakat tani pada saat itu.

Sampai dengan awal abad 19, upaya perbaikan produksi pertanian masih dilakukan dengan sistem tanam paksa. Pangreh Praja dengan kekuasaannya merupakan satu satunya badan yang mempengaruhi rakyat secara langsung. Artinya, usaha memperbaiki pertanian masih didasarkan atas perintah atau paksaan supaya petani melakukan kegiatan pertanian, bukan dalam Upaya menumbuhkan kesadaran rakyat melakukan perbaikan pertanian. Pada saat itu penyebaran pengetahuan melalui proses Pendidikan pertanian kepada petani belum dianggap penting. Dengan demikian, meskipun ada tenaga tenaga penyuluh pertanian lulusan sekolah pertanian, tetapi tidak dapat berperan dengan baik. Hal ini karena penguasa saat itu beranggapan bahwa petani hanya dapat dipengaruhi oleh Pangreh Praja dengan cara tekanan atau paksaan. Setelah berjalan hampir tiga perempat abad (1817-1900), pemerintahan pada waktu itu menyadari sistem tanam paksa tidak memberikan hasil sesuai harapan. Kemudian, dilakukan perubahan administratif dalam pengelolaan pertanian yang lebih terdesentralisasi, yaitu dengan dibentuknya Departemen Pertanian yang mulai berfungsi pada 1 Januari 1905 dengan tujuan memajukan pertanian rakyat. Mula-mula Departemen Pertanian berlokasi di Kebun Raya Bogor.

Pada awal pembentukannya, Departemen Pertanian yang berfungsi antara lain memajukan pertanian rakyat, memiliki 4 lembaga yaitu: Kebun Raya dan Laboratoriumnya; Balai Penelitian Padi dan Palawija; Sekolah Pertanian; dan Kebun Percobaan Tanaman Tahunan yang dilengkapi dengan kursus-kursus serta latihan praktisnya. Fungsi memajukan pertanian rakyat ternyata tidak didukung dengan lembaga khusus yang

memikirkan cara bagaimana menyampaikan segala pengetahuan yang diperoleh tersebut kepada para petani. Keadaan ini terkait dengan kebijakan masing-masing direktur Departemen Pertanian yang menjabat pada saatnya. Prof. Dr. Melchior Treub, Direktur Departemen Pertanian pada tahun 1905-1910, berpandangan bahwa petani hanya dapat dipengaruhi oleh pangreh praja, serta pendidikan petani tidak penting. Meskipun pada waktu Melchior menjabat sebagai direktur tersebut, untuk pertama kalinya telah diangkat lima orang penasihat pertanian pada tahun 1908 (selanjutnya dianggap sebagai titik awal perkembangan penyuluhan pertanian). Namun, penasihat pertanian tidak diberi kewenangan pengawasan dan pemeriksaan terhadap petani secara langsung.

Pada tahun 1910-1918, direktur Departemen Pertanian adalah Dr. N.J. Lovink yang memiliki pandangan agak bergeser dari pandangan direktur pendahulunya. Lovink berpandangan bahwa pendidikan pertanian merupakan salah satu cara yang bermanfaat untuk memajukan dan memperbaiki pertanian. Sehingga, pada tahun 1911 dibentuklah Dinas Penyuluhan Pertanian (Landbouw Voorlichtings Dienst/LVD) dan pada tahun 1913 didirikan Sekolah Pertanian Menengah Atas (Middelbare Landbouw School/MLS). Masa kepemimpinan Lovink menunjukkan adanya kesadaran akan pentingnya lembaga yang memikirkan bagaimana cara menyampaikan pengetahuan, yaitu melalui proses Pendidikan pertanian kepada rakyat. Dinas Penyuluhan Pertanian berperan dalam proses Pendidikan pertanian kepada rakyat, yang didukung oleh tenaga pertanian yang diluluskan dari SPMA. Meskipun demikian, Pangreh Praja tetap memiliki wewenang dalam berhubungan langsung dengan rakyat.

Pada tahun 1918-1922 Departemen Pertanian dipimpin oleh Sibinga Mulder, melakukan inventarisasi dan evaluasi terhadap kinerja Departemen Pertanian setelah 13 tahun berdiri. Salah satu kebijakannya yang penting adalah dalam melaksanakan kegiatan Pendidikan pertanian, Dinas

Penyuluhan Pertanian perlu melakukan koordinasi dan kesinambungan dengan sumber atau penyedia informasi. Maka, dibentuk Balai Besar Penelitian Pertanian (hetAlgemeene Proefstation voor den Landbouw/APL) yang merupakan penyatuan dari beberapa balai penelitian yang ada. Lebih jauh, beliau juga melakukan reorganisasi di bidang Pendidikan pertanian serta menekankan pentingnya kepala daerah pertanian membuat pedoman kerja untuk kepentingan wilayah setempat, sehingga ada kesempatan pengembangan daerah masing-masing. Dengan demikian, pada masa kepemimpinan Mulder, terlihat mulai ada perhatian terhadap system penyuluhan pertanian yaitu dengan menggalang hubungan diantara pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan penyuluhan pertanian, misal dengan APL sebagai sumber pengetahuan baru.

Setelah hampir satu abad, upaya memperbaiki pertanian rakyat melalui pengaruh atau perintah Pangreh Praja kepada petani dinilai tidak efektif. Sementara itu, Dinas Penyuluhan Pertanian yang dibentuk tahun 1911 dan telah berusaha untuk bisa berhubungan langsung dengan petani atas dasar pendidikan dan kesukarelaan ternyata memberikan hasil nyata yang lebih baik. Maka pada tahun 1921 Dinas Penyuluhan Pertanian bekerja lepas dari PangrehPraja. Cara yang dilaksanakan Dinas Penyuluhan Pertanian dalam meningkatkan pertanian rakyat adalah dengan menganjurkan petani melakukan perbaikan pertanian dengan penuh tanggung jawab berdasarkan kesadaran atau keinsafan dari dalam diri petani. Untuk menumbuhkan kesadaran petani, maka petani diberi kesempatan untuk menyaksikan sendiri bukti nyata dari percobaan dan percontohan yang telah dilakukan oleh Dinas Penyuluhan Pertanian. Jadi, kegiatan Dinas Penyuluhan Pertanian pada masa itu mulai mengarah pada perbaikan individu petani, menumbuhkan kesadaran petani, dan bukan memaksa petani. Dinas Penyuluhan Pertanian dan kegiatannya terus berkembang sampai datangnya tentara Jepang Pada tahun 1942, yang ternyata juga menerapkan sistem tanam paksa dan berakhir saat kemerdekaan Indonesia tahun 1945.

B. Masa Kemerdekaan (1945-1966)

Setelah proklamasi kemerdekaan, salah satu Upaya penting dalam pengembangan pertanian adalah dengan rencana mendirikan pusat pendidikan bagi masyarakat pedesaan di tiap kecamatan. Pada tahun 1948 rencana tersebut ditetapkan menjadi Balai Pendidikan Masyarakat Desa (BPMD). Ketetapan tersebut tercantum dalam Rencana Kemakmuran Indonesia atau Rencana Kasimo (Kasimo Plan), yang merupakan rencana produksi pertanian jangka 3 tahun (1948-1950). Akan tetapi rencana tersebut tidak dapat dilakukan sepenuhnya karena terjadi agresi militer Belanda Pada Tahun 1948 dan 1949.

Setelah pengakuan kembali kedaulatan RI pada Desember 1949, pemerintah memulai kembali usaha Pembangunan pertanian secara lebih sistematis, dengan melaksanakan Rencana Kesejahteraan Istimewa yang merupakan gabungan antara Rencana Kasimo dengan Rencana Wisaksono. Pada masa ini, pendekatan dan metode penyuluhan masih sama dengan yang dilakukan sebelum kemerdekaan, padahal permasalahan pertanian makin kompleks. Oleh Karena itu, pada tahun 1958 dilakukan kegiatan intensifikasi produksi padi, dan petani yang menerapkan kegiatan tersebut akan mendapat bantuan kredit dalam bentuk bibit dan pupuk serta uang. Dalam perjalanannya kegiatan ini tidak berhasil dengan baik, karena sistem kredit yang diterapkan telah memungkinkan terjadi penyelewengan, harga padi yang rendah yang mempengaruhi pengembalian kredit,serta kurangnya tenaga pendukung yang sesuai.

Pada tahun 1959-1968, mendasarkan pada kegagalan-kegagalan sebelumnya maka pendekatan penyuluhan pertanian mengalami pergeseran. Penyuluhan pertanian mulai menerapkan pendekatan gerak cepat, dinamis, dan tepat, bukan lagi alon-alon asal kelakon; caranya dengan menggunakan pendekatan kelompok, bukan hanya pendekatan perorangan saja, mengganti sistem tetesan minyak dengan tumpahan air, agar semua orang kebagian cipratan air atau semua orang terlibat dalam kegiatan. Namun, pergeseran pendekatan penyuluhan pertanian tersebut tidak banyak memberikan

perbaikan bagi Pembangunan pertanian. Salah satu penyebabnya adalah penerapan sistem pemerintahan pada saat itu yang bersifat terpusat, semua kegiatan bermula dari satu komando pimpinan tertentu. Penerapan pendekatan sistem komando tersebut menyebabkan petani makin menjauhi penyuluh, karena kegiatan penyuluhan dianggap lebih sebagai perintah.

Meskipun telah merdeka sejak 1945 yang berarti telah bebas dari tekanan, kegiatan penyuluhan pertanian di Indonesia sampai tahun 1965 belum memberikan hasil yang lebih baik terhadap pembangunan pertanian. Hal ini akibat sistem komando yang tetap dilakukan dalam kegiatan Pembangunan pertanian, bukan atas dasar kesukarelaan petani terlibat dalam kegiatan tersebut. Misalnya, perintah penerapan teknologi baru kepada petani, tanpa petani bisa memilih atau menolak; demikian juga pembentukan kelompok tani yang tidak didasari oleh kebutuhan petani. Pada masa itu, metode penyuluhan pertanian mengalami pergeseran dari prinsip-prinsip semula yang seharusnya didasari oleh Upaya meningkatkan kesadaran petani melakukan perbaikan kegiatan pertanian.

C. Masa Orde Baru (1966-1998)

Pada awal pemerintahan orde baru tahun 1966, timbul gagasan untuk mengembalikan sistem penyuluhan pertanian kepada asas-asas semula, antara lain kesukarelaan dan demokratis. Departemen Pertanian dan pihak terkait mewujudkan gagasan tersebut dengan membangun organisasi penyuluhan pertanian yang tumbuh dan mengakar di tingkat desa, serta memprogresifkan pendekatan dan cara penyuluhan pertanian.

Organisasi tersebut bernama departemen atau kementerian penerangan. Di departemen tersebut memiliki pegawai di tingkat kecamatan yang kita kenal dengan juru penerang (Jupen). Mereka bertugas memberikan penerangan kepada Masyarakat terkait dengan program-program pemerintah. Kita dapat memberikan batasan pada kegiatan yang

dilakukan sebagai Upaya penyebaran atau penyampaian informasi tentang sesuatu hal yang ditujukan kepada khalayak umum agar mereka mendengarkan, memperhatikan, mengetahui, dan sadar sehingga mereka menjadi jelas tentang sesuatu hal tanpa adanya sangsi atau tuntutan dari pemrakarsa (Sumaryo and Listiana, 2018).

Keberhasilan pembangunan pertanian di masa orde baru tidak lepas dari keberhasilan kegiatan uji coba Panca Usaha tani Lengkap di Karawang, Jawa Barat pada tahun 1963-1964. Kegiatan tersebut dilakukan oleh dosen dan mahasiswa tingkat akhir Institut Pertanian Bogor bekerja sama dengan petani setempat pada lahan seluas 104 Ha. Kegiatan yang merupakan Demonstrasi Massal gerakan Swasembada Bahan Makan (SSBM) tersebut secara nyata meningkatkan produksi padi dua kali lipat dan terus diperluas pada 11.000 Ha, dan berikutnya 150.000 Ha. Pendekatan yang dilakukan adalah setiap dua mahasiswa menangani satu unit areal sawah seluas 50 Ha dan hidup selama enam bulan Bersama keluarga tani untuk membimbing petani menerapkan Panca Usaha tani tersebut. Pendekatan ini dapat dianggap sebagai kegiatan penyuluhan pertanian.

Pada akhirnya, "Panca Usaha tani" dijadikan kebijakan nasional menjadi sistem Bimbingan Massal (BIMAS), yaitu suatu paket masukan (input) yang terdiri dari: penyediaan kredit (oleh BRI), pelayanan penyuluhan pertanian secara intensif (oleh PPL dari Dinas Pertanian), sarana produksi yang murah dan mudah diperoleh petani (dikelola oleh penyalur, kios, dan KUD), serta pengolahan dan pemasaran hasil usaha tani (oleh KUD, kelompok tani, maupun swasta perorangan). Sistem BIMAS didasarkan kepada usaha pembinaan petani oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dengan pendekatan kelompok tani, dengan tujuan akhir petani mampu berdiri sendiri. Penyuluh pertanian dari Dinas Pertanian mendapat bantuan dari penyuluh sukarela yang berasal dari kalangan petani, misalnya kontak tani. Para kontak tani tersebut telah mendapat pembinaan dengan pendekatan perorangan melalui kegiatan anjungsana, kursus tani, demonstrasi perorangan atau plot, dan

surat-menyurat. Dengan demikian, pendekatan penyuluhan tidak hanya dilakukan dengan pendekatan massal atau kelompok, tetapi juga pendekatan terhadap perorangan, terutama kepada individu-individu setempat yang memiliki pengaruh terhadap masyarakat petani.

Sistem BIMAS banyak didukung oleh kegiatan yang bersifat massal, antara lain: penyuluhan pertanian melalui siaran radio, pameran, penerbitan, pertunjukan film maupun kesenian tradisional (wayang, sandiwara, dagelan, dan lain-lain). Pemanfaatan media-media penyuluhan tersebut sejalan dengan perubahan sistem politik dan kemasyarakatan pada saat itu, sehingga Departemen Pertanian melalui Dinas Pertanian dan para penyuluh pertanian mendapatkan kesempatan untuk menyesuaikan pola, cara, ataupun pendekatan yang digunakan dalam kegiatan penyuluhan pertanian. Pada awal tahun 1969 disusun pola pengembangan pertanian dengan cara memperluas program kepada Wanita tani dan pemuda, mengembangkan metode demplot, denfarm, demarea dan demunit, siaran pedesaan, bahan cetakan, dan bahana udio visual, serta ditunjang dengan merekrut pegawai baru, pengadaan peralatan kerja dan transpor, penambahan dan perbaikan Balai Penyuluhan Pertanian, dan pembentukan Balai Informasi Pertanian. Kegiatan tersebut menunjukkan bahwa penyuluhan pertanian makin berkembang dan mendapat perhatian baik dari pemerintah maupun mendapat penerimaan dari Masyarakat petani. Penyempurnaan dan pengembangan pendekatan penyuluhan tersebut menjadi dasar pelaksanaan program Pembangunan lima tahun pertama yang dimulai pada tahun 1969 sampai dengan 1974.

Dalam perkembangannya, pelayanan penyuluh dalam bentuk Pendidikan bagi keluarga tani ditujukan untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat. Pembentukan kelompok tani terus dilakukan atas dasar kebutuhan petani, serta menentukan kontak tani yang sehari-harinya menjadi Pembina langsung para petani dan penggerak perubahan dalam Pembangunan pertanian di desanya. Kerjasama kontak tani

Bersama kelompok taninya merupakan mekanisme pembelajaran dalam rangka mendukung pembangunan pertanian. Selanjutnya, mekanisme kerja sama tersebut diperluas di tingkat nasional. Pembentukan kontak tani dalam kegiatan penyuluhan pertanian, merupakan salah satu bentuk pendekatan dengan memanfaatkan potensi SDM setempat, serta untuk membangkitkan partisipasi masyarakat petani dalam pembangunan pertanian.

Penyempurnaan juga dilakukan terhadap kelembagaan penyuluhan, baik jumlah maupun kualitasnya. Misal: pembangunan Sekolah Pertanian Pembangunan, Balai Latihan Pegawai Pertanian, Balai Informasi Pertanian, Balai Penyuluhan Pertanian, Balai Benih, dan Balai Proteksi Tanaman. Sampai dengan akhir PELITA V tahun 1994 telah dibangun dan disempurnakan sejumlah 1.300BPP. BPP merupakan lembaga tempat bernaung PPL ditingkat kecamatan. Dengan makin banyak BPP berarti makin dekat jarak petani dengan penyuluh, maka makin intensif penyuluh dalam memberikan bimbingan kepada petani dan membantu penyelesaian masalah petani. Pada tahun 1986, jabatan fungsional penyuluh pertanian mendapat pengakuan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 73/Menpan/1985. Surat Keputusan Menpan tersebut diharapkan dapat memotivasi penyuluh melakukan perannya secara berkualitas, yang selanjutnya keberhasilan melakukan peran tersebut akan mendukung perkembangan penyuluhan pertanian yang lebih baik. Dengan demikian penyempurnaan penyuluhan pertanian berupa perbaikan kualitas dan kuantitas tenaga penyuluh, kelembagaan, serta program dan pendekatan penyuluhan, selain itu ada dukungan kebijakan pemerintah.

Pada tahun 1984, pemerintah Indonesia menerima penghargaan dari PBB atas keberhasilannya berswasembada beras. Keberhasilan ini merupakan pencapaian dari program BIMAS yang berupaya melipat gandakan produksi padi. Pada saat itu, swasembada beras merupakan tujuan nasional, sehingga untuk mencapai tujuan tersebut maka pendekatan

penyuluhan yang dilakukan bersifat sentralistis (top down) dengan program Pembangunan pertanian yang seragam. Namun, kenyataan di lapang menunjukkan bahwa keberhasilan peningkatan produksi padi yang tidak dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan petani akibat peningkatan harga sarana produksi pertanian dan bahan-bahan lain, telah menimbulkan salah persepsi pada sebagian Masyarakat pada saat itu, yaitu mengidentikkan kegiatan penyuluhan sebagai Upaya meningkatkan produksi padi saja, dan bukan bertujuan meningkatkan kesejahteraan. Kenyataan lain, tercapainya swasembada beras nasional telah menjadikan petani sebagai manusia yang tergantung pada program, kegiatan, ataupun anjuran pihak di tingkat atas. Kemandirian dan keswadayaan petani makin pudar akibat pendekatan pembangunan pertanian yang bersifat sentralistik tersebut. Hal ini tidak sejalan dengan tujuan penyuluhan pertanian semula yang berupaya menumbuhkan dan meningkatkan kemandirian Masyarakat petani.

Tahun 1986-1991 telah terjadi perubahan dalam pengorganisasian penyuluh, peran penyuluh telah berubah dari yang bersifat polivalen menjadi monovalen. Perubahan menjadi monovalen tersebut sejalan dengan kebutuhan spesifikasi dalam profesi, dengan harapan penyuluh monovalen dapat lebih intensif melakukan kegiatan penyuluhan dalam sub sektor tertentu. Penyuluh pertanian yang semula di bawah Dinas Pertanian Pangan selanjutnya menjadi bagian dari Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan, dan Dinas Perkebunan sesuai bidang tugas monovalennya. Dalam pelaksanaannya, kegiatan penyuluhan tidak bisa dilakukan secara intensif mengingat luasan geografis penyuluhan yang bertambah untuk satu orang penyuluh monovalen, petani yang belum terbiasa dengan sistem penyuluh monovalen, dan perlu beragam inovasi oleh penyuluh sesuai keragaman wilayah. Ditambah lagi, pada waktu itu mulai banyak kegiatan proyek pemerintah yang dibebankan kepada penyuluh, sehingga penyuluh kurang dapat menerapkan konsep penyuluhan

sebagai proses pendidikan non-formal secara murni. Koordinasi antar subsektor tidak selalu mulus, bahkan terjadi pengkotak-kotakan secara sub sektor. Perubahan sistem kerja penyuluhan pertanian telah mempengaruhi eksistensi diri penyuluh dan tentu juga mempengaruhi perkembangan penyuluhan pertanian akibat penerimaan Masyarakat mulai berkurang terhadap kegiatan-kegiatan penyuluhan.

Penerbitan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertaniannya itu SKB nomor 54 tahun 1996 dan nomor 301/Kpts/LP. 120/4/1996 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, memberi harapan para penyuluh. Penyuluh memiliki keleluasaan dalam berperan secara terintegrasi antar sub sektor dan dapat menemukan jati dirinya kembali. Namun, penerapan SKB tersebut belum sesuai harapan karena kenyataan di lapang masih ada kepentingan-kepentingan sub sektor yang dominan dibandingkan integrasi semua sub sektor. Hal ini terjadi akibat pedoman yang belum jelas tentang hubungan kerja antar lembaga pendukung pembangunan pertanian tersebut. SKB Mendagri dan Mentan diharapkan mampu memperlancar penyelenggaraan penyuluhan pertanian dan selanjutnya mendukung perkembangan penyuluhan pertanian, ternyata belum berjalan sesuai rencana. Dengan demikian, penyuluhan pertanian pernah mengalami masa kejayaan pada masa awal dan pertengahan orde baru, namun di akhir masa orde baru penyuluhan pertanian makin terpuruk akibat pendekatan penyuluhan yang sentralistis yang tidak lagi sesuai dengan kondisi Masyarakat serta perubahan kelembagaan penyuluh.

D. Masa Setelah Reformasi atau Otonomi Daerah (1998-Saat Ini)

Reformasi menandai berakhirnya pemerintahan orde baru pada tahun 1998, yang telah mengubah suasana otokrat dan sentralistis menjadi demokratis, yang dalam prakteknya mengharapkan adanya kebebasan dalam berpikir, berbicara, dan bertindak secara bertanggung jawab. Pada masa orde baru, Masyarakat sudah terbiasa dengan suasana penyeragaman yang

terpusat. Kebijakan tersebut sesuai kondisi Masyarakat saat itu yang masih membutuhkan banyak bantuan dan bimbingan serta tujuan pemerintah dalam stabilitas nasional. Setelah berbagai bentuk Pembangunan dilakukan tentunya telah mempengaruhi kondisi Masyarakat yang makin mandiri dan mampu menentukan pilihan. Dengan demikian, kondisi Masyarakat tersebut membutuhkan lingkungan yang mengakui kemampuan atau potensi setempat dengan segala keragaman, dan bukan lagi bersifat seragam. Berbagai Upaya dilakukan untuk mengakomodasi tuntutan Masyarakat yang makin berkembang, terutama mendukung Pembangunan pertanian yang sesuai keinginan dan kemampuan Masyarakat setempat.

Reformasi juga berpengaruh terhadap penyuluhan pertanian di Indonesia, baik individu penyuluh dengan lembaga penyuluhan, kegiatan penyuluhan, kebijakan pemerintah, serta Masyarakat petaninya. Salah satunya adalah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah. Dengan undang-undang ini, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus peningkatan kualitas sumber daya manusianya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah (terutama masyarakatnya). Pelaksanaan undang-undang tersebut telah mengubah kebijakan pemerintah tentang Pembangunan pertanian termasuk kebijakan dalam penyuluhan pertanian, antara lain pengalihan tanggung jawab penyelenggaraan penyuluhan pertanian dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Keadaan tersebut berdampak pada perubahan kelembagaan penyuluhan pertanian yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, termasuk kebijakan dan program-program penyuluhan yang semula bersifat nasional penyeragaman, sekarang berubah bersifat spesifik lokal. Selain itu, Masyarakat petani tidak lagi diharuskan mengikuti program-program pemerintah, petani boleh memutuskan sendiri komoditas yang akan diusahakan. Dengan demikian, setelah masa reformasi dan penerapan otonomi daerah, kegiatan Pembangunan pertanian lebih banyak dilakukan atas dasar prakarsa daerah masing-

masing. Kondisi ini membutuhkan SDM dengan kualitas yang makin tinggi.

Selain tuntutan reformasi dan otonomi daerah, perkembangan penyuluhan pertanian di akhir abad 20 dan di awal abad 21 ini dipengaruhi oleh semakin berkualitaskannya petani, tuntutan pasar global, kenyataan bahwa perans ektor pertanian bukan lagi andalan, fasilitas dan prasarana berusaha yang makin membaik, kemajuan bidang pertanian yang tidak merata di semua wilayah, dan keragaman local (Slamet, 2001b). Dengan demikian, penyuluhan pertanian diharapkan menerapkan pendekatan yang sesuai dengan kondisi Masyarakat saat ini dengan memperhatikan ragam wilayah (spesifik lokal), kebutuhan, dan potensi setempat. Faktor-faktor tersebut akan membutuhkan penyuluh pertanian dengan kemampuan tinggi dan beragam. Penyuluh pertanian harus mampu menyediakan berbagai program penyuluhan serta meningkatkan kualitas diri penyuluh pertanian. Jika tidak demikian, maka penyuluh tidak akan mampu menjadi pendamping petani, yang akhirnya petani akan makin jauh dari para penyuluh pertanian. Dengan kata lain, perkembangan penyuluhan pertanian tidak lepas dari Upaya perbaikan internal penyuluh baik kemampuan penyuluh dan kelembagaan serta jaringannya, disamping faktor luar yang sangat dominan berpengaruh.

Sejarah penyuluhan pertanian di Indonesia mengalami pasang surut. Berawal dari pengangkatan 5 penasihat pertanian pada tahun 1908 yang tidak memiliki kewenangan pengawasan terhadap petani, kemudian berkembang dan mencapai masa kejayaan pada tahun 1984. Saat itu dicapai swasembada pangan dengan pendekatan keseragaman program “panca usaha tani” dan penyuluh mendapat pengakuan petani, lalu penerapan otonomi daerah yang memperhatikan keragaman wilayah sehingga membutuhkan program penyuluhan pertanian bersifat lokal spesifik serta menuntut kemampuan penyuluh pertanian yang makin tinggi. Penyuluhan pertanian menghadapi banyak tantangan, misal yang bersifat internal organisasi penyuluhan,

kebijakan-kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang kadang belum selaras dengan kegiatan penyuluhan, serta komitmen dan kemampuan dari individu

Berbagai metode, pendekatan, dan program penyuluhan dilakukan dengan segala penyempurnaannya dalam rangka mencapai tujuan penyuluhan pertanian. Keberhasilan menghadapi tantangan akan mengukuhkan kembali posisi dan kontribusi penyuluhan dalam Pembangunan pertanian. Stabilitas suatu negara antara lain ditentukan oleh ketersediaan pangan bagi penduduknya, berarti sektor pertanian tetap memegang peran penting. Petani Sebagai pelaku di garis depan sektor pertanian perlu inovasi secara kontinu yang diadopsi melalui kegiatan penyuluhan, agar mampu berperan dan mau melakukan perbaikan dalam pembangunan pertanian. Dengan demikian, penyuluhan pertanian merupakan komponen yang harus ada dalam pembangunan pertanian suatu negara.

E. Daftar Pustaka

- Departemen Pertanian (1978) 10 Tahun Departemen Pertanian.
Jakarta: Menteri Pertanian.
- Harijati, I.S. (2014) Sejarah dan Pengertian Penyuluhan Pertanian. 1st edn. Banten: Universitas Terbuka.
- Sumaryo, S. and Listiana, I. (2018) Dinamika Penyuluhan Pertanian: dari Era Kolonial Sampai dengan Era Digital. Lampung: AURA.

BAB 5

PROSES ADOPSI & DIFUSI INOVASI DALAM PEMBANGUNAN PERTANIAN

Megafirmawanti Lasinta, S.I.Kom., M.Si.

A. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara agraris diartikan bahwa mayoritas penduduk Indonesia bekerja pada sektor pertanian. Hingga Agustus 2022 tercatat bahwa sektor pertanian masih menjadi urutan pertama pada mata pencaharian utama penduduk Indonesia. Dari 135,3 juta jiwa penduduk Indonesia yang bekerja (usia 15 tahun ke atas) tercatat sebanyak 38,7 juta bekerja pada sektor pertanian. Artinya, perhatian terhadap sektor ini harus terus dilakukan demi keberlangsungan hidup penduduk Indonesia, bahkan dunia.

Pentingnya sektor pertanian sebagai sumber daya paling utama bagi keberlangsungan hidup masyarakat Indonesia menjadikan sektor ini selalu menjadi primadona yang diprioritaskan baik oleh pemerintah maupun non pemerintah. Berbagai inovasi digalakkan dalam bidang ini, tak lain dan tak bukan untuk memperoleh produktivitas yang kian meningkat agar tujuan pertanian berkelanjutan dapat terwujud. Inovasi yang dimaksud tertuang dalam berbagai bentuk ide, pemikiran, hingga teknologi yang disesuaikan dengan permasalahan nyata di lapangan.

Bagi insan akademik yang bergelut di bidang pertanian, memahami inovasi tidaklah cukup dengan mengetahui ragam inovasi. Yang lebih penting adalah memahami bagaimana

masyarakat merespon inovasi di hadapan mereka. Seorang penyuluh pertanian harus mengerti mengapa inovasi diadopsi secara cepat pada suatu daerah, tetapi sangat lambat diadopsi di daerah yang lain atau bahkan ditolak di daerah tertentu. Apa penyebab kelambanan adopsi? Dan apa yang perlu dilakukan menanggapi fenomena tersebut? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan inilah yang akan coba diulas dalam Bab 5 ini.

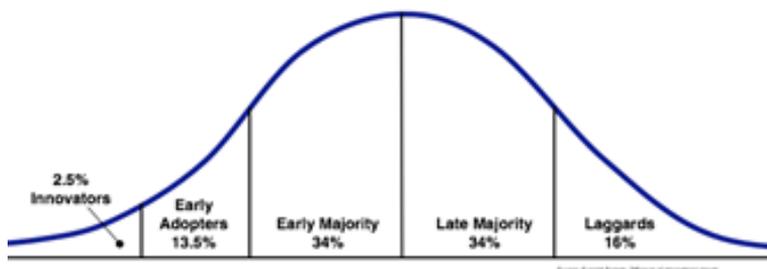
B. Pengertian Adopsi dan Difusi Inovasi

Berdasarkan KBBI, adopsi didefinisikan sebagai penerimaan usul atau laporan. Difusi adalah penyebaran atau perembesan sesuatu berupa kebudayaan, teknologi, atau ide dari satu pihak ke pihak lainnya. Sementara inovasi adalah penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya (dapat berupa gagasan, metode, atau alat). Secara teoritis ketiga istilah inilah yang menjadi inti teori Diffusion of Innovation (DOI) yang digagas oleh Rogers meneruskan yang telah diteorikan ilmuwan sebelumnya yakni Gabriel Tarde.

Difusi inovasi adalah teori tentang bagaimana perubahan sosial terjadi pada masyarakat. Menurut (Rogers 1983) riset tentang difusi inovasi telah dimulai pada 1962 dengan melihat perubahan-perubahan yang terjadi di Amerika dan Eropa. Pada tahun tersebut perkembangan difusi inovasi terjadi atas pengamatan perubahan di Amerika Latin, Afrika, kemudian Asia.

Secara historis, teori ini pertama kali dikenalkan oleh ilmuwan Perancis yang bernama Gabriel Tarde pada tahun 1903. Ia meneliti tentang difusi inovasi yang kemudian dikenal dengan istilah "The laws of imitation". Pada masanya, Gabriel Tarde mengamati kasus-kasus hukum di pengadilan, ia kemudian mengatakan bahwa sebuah inovasi akan diimitasi atau diadopsi lebih dahulu oleh seorang yang paling dekat dengan sumber gagasan baru. Konsep difusi inovasi Tarde dikenal dengan kurva S yang menjelaskan imitasi ditinjau dari dimensi waktu (Rogers 1983).

Kurva S yang dikembangkan oleh Gabriel Tarde kemudian dibuktikan Rogers yang pada akhirnya mengelompokkan tipe-tipe pengadopsi inovasi ditinjau dari segi rentang waktu. Ada lima tipe pengadopsi yakni (1) perintis (innovator) yang mencakup sebanyak 2,5 % dari populasi. Kelompok ini adalah individu atau masyarakat yang paling awal mengadopsi inovasi. (2) pelopor (early adopter) sekitar 1,5 %, yaitu orang-orang yang memiliki pengaruh dalam komunitasnya. Individu atau masyarakat tipe pelopor jumlahnya lebih sedikit daripada inovator. Pelopor adalah kelompok yang segera mengadopsi inovasi namun tidak secepat para inovator. (3) penganut dini (early majority) sekitar 34 %, individu atau masyarakat tipe ini juga cepat dan tanggap terhadap inovasi. Kelompok ini selangkah lebih cepat dibanding kelompok lainnya. Berdasarkan penelitian, kelompok ini diisi oleh orang-orang yang memiliki latar belakang pendidikan yang baik. (4) penganut lambat (late majority) sekitar 34% adalah kelompok yang baru akan mengadopsi inovasi saat hampir semua orang telah mengadopsi inovasi. Penelitian menunjukkan bahwa kelompok ini diisi oleh orang-orang yang kurang berpendidikan. Mereka baru akan mengadopsi jika telah melihat orang lain mengadopsinya. (5) kaum kolot (laggard) sekitar 16 % adalah golongan terakhir yang mengadopsi inovasi. Penelitian menunjukkan bahwa kelompok ini biasanya diisi oleh orang-orang yang sudah tua sehingga memiliki keterbatasan dalam beraktivitas (Harun 2011).



Gambar 2 Sumber: Rogers 1983

Rogers (1983) menjelaskan tentang adanya keterbatasan dalam pengamatan difusi inovasi. Saat itu pengamatan tentang difusi inovasi berhenti karena ilmuwan di masa Tarde belum memiliki alat metodologis yang kuat untuk meneliti difusi inovasi. Kemudian, teori difusi inovasi terus berkembang dari waktu ke waktu. Berdasarkan perkembangan dinyatakan terdapat tradisi dalam penelitian difusi inovasi. Diantaranya adalah antropologi, sosiologi, sosiologi pedesaan, pendidikan, kesehatan masyarakat, sosiologi umum, pemasaran, termasuk juga tradisi komunikasi (Rogers 1983). Atas dasar komunikasi sebagai salah satu tradisi, tak jarang disebut bahwa proses difusi pada dasarnya adalah sebuah proses komunikasi. Atau dengan kata lain dapat didefinisikan bahwa difusi inovasi merupakan sebuah proses mengkomunikasikan ide, gagasan, praktik, atau teknologi baru kepada individu atau masyarakat.

Memahami definisi difusi inovasi artinya memahami secara terpisah apa yang disebut dengan difusi dan apa yang disebut dengan inovasi. Difusi adalah proses dimana sebuah inovasi dikomunikasikan melalui saluran tertentu dari waktu ke waktu diantara anggota sistem sosial (Rogers 1983). Dalam hal ini, hal yang tidak boleh diabaikan adalah terkait saluran komunikasi yang digunakan. Menurut (Leeuwis 2009) terdapat tiga bentuk dasar komunikasi dengan saluran. Yakni saluran komunikasi konvensional, saluran komunikasi antar-personal, dan saluran komunikasi dengan media hibrid. Artinya, proses mengkomunikasikan inovasi dapat dilakukan melalui tiga bentuk saluran komunikasi tersebut.

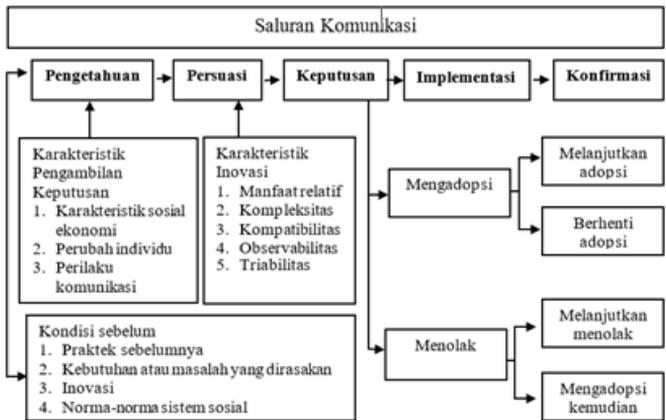
Selanjutnya, inovasi menurut Rogers adalah gagasan, praktik, atau objek yang dianggap baru oleh individu atau unit adopsi lainnya dalam hal ini, sesuatu yang dianggap baru di suatu tempat belum tentu juga menjadi hal yang baru bagi tempat yang lain. Bisa jadi, sesuatu yang telah lama diadopsi oleh individu atau masyarakat tertentu merupakan hal yang sangat baru bagi individu atau masyarakat yang lain. Pada intinya, inovasi tidak memandang apakah sesuatu itu benar-benar baru muncul atau tidak, melainkan lebih menekankan

pada apakah sesuatu itu baru diketahui atau dikenal oleh subjek inovasi itu sendiri, yaitu calon adopternya.

Berikutnya, adopsi adalah keputusan untuk memanfaatkan sepenuhnya tentang inovasi sebagai sebuah pilihan terbaik yang diambil (Rogers 1983). Dalam hal ini, adopsi dapat berlanjut menjadi benar-benar mengadopsi, namun dapat juga berhenti dari yang tadinya mengadopsi menjadi berhenti mengadopsi. Begitu juga dengan keputusan menolak inovasi, dapat menjadi benar-benar menolak inovasi, atau menolak inovasi terlebih dahulu kemudian mengadopsinya di waktu mendatang. Hal ini merupakan sebuah isyarat bagi para agen of change untuk tidak segera menyimpulkan apakah akan tetap melakukan difusi inovasi atau benar-benar berhenti melakukan difusi inovasi tersebut.

C. Tahapan-tahapan dalam Difusi Inovasi

Penjelasan sebelumnya menunjukkan bahwa adopsi adalah salah satu tahapan penting dari proses difusi inovasi. Bukanlah satu hal yang mudah bagi individu (apalagi kelompok) untuk sampai pada keputusan segera mengadopsi suatu inovasi yang hadir didepan mata. Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi keputusan tersebut baik dari faktor internal individunya atau bahkan dari segi karakteristik inovasinya. Dalam penjelasan Rogers (2003) tercantum bahwa terdapat tahapan yang dilalui calon adopter ketika ditawarkan sebuah inovasi. Tahapan tersebut terdiri dari lima tahap yang disebut dengan A Model of Five Stages in The Innovation-Decision Process. Tahapan-tahapan tersebut adalah tahap pengetahuan, persuasi, keputusan, implementasi, dan konfirmasi.



Gambar 3 Keputusan Adopsi Inovasi (Sumber: Rogers (2003))

1. Tahap Pengetahuan

Sahin (2006) menjelaskan bahwa proses difusi inovasi dimulai dengan tahap pengetahuan. Tahap ini merupakan kondisi dimana individu telah terpapar informasi inovasi. Pada tahap ini individu mulai melakukan peran pasif. Tahapan pengetahuan menunjukkan sikap yang cenderung tidak melakukan reaksi apapun terkait inovasi sampai ia merasa memerlukan inovasi. Pada tahap pengetahuan, individu mulai bertanya tentang keberadaan inovasi terkait apa? bagaimana? dan mengapa? Ketiga pertanyaan ini kemudian membentuk tiga jenis pengetahuan.

Pengetahuan pertama adalah awareness-knowledge yang mewakili pertanyaan tentang keberadaan inovasi. Pertanyaan ini memotivasi individu untuk mencari tahu dan belajar lebih banyak tentang inovasi. Pengetahuan kedua adalah how-to-knowledge yakni berisi informasi tentang bagaimana menggunakan inovasi dengan benar (Rogers 2006). Seperti contoh, seseorang baru saja mengetahui informasi terkait perilaku ramah lingkungan. Untuk sampai pada tahap implementasi perilaku ramah lingkungan tersebut, individu yang bersangkutan harus memiliki pengetahuan tentang bagaimana melakukan perilaku yang ramah terhadap lingkungan. Seseorang lebih mudah

melakukan perilaku ramah lingkungan 3R (*reduce, reuse, recycle*) jika ia mengetahui bagaimana cara melakukan perilaku 3R. Dalam hal ini, individu akan lebih kritis terhadap inovasi yang lebih kompleks (Rogers 2006).

Pengetahuan berikutnya setelah *awareness-knowledge* dan *how-to-knowledge* adalah *principles-knowledge* yaitu pengetahuan mencakup prinsip-prinsip fungsi yang menjelaskan bagaimana dan mengapa suatu inovasi berhasil. Suatu inovasi dapat diadopsi tanpa pengetahuan ini, tetapi penyalahgunaan inovasi dapat menyebabkan penghentiannya (Rogers 2006). Untuk menciptakan pengetahuan baru, pendidikan dan praktik inovasi harus memberikan tidak hanya pengalaman bagaimana-untuk tetapi juga pengalaman tahu-mengapa (Seemann 2003).

Tiga jenis pengetahuan pada tahap pertama difusi-inovasi ini menjadi penting diperhatikan bagi para agen perubahan. Seringkali agen perubahan berkonsentrasi pada jenis pengetahuan *awareness-knowledge* saja, padahal bentuk pengetahuan ini akan lebih efektif dicapai dengan media massa. Hal yang seharusnya dilakukan agen perubahan adalah berkonsentrasi pada peran yang lebih signifikan yaitu membentuk pengetahuan *how-to-knowledge* dimana pengetahuan ini dianggap lebih penting bagi klien dalam pengambilan keputusan adopsi inovasi (Rogers, 2003).

Hal lain yang kadang dipersepsikan keliru oleh agen perubahan adalah bahwa *principles-knowledge* bukanlah bagian dari tanggungjawab mereka dan cenderung menyerahkan tanggung jawab tersebut kepada pendidikan formal. Padahal, dengan adanya pemahaman seperti ini, tugas jangka panjang seorang agen perubahan akan menjadi lebih lama (Rogers, 2003). Adanya persepsi yang keliru ini perlu disiasati dengan metode kolaborasi untuk perubahan melalui inovasi. Agen perubahan harus menjalin kerjasama dengan berbagai stakeholder (termasuk akademisi) agar tiga

bentuk pengetahuan pada tahap pertama ini dapat mengarahkan klien/calon adopter pada pengambilan keputusan untuk mengadopsi inovasi yang dimaksud.

2. Tahap Persuasi

Pada tahap persuasi individu mulai menentukan sikap terhadap inovasi. Tahapan ini menunjukkan keterlibatan psikologis yang ditandai dengan aktifnya individu mencari informasi inovasi. Perilaku individu dalam tahapan ini adalah mencari informasi dari berbagai sumber, mengidentifikasi pesan inovasi yang didapatkan, dan menginterpretasi inovasi. Hal penentu dalam tahapan ini adalah karakteristik inovasi. Ada lima karakteristik inovasi menurut Rogers (2003) yakni keuntungan relatif, kompatibilitas, kompleksitas, triabilitas dan observabilitas.

Keuntungan relatif (*relative advantage*) adalah salah satu karakteristik inovasi yang menentukan keputusan seseorang untuk melakukan adopsi inovasi. Menurut (Wahyuni *et al.* 2019), keuntungan relatif akan menentukan keberlanjutan penerapan suatu inovasi. Keuntungan relatif menurut (Syahrudin and Salim 2014) mengutip Rogers (2003) adalah tentang sejauh mana suatu inovasi dianggap menguntungkan atau lebih baik daripada ide yang digantikannya. Dalam hal ini, unsur biaya menjadi salah satu dimensi dalam keuntungan relatif ini. Pada prakteknya, keuntungan relatif kadang dikaitkan dengan pemberian insentif secara langsung maupun tidak langsung. Syahyuti (2005) menambahkan bahwa anggota komunitas akan terlibat dalam inovasi jika adanya keuntungan (*tangible benefits*) secara kasat mata baik dari produk yang dihasilkan, jasa yang diberikan, ataupun pendapatan.

Karakteristik inovasi berikutnya adalah kompatibilitas. Menurut (Septiani Nurul Imani, Iwan Setiawan 2022) mengutip Rogers (1983) Kompatibilitas adalah suatu derajat dimana suatu inovasi dianggap kompatibel atau cocok dengan individu atau masyarakat calon adopter. Byambaa *et al.* (2015) pernah meneliti terkait

kompatibilitas inovasi penilaian dampak kesehatan atau Health Impact Assessment (HIA) di negara yang berpenghasilan rendah dan menengah. Ia menyimpulkan bahwa pada dasarnya belum ada pengalaman dan norma mengenai HIA bagi pemerintah maupun perusahaan. Sehingga agar HIA diadopsi dengan baik, maka sosialisasi HIA dilakukan melalui legislasi wajib agar dapat mengubah persepsi dan membentuk norma baru tentang HIA.

Karakter berikutnya adalah kompleksitas, yakni sejauh mana inovasi dianggap sulit untuk dipahami dan digunakan. Soekartawi (2005) mengulas kompleksitas adalah sejauh mana inovasi bersifat rumit untuk diterapkan. Semakin mudah dipraktekkan, akan semakin cepat adopsi inovasi yang terjadi. Beberapa inovasi akan mudah dipahami oleh sebagian besar anggota komunitas, namun beberapa inovasi lain yang lebih rumit dan akan diadopsi lebih lambat. Ide-ide baru yang lebih mudah dipahami akan diadopsi lebih cepat daripada inovasi yang mengharuskan pengguna mengembangkan keterampilan dan pemahaman baru. Petruzzelli *et al.* (2011) meneliti tentang kompleksitas inovasi hijau (green innovation) dan membandingkannya dengan inovasi lain. Menurutnya, green innovation memiliki tingkat kompleksitas yang lebih rumit dibandingkan dengan inovasi selain inovasi hijau. Seperti halnya dalam karakter inovasi yang kurang kompatibel, kolaborasi eksternal maupun internal sangat dibutuhkan. Dalam hal ini, kolaborasi yang dimaksud adalah antara pemerintah, anggota komunitas serta aktor-aktor internal atau pemimpin opini dalam komunitas itu sendiri.

Karakter inovasi selanjutnya adalah triabilitas, yakni karakter tentang sejauh mana inovasi dapat diujicobakan. Ide-ide baru yang dapat dicoba pada umumnya diadopsi lebih cepat daripada inovasi yang tidak dapat diuji. Inovasi yang dapat diuji merepresentasikan suatu ketidakpastian yang lebih sedikit. Hal ini memungkinkan terjadinya adopsi inovasi yang lebih cepat dibandingkan pada inovasi yang

tidak diuji coba terlebih dahulu. Menurut Soekartawi (2005) triabilitas berhubungan dengan kemudahan. Artinya, semakin mudah inovasi yang ditawarkan untuk dilakukan, maka akan semakin cepat adopsi inovasi yang terjadi. Ho & Wu (2011) menyatakan, jika dibandingkan dengan keuntungan relatif, triabilitas suatu inovasi memiliki peran yang lebih penting dalam mempengaruhi keputusan adopsi. Hal ini disebabkan karena proses uji coba dapat mengurangi ketidakpastian bagi anggota komunitas yang akan mengadopsi inovasi.

Karakter terakhir adalah observabilitas yang menunjukkan sejauh mana hasil suatu inovasi dapat dilihat oleh orang lain. Semakin mudah bagi individu melihat hasil sebuah inovasi, maka akan semakin besar kemungkinan mereka untuk mengadopsi inovasi tersebut. Ho & Wu (2011) menambahkan bahwa hasil observasi anggota komunitas adalah visibilitas atau keteramatan inovasi yang akan memicu munculnya pertanyaan-pertanyaan diantara sesama anggota komunitas. Hal inilah selanjutnya yang akan mendorong anggota komunitas mengadopsi inovasi.

3. Tahap Keputusan

Tahap difusi inovasi selanjutnya adalah keputusan, yakni tahapan yang terjadi ketika individu terlibat dalam kegiatan yang mengarah pada pilihan untuk mengadopsi atau menolak inovasi. Mengadopsi artinya memanfaatkan sepenuhnya inovasi. Sedangkan menolak adalah tidak mengadopsi inovasi. Bagi kebanyakan individu, salah satu cara mengatasi ketidakpastian yang melekat tentang konsekuensi inovasi adalah mencoba ide baru secara parsial atau sebagian. Kebanyakan individu tidak akan mengadopsi inovasi tanpa mencobanya terlebih dahulu untuk menentukan kegunaan inovasi dalam situasi mereka sendiri. Percobaan skala kecil sering menjadi bagian dari keputusan untuk mengadopsi. Hal ini sangat penting sebagai sarana mengurangi ketidakpastian inovasi bagi penerima inovasi.

Dalam beberapa kasus, inovasi tidak dapat di uji coba sehingga harus diadopsi atau ditolak.

Rogers (2003) menambahkan jenis keputusan dalam komunikasi inovasi terdiri dari tiga jenis yakni; (1) Keputusan inovasi opsional, adalah keputusan yang bersifat pilihan. Dalam hal ini, individu memiliki hak mengadopsi atau menolak inovasi. Keputusan individu dipengaruhi oleh norma-norma sistem dan oleh jaringan interpersonal. Aspek khas dari keputusan opsional adalah bahwa individu merupakan unit pengambil keputusan. (2) Keputusan inovasi kolektif, adalah keputusan inovasi yang ditentukan berdasarkan konsensus atau kesepakatan di antara anggota komunitas. Dalam hal ini, semua unit dalam komunitas harus mengikuti keputusan yang telah dibuat. (3) Keputusan inovasi otoritas, adalah keputusan yang harus diikuti oleh setiap anggota komunitas. Keputusan jenis ini tidak mengizinkan pilihan individu sebagai penentu adopsi inovasi. Dalam hal ini, individu memiliki otoritas yang kecil jika dibandingkan dengan otoritas komunitas sebagai suatu sistem sosial.

4. Tahap Implementasi

Tahapan adopsi selanjutnya adalah implementasi inovasi. Implementasi melibatkan perubahan perilaku yang jelas. Ide atau perilaku baru yang disosialisasikan benar-benar di praktekkan. Pada tahap implementasi, individu masih memiliki rasa ketidakpastian berkaitan dengan inovasi. Individu pada tahapan implementasi memiliki rasa ingin tahu yang semakin tinggi tentang inovasi. Misalnya tentang perilaku apa yang harus dilakukan individu berkaitan dengan inovasi. Atau tentang masalah operasional yang akan terjadi dalam adopsi inovasi. Tahapan implementasi menunjukkan adanya individu yang aktif. Tahapan implementasi berakhir ketika inovasi telah melembaga di dalam diri anggota komunitas. Tahapan implementasi juga bisa menghadirkan penemuan baru

dimana individu mengubah atau memodifikasi inovasi yang disebarluaskan.

5. Tahap Konfirmasi

Tahap konfirmasi adalah tahap terakhir dari proses difusi inovasi. Individu mencari penguatan keputusan inovasi yang dibuatnya. Agen perubahan memiliki peran penting dalam tahapan ini. Tahap konfirmasi berlanjut setelah keputusan mengadopsi atau menolak dalam waktu yang tidak terbatas. Individu bisa saja merasakan disonansi atau keadaan tidak nyaman berkaitan dengan inovasi. Ketika individu merasakan disonansi, dia akan termotivasi untuk mengurangi kondisi dengan mengubah pengetahuan, sikap, dan juga tindakannya. Artinya, tahap konfirmasi merupakan penekanan bagi individu apakah akan benar-benar mengadopsi atau benar-benar menolak inovasi yang disebarluaskan.

D. Daftar Pustaka

- Byambaa T, Janes C, Takaro T, Corbett K. 2015. Putting Health Impact Assessment into practice through the lenses of diffusion of innovations theory: a review. *Environ Dev Sustain.* (17) p. 23–40. DOI 10.1007/s10668-014-9538-5
- Harun R. dan Ardianto E. 2011. *Komunikasi Pembangunan Perubahan Sosial*. Jakarta (ID): PT RajaGrafindo
- Ho CH, Wu W. 2011. Role Of Innovativeness Of Consumer In Relationship Between Perceived Attributes Of New Products And Intention To Adopt. *International Journal of Electronic Business Management.* (9) 3, pp. 258-266
- Leeuwis C. 2009. *Komunikasi untuk Inovasi Pedesaan Berpikir Kembali tentang Penyuluhan Pertanian*. Yogyakarta (ID): Kanisius
- Rogers EM. 2003. *Diffusion of Innovation*. 5th Edition. New York: Free Press

- Rogers. 2006. "Detailed Review of Roger's Diffusion of Innovations Theory and Educational Technology." *The Turkish Online Journal of Educational Technology* 5(2): 14-23. <https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED501453.pdf>.
- Seemann, Kurt. 2003. "Basic Principles in Holistic Technology Education." *Journal of Technology Education* 14(2): 28-39.
- Septiani Nurul Imani, Iwan Setiawan, Benidzar M Andrie. 2022. "Persepsi Dan Tingkat Adopsi Petani Terhadap Inovasi Teknologi Pengelolaan Tanaman Terpadu (Ptt) Padi Sawah Di Desa Tribudisyukur Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat Farmers Perception and Adoption Levels of Integrated Crop Management Technology (" *Agroinfo Galuh* 43: 804-11. <https://jurnal.unigal.ac.id/>.
- Soekartawi. 2005. *Prinsip Dasar Komunikasi Pertanian*. Jakarta (ID): Universitas Indonesia Pres
- Syahrum, and Salim. 2014. *1 Metode Penelitian Kuantitatif*. ed. Rusydi Ananda. Bandung: Citra Pustaka Media.
- Syahyuti. 2005. *Pembangunan Pertanian Dengan Pendekatan Komunitas: Kasus Rancangan Program Prima Tani* . Forum Penelitian Agro Ekonomi. (23)
- Wahyuni, Sri, Zulvera Zulvera, Hery Bachrizal Tanjung, and Ernita Arif. 2019. "Hubungan Karakteristik Inovasi Dan Kearifan Lokal Terhadap Keberlanjutan Penerapan Teknologi Padi Salibu Di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat." *Jurnal Penyuluhan* 15(1).

BAB 6

METODE, MATERI, MEDIA, DAN ALAT BANTU DALAM PENYULUHAN PERTANIAN

Yoenita Jayadisastra, S.ST., M.Si.

A. Pendahuluan

Penyuluhan adalah kegiatan yang melibatkan banyak unsur-unsur salah satunya adalah informasi yang diberikan kepada petani dan keluarganya agar bisa dan mampu melaksanakan usahatannya sesuai dengan anjuran dari penyuluh. Penyuluhan juga identik dengan pendidikan luar sekolah atau yang biasa disebut pendidikan non formal. Karena penyuluhan merupakan pendidikan non formal, maka kegiatan ini membutuhkan perencanaan yang matang mengenai program pendidikan yang akan diterapkan. Oleh karena itu, pada pelaksanaannya, kegiatan penyuluhan membutuhkan kreativitas yang lahir dari sebuah inovasi, ide bahkan gagasan dari penyuluh itu sendiri. Karena meskipun dengan kekompleksitasnya semua unsur-unsur penyuluhan tersedia, jika tidak mampu dikuasai oleh penyuluh, maka kegiatan penyuluhan pertanian akan terasa seperti pendidikan dengan model top down. Hal yang tidak boleh dilakukan oleh seorang penyuluh adalah mendoktrin petani untuk melakukan apa yang diarahkan. Karena bagaimanapun juga, penyuluh harus memahami tingkatan pengetahuan kognitif yang dimiliki oleh petani berdasarkan Taksonomi Bloom yaitu dari C1 hingga C6 dari mengetahui hingga mengaplikasikan.

Menurut (Purukan *et al.*, 2021) dalam kegiatan penyuluhan seringkali menghadapi kendala-kendala teknis, yaitu 1) partisipasi petani yang cenderung rendah terlebih jika materi penyuluhan bukanlah hal yang menarik bagi petani, sehingga seringkali pada saat penyuluhan kehadiran mereka sangat rendah; 2) sarana dan prasarana penyuluhan yang masih sangat kurang; 3) kegiatan penyuluhan tidak terorganisir dengan baik, sehingga sering terjadi kemacetan komunikasi antara penyuluh dengan sasaran penyuluhan.

Perjalanan penyuluhan pertanian di Indonesia memiliki sejarah yang tergolong panjang dan dimulai pada awal abad 20 (Sadono, 2008) yang mana pada awalnya untuk memenuhi kebutuhan hasil pertanian baik bagi penjajah maupun untuk masyarakat pribumi. Dengan perjalanan yang panjang itu sampailah pada masa kemerdekaan dan era Revolusi Hijau dengan banyaknya program yang diberikan oleh pemerintah untuk menarik minat masyarakat kembali menjadi petani sehingga Indonesia bisa mencapai Swasembada beras pada tahun 1984 dan bisa menjadi negara pengimpor beras terbesar di dunia pada saat itu (Rusli, 1989). Namun, yang menjadi permasalahan selanjutnya adalah paradigm tentang penyuluhan menjadi sedikit berbeda sehingga penekanannya lebih sentralistik dengan dukungan dana dari pusat secara otomatis membuat negara mengatur segala kegiatan yang berkaitan dengan pertanian dengan mengedepankan pola komunikasi yang tidak luwes dan cenderung top down atau berorientasi instruksional. Sehingga menurut (Chambers, 1993) paradigma penyuluhan pertanian di Indonesia saat itu lebih dominan berorientasi pada transfer perkembangan teknologi tetapi tidak pada pelaku utamanya yaitu petani juga tidak pada proses pembelajarannya. Yang pada akhirnya menyebabkan ketergantungan dari pihak daerah kepada pusat dan pusat kepada negara importir teknologi pertanian yang membuat semakin tidak sinergisnya perkembangan pertanian di Indonesia (Oka, 1995).

Berdasarkan pendapat dari (Chambers, 1993), pada paradigma konvensional penyuluhan pertanian ternyata menimbulkan dampak yang fatal, yaitu :

1. Paradigma konvensional menyebabkan penurunan kreativitas pada petani yang otomatis menimbulkan sifat ketergantungan yang tinggi pada bantuan dari pemerintah.
2. Banyaknya ide-ide dan kreativitas bahkan kearifan lokal dari lembaga-lembaga swasta atau lokal yang ada di masyarakat menjadi tidak berkembang karena tidak bisa bersaing dengan paradigma yang sifatnya cenderung instruksional.
3. Hal ini juga berdampak negatif pada perkembangan pembangunan agribisnis di lapangan yang menjadi tidak efektif dan efisien karena pemerintah mematok biaya administrasi dan birokrasi yang rumit dan sulit.
4. Banyaknya pembangunan yang bersifat sentralistik dan tidak sesuai dengan kearifan lokal di masyarakat menjadi penyebab utama produk-produk lokal tidak mampu bersaing dengan produk unggulan yang diarahkan oleh pusat.

Sehingga (Slamet, 2001) menjabarkan ada 9 (Sembilan) ciri paradigma baru dalam penyuluhan, yaitu :

1. Jasa informasi, artinya penyuluh sudah ditahap bisa diandalkan dalam hal pengetahuan, penyediaan informasi terkait teknologi inovasi pertanian yang baru, pengetahuan tentang penggunaan teknologi pertanian, pengolahan pasca panen, pemasaran dan kegiatan yang terkait dengan usahatani lainnya.
2. Lokalitas, artinya adalah memanfaatkan keberadaan lembaga-lembaga pertanian baik milik pemerintah misalnya BPP, atau BPTP dan lembaga swasta yang bisa menjadi stakeholder bagi kegiatan pertanian untuk membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan dari petani di lapangan.
3. Berorientasi agribisnis, artinya penyuluh sudah harus banyak belajar tentang prinsip-prinsip agribisnis untuk mempersiapkan sasaran penyuluh menjadi petani yang bisa berbisnis sesuai dengan tujuan dari penyuluhan itu sendiri

salah satunya adalah membuat petani tidak hanya lebih baik dalam mengelola usahatannya, tetapi juga bisa lebih baik dalam mengelola bisnis hasil usahatannya.

4. Pendekatan kelompok, artinya penyuluh disiapkan untuk bisa berkolaborasi dengan kelompok-kelompok di masyarakat yang tidak hanya kelompok tani tetapi banyak kelompok lainnya yang bisa mendukung kegiatan penyuluhan pertanian di lapangan.
5. Fokus pada kepentingan petani, artinya penyuluh mempunyai skala prioritas untuk bisa membantu petani menyelesaikan permasalahan usahatannya dengan melakukan identifikasi awal terkait masalah-masalah petani di lapangan.
6. Pendekatan humanistic-egaliter, artinya penyuluh perlu menguasai pengetahuan dan keterampilan terkait komunikasi sosial, pendidikan orang dewasa, psikologi sosial juga strata sosial di masyarakat. Agar kegiatan penyuluhan tidak mengalami kendala akibat dari pengetahuan-pengetahuan dasar berbasis humanistik egaliter tersebut.
7. Profesionalisme, artinya bagaimana membuat lembaga yang menangani pelatihan dan pendidikan untuk penyuluh menjadi lebih baik lagi.
8. Akuntabilitas, artinya kegiatan penyuluhan pertanian merupakan kegiatan yang dapat diukur baik tujuan, pelaksanaan hingga evaluasinya. Sehingga bisa meminimalisir kendala-kendala yang ada di lapangan.
9. Memuaskan petani, artinya kegiatan penyuluhan keseluruhan unsur-unsurnya mulai dari penyuluh, materi, metode, hingga media pembelajaran berisi paket lengkap pembelajaran untuk petani sehingga kepuasan petani dapat tercapai.

Anang *et al.*, (2019) mengatakan bahwa kegiatan penyuluhan pertanian bisa terlaksana dengan baik apabila memenuhi unsur-unsur penyuluhan yang terdiri dari penyuluh yang handal, kelembagaan penyuluhan yang profesional, materi

penyuluhan yang diperbaharui disesuaikan dengan perkembangan informasi dan teknologi, metode dan teknik yang tepat dan media yang digunakan tepat. Di bawah ini dijabarkan uraian tentang hal-hal yang telah disebutkan di atas.

B. Metode dan Teknik Penyuluhan Pertanian

1. Metode Penyuluhan Pertanian

Metode penyuluhan adalah sesuatu yang harus dirancang dan ditentukan oleh penyuluh sendiri, karena ia yang mengetahui karakteristik petani yang menjadi sasaran penyuluhannya. Menurut Harinta (2011), penyuluhan adalah kegiatan pemberian bantuan yang dilakukan dalam suasana hubungan tatap muka antara dua orang, pertama karena keahliannya, kedua karena mampu mengatasi kesulitan orang lain. Sehingga dapat dikatakan bahwa keberhasilan dari kegiatan penyuluhan banyak ditentukan oleh bagaimana penyuluhan itu dilakukan, karena agar kegiatan tersebut lebih terarah dan jelas, penyuluh harus benar-benar menguasai keterampilan dan pengetahuan dalam melaksanakannya (Imran *et al.*, 2019).

Gitosaputro & Listiana (2018) mengatakan bahwa metode penyuluhan adalah membuat keterkaitan antara kegiatan penyuluhan pertanian dengan sasaran penyuluhan. Lebih lanjut (Gitosaputro & Listiana, 2018) mengatakan bahwa dengan mendekatnya jarak antara penyuluhan dan sasarannya, peluang yang dimiliki oleh penyuluh adalah menghasilkan stimulus baik secara mental maupun fisik petani yang akan menjadi penyebab keinginan untuk belajar inovasi baru, membuat sasaran penyuluhan memahami permasalahan dan kebutuhan mereka yang disesuaikan dengan materi penyuluhan yang dibawakan oleh penyuluh.

Pentingnya mengkombinasikan metode penyuluhan didasarkan pada berbagai pertimbangan salah satunya adalah melihat efektivitas dan efisiensi dari kegiatan tersebut. Efektivitas yang dimaksud adalah tingginya pencapaian tujuan dari penyuluhan berdasarkan penerapan metode yang

dilakukan. Efisiensi terkait dengan pertimbangan beberapa hal yaitu biaya, tenaga dan waktu yang digunakan pada kegiatan penyuluhan. Karena menurut Mardikanto (2009) bahwa tidak ada satupun metode yang selalu efektif dan efisien untuk dapat diaplikasikan dalam penyuluhan, yang artinya kegiatan ini menuntut untuk dapat menggunakan beragam metode agar saling melengkapi satu sama lainnya.

Achmad *et al.* (2015) mengungkapkan bahwa kegiatan penyuluhan pertanian terkadang dihadapkan pada keterbatasan ketersediaan penyuluh, keterbatasan yang berasal dari sasaran, misalnya pada tingkat pendidikan formal petani yang sangat beragam, juga keterbatasan media pembelajaran atau alat bantu bagi petani. Sehingga untuk meminimalisir segala keterbatasan kegiatan penyuluhan di atas, maka diperlukan pemilihan metode penyuluhan. Menurut Kusnadi (2011) metode penyuluhan adalah bagaimana cara menyampaikan materi atau isi pesan dari penyuluh kepada petani beserta keluarganya baik secara langsung atau tidak langsung dengan tujuan agar mereka tahu, mau dan mempunyai kemampuan untuk menggunakan inovasi baru.

Mardikanto (1993) memperkenalkan tiga pendekatan yang dapat digunakan untuk memilih metode penyuluhan, yaitu berikut :

a. Berdasarkan Media yang Digunakan

- 1) Media lisan yang dapat disampaikan baik secara langsung maupun tidak langsung
- 2) Media cetak, berupa gambar, poster, leaflet, yang cara penyampaiannya bisa dibagi-bagikan secara langsung atau dipasang di area strategis
- 3) Media terproyeksi, adalah media yang menggabungkan antara suara, video dan tulisan yang bisa berupa pertunjukkan film, dan lain lain.

b. Berdasarkan Jarak Sasaran

- 1) Komunikasi langsung, adalah penyuluhan yang dilakukan dengan tatap muka atau kunjungan rumah

yang biasa disebut Anjangsana. Penyuluhan dengan metode anjangsana ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah isi atau materi dari penyuluhan bisa disampaikan secara langsung sehingga pendekatan secara persuasif terjalin. Kekurangannya adalah keterbatasan waktu dari penyuluh untuk melakukan anjangsana di setiap rumah atau lahan usahatani.

- 2) Komunikasi tidak langsung, dilakukan melalui perantara baik telepon seluler, maupun media misalnya siaran radio pertanian, anjuran terkait pertanian di koran, majalah, poster dan leaflet.

Berdasarkan studi dari Nurjasmira, 2014 komunikasi dikatakan berhasil apabila telah terjadi kesamaan yang sama tentang isi pesan atau informasi baik dari pembawa pesan maupun penerima pesan, sehingga tercapai tujuan yang telah diharapkan.

c. Berdasarkan Jumlah Sasaran

1) Pendekatan massal

Pendekatan secara massal dilakukan jika tujuan dari penyuluhan hanya ingin memberi informasi saja tanpa mengharapkan tujuan yang lain misalnya mengaplikasikan. Karena keterbatasan dari penyuluhan secara massal adalah kita tidak mengetahui secara pasti apakah informasi tersebut telah diterima utuh atau hanya setengah-setengah. Kemudian, jangkauan dari pendekatan ini luas sehingga kita tidak bisa mengetahui secara pasti kelompok tani mana saja yang sudah mengetahui informasi tersebut. Sehingga untuk penyuluhan menggunakan metode massal tidak disarankan dilakukan jika tujuan penyuluhan itu adalah untuk mengaplikasikan atau mencoba.

2) Pendekatan kelompok

Pendekatan ini tergolong cepat dan juga praktis jika dibandingkan dengan pendekatan perseorangan. Namun tetap saja mempunyai kekurangan, yaitu cara memilih kelompok strategis yang akan menjadi sasaran penyuluhan. Karena kelompok tani cukup banyak jenisnya di masyarakat. Dan itu tidak hanya pada kelompok tani, masih banyak kelompok-kelompok di masyarakat yang harus tetap dirangkul dan berpotensi untuk menjadi sasaran penyuluhan yang strategis. Karena pada dasarnya kegiatan penyuluhan pertanian adalah tidak bisa berjalan hanya mengandalkan petani dan penyuluh saja. Banyak dari masyarakat yang berlaku menjadi stakeholder berupa toko tani, toko distributor hasil-hasil pertanian, dan masih banyak lagi. Kelompok ini juga menjadi bagian dari sasaran penyuluhan yang harus dikelola dengan baik. Tujuannya adalah untuk menyamakan persepsi mengenai penyebaran inovasi pertanian di masyarakat.

3) Pendekatan perorangan

Pendekatan ini jika dikaitkan dengan efisiensi dan efektivitas tujuan dari penyuluhan maka dia memiliki keduanya. Pendekatan penyuluhan perorangan di sisi efektivitas sangat tinggi, karena informasi mengenai inovasi baru sudah pasti tersalurkan dengan baik. Pendekatan ini dilakukan kepada petani atau pihak yang memiliki nilai strategis dalam masyarakat. Diharapkan dengan pendekatan ini, akan mempengaruhi petani atau masyarakat lainnya. Efektivitas selanjutnya adalah perubahan yang sangat terlihat pada sasaran penyuluhan, mulai dari minat yang besar untuk mencoba dan aplikasi langsung di lahan usahatani. Hal ini lebih disebabkan pihak strategis jika dihubungkan dengan tingkatan adopsi maka ia berada pada tingkat perintis

awal. Artinya berani mencoba untuk mengaplikasikan inovasi tersebut dengan penuh keyakinan. Pada sisi efisiensi, pendekatan perorangan ini memiliki kelemahan dari segi waktu, tenaga dan biaya yang harus dikeluarkan oleh penyuluh untuk mengunjungi pihak-pihak strategis tersebut. Sehingga hal penting yang harus dilakukan oleh penyuluh adalah ketepatan pemilihan pihak strategis tersebut dengan cara melakukan pengamatan terlebih dahulu pada kelompok sasaran penyuluhan. Dan sebagai seorang penyuluh, tidak akan sulit untuk menentukan pihak-pihak strategis tersebut, dengan kemampuan memahami ilmu psikologi pada pendidikan orang dewasa. Karena sejatinya, penyuluhan itu adalah pendidikan yang dilakukan dengan banyak metode pendidikan orang dewasa.

2. Teknik-Teknik Penyuluhan Pertanian

Jika definisi dari metode adalah pendekatan untuk mendekati penyuluhan dengan petani, maka teknik penyuluhan adalah aplikasi caranya atau cara melakukannya. Kemungkinan besar pada kegiatan ini, petani sebagai sasaran penyuluhan belajar banyak mengenai inovasi baru yang sedang diserahkan. Di bawah ini adalah rangkuman dari berbagai ahli mengenai teknik-teknik penyuluhan pertanian, yaitu :

a. Kunjungan Rumah

Kunjungan rumah dalam Bahasa penyuluhannya adalah anjangsana yaitu kunjungan penyuluh ke rumah petani dengan tujuan mendekati diri kepada sasaran agar lebih mudah untuk melakukan penyebaran inovasi pertanian.

b. Kunjungan Lapangan

Kunjungan lapangan kerap disebut dengan istilah LAKU (Latihan dan Kunjungan) yaitu kegiatan yang dilakukan penyuluh dengan mengunjungi secara langsung area usaha tani dari sasarannya, misalnya di

sawah, kebun, lahan percontohan, kandang ternak, tambak ikan, dan lain lain. Sama halnya dengan kunjungan rumah, kunjungan lapangan juga memiliki tujuan mempercepat proses inovasi baru terserap pada sasaran.

c. Kunjungan Kantor

Kegiatan ini dilakukan oleh sasaran penyuluhan dengan instansi-instansi tertentu. Misalnya kunjungan kelompok tani ke BPP (Balai Penyuluhan Pertanian) atau ke BP3K (Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan) dengan tujuan untuk melakukan konsultasi terkait suatu program pertanian atau inovasi pertanian yang akan diseminasikan.

d. Surat-Menyurat

Teknik penyuluhan ini kerap dilakukan antara kelompok tani dengan penyelenggara siaran pertanian pedesaan yang di daerahnya masih aktif siaran radio pertaniannya. Teknik ini adalah metode penyuluhan massal dengan harapan sasarannya masyarakat luas untuk memberikan informasi inovasi baru atau untuk anjuran-anjuran lainnya. Misalnya, beberapa waktu lalu pernah ada iklan radio di suatu daerah yang menganjurkan petani untuk menggunakan camping (penutup kepala), kacamata hitam, baju, dan masker pada saat melakukan penyemprotan pestisida atau pemupukan di lahan. Karena saat ini telah ditemukan penyakit yang berasal dari radiasi bahan kimia pada kulit.

e. Telepon

Teknik penyuluhan ini menjadi pilihan utama teknik penyuluhan yang dilakukan pada saat pandemi Covid-19 silam. Karena keadaan yang mengharuskan untuk menggunakannya. Sehingga telepon menjadi satu-satunya komunikasi dengan sasaran penyuluhan setelah adanya pembatasan di segala kegiatan. Hal ini dibuktikan dengan berbagai penelitian yang dihasilkan mengenai

peningkatan penggunaan Internet pada penyuluh di masa pandemic hingga pasca pandemic.

f. Demonstrasi

Demonstrasi adalah teknik penyuluhan yang dilakukan dengan menghadirkan secara langsung inovasi yang akan disebarakan kepada sasaran penyuluhan. Demonstrasi bisa dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya:

- 1) Demonstrasi Cara, adalah teknik penyuluhan dengan menunjukkan cara kerja sebuah inovasi pertanian.
- 2) Demonstrasi Hasil, adalah demonstrasi yang penunjukannya dilakukan ketika inovasi tersebut telah berhasil atau menghasilkan nilai ekonomi yang menguntungkan.
- 3) Demonstrasi Plot (Demplot), adalah demonstrasi yang dilakukan pada lahan usahatani baik perorangan atau dalam skala kecil dengan tujuan untuk memberikan edukasi kepada petani tentang inovasi pertanian yang sedang disuluhkan.
- 4) Demonstrasi Usahatani (Demfarm atau Demfish), adalah demonstrasi yang dilakukan secara berkelompok dalam menerapkan inovasi pertanian yang baru. Tujuannya adalah membangun kerjasama antar anggota kelompok dalam usahatani dengan menerapkan inovasi tersebut.

g. Wisata

- 1) Widyawisata adalah teknik penyuluhan dengan bentuk perjalanan wisata bersama penyuluh dan petani ke suatu daerah tertentu yang berhasil pertaniannya untuk dijadikan contoh dalam mereka.
- 2) Karyawisata sama halnya dengan widyawisata, yaitu perjalanan wisata namun yang menjadi pembeda adalah, petani melakukan kerja praktek di suatu daerah yang sudah lebih maju pertaniannya

dibandingkan daerah asalnya atau biasa disebut magang.

- h. Kursus adalah kegiatan belajar mengajar yang dilakukan dengan tujuan peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap dari sasaran penyuluhan. Selain itu bisa meningkatkan motivasi positif untuk dapat lebih memajukan usaha taninya dengan bekal ilmu dari kursus yang telah dilakukan.
- i. Pameran adalah teknik penyuluhan yang diselenggarakan dalam bentuk peragaan atau percontohan barang produk pertanian yang dihasilkan oleh petani. Biasanya barang yang dipajang ketika ada kegiatan pameran adalah inovasi olahan produk produk pertanian yang memiliki nilai jual tinggi.
- j. Media massa yang berupa radio, TV, media social, surat kabar, film, selebaran, leaflet, poster dan lainnya adalah media yang bisa menyebarkan informasi inovasi baru di bidang pertanian kepada sasaran penyuluhan.
- k. Mimbar Sarasehan adalah ajang untuk pertemuan antara petani, kelompok tani, pejabat pemerintah di bidang pertanian dengan tujuan untuk membahas terkait hal-hal penting teknologi inovasi pertanian baik yang akan disuluhkan maupun yang telah dilakukan sebagai bentuk evaluasi kinerja penyuluhan.

3. Materi Penyuluhan Pertanian

Menurut Purukan *et al.* (2021), penyuluhan adalah jembatan antara peneliti dengan sasaran penyuluhan yaitu petani, sehingga penyuluhan pertanian memiliki peran yang sangat penting dalam penyebaran informasi, inovasi teknologi baru, pendidikan dan pelatihan bagi petani baik tentang cara mengatasi perubahan iklim maupun tentang meningkatkan produksi usaha taninya dengan tujuan untuk memperbaiki kesejahteraan hidupnya. Arti yang sama juga diungkapkan oleh Puspadi (2002) bahwa materi penyuluhan adalah pesan yang hendak disampaikan pada proses komunikasi pembangunan. Materi penyuluhan berisi

- informasi atau teknologi yang disampaikan kepada petani. Materi penyuluhan setidaknya merupakan informasi yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan petani. Menurut Mardikanto (1993), materi penyuluhan terbagi atas:
- a. Materi utama adalah materi yang disampaikan kepada petani sesuai dengan yang dibutuhkan oleh petani.
 - b. Materi penting adalah materi yang disampaikan dapat membantu petani memahami materi utama yang penyuluh sampaikan.
 - c. Materi pendukung adalah materi yang terkait dengan kegiatan usahatani petani dengan tujuan untuk menambah wawasan petani dengan memberi contoh usahatani di negara maju atau daerah yang pertaniannya lebih maju
 - d. Materi tambahan adalah materi yang seringkali tidak berkaitan dengan materi utama, namun disampaikan hanya pada waktu selingan saja agar petani tidak jenuh dengan penyuluhan yang diberikan.

Menurut Gitosaputro & Listiana (2018), ada beberapa persyaratan untuk bisa dikatakan sebuah materi penyuluhan, yaitu berikut :

- a. Menguntungkan secara ekonomis. Materi sebuah penyuluhan dapat diukur dengan analisis kelayakan usaha melalui perhitungan *Benefit Cost Ratio* atau *Revenue Cost ratio*. Jika hasilnya menunjukkan layak untuk diusahakan yang mana hasil perhitungan sudah termasuk unsur variabel biaya dan variabel pendapatan atau penjualan, maka materi tersebut dapat segera diterapkan oleh petani.
- b. Mudah diterapkan secara teknis oleh petani. Materi yang baik adalah yang mudah diterapkan oleh sasaran. Misalnya penyuluhan mengenai penggunaan Drone untuk penyemprotan pestisida, yang mana harus menjadi pertimbangan adalah kondisi cuaca yang anomali atau berada pada daerah dengan permasalahan angin kencang dengan frekuensi sering.

- c. Dapat dipertanggungjawabkan secara sosial. Artinya adalah materi penyuluhan tidak bertentangan dengan nilai sosial yang ada di daerah tersebut. Misalnya penyuluhan untuk memanfaatkan potensi daerah yang bisa menghasilkan nilai ekonomis. Di beberapa daerah, air nira selain digunakan untuk gula kelapa, juga digunakan untuk minuman keras khas daerah. Yang mana kita ketahui bahwa Indonesia mayoritas beragama Islam dan minuman keras adalah salah satu larangan dalam agama. Oleh karenanya sebelum melakukan kegiatan penyuluhan, penting bagi penyuluh untuk memahami dengan baik keadaan sosial masyarakat yang akan menjadi sasaran dari kegiatan penyuluhan.
- d. Materi juga bisa mempunyai resiko kegagalan. Resiko kegagalan dalam sebuah kegiatan usahatani terbagi atas resiko fisik dan resiko ekonomi. Resiko fisik adalah resiko yang dapat terlihat bentuk fisiknya, misalnya kegagalan panen akibat banjir, serangan hama dan penyakit, kemarau panjang, bencana alam lainnya. Adapun resiko ekonomi adalah resiko yang berasal dari ketidakstabilan harga di pasar yang biasa dipengaruhi oleh musiman. Misalnya, buah-buahan ketika panen raya maka harganya akan sangat anjlok.
- e. Sederhana. Arti dari sederhana adalah Materi harus bisa disesuaikan dengan tingkat pengetahuan dari petani. Karena percuma saja meskipun dengan teknologi yang tinggi namun tidak bisa digunakan oleh masyarakat. Misalnya, penggunaan alat pemanen padi mudah saja digunakan pada petani yang telah lama mengetahuinya, namun pada masyarakat di pedalaman, hal tersebut adalah hal yang baru.
- f. Materi dapat dijangkau oleh petani. Artinya adalah materi yang disampaikan mudah dicari dan didapatkan oleh petani baik fisik, maupun finansial.
- g. Materi harus segera diterapkan diharapkan dapat segera memberi manfaat. Contohnya adalah pada tanaman

semusim, benih unggul mudah untuk didapat dan diterapkan pada usaha taninya sehingga secara fisik bisa terlihat. Namun sebaliknya pada tanaman tahunan atau perkebunan, teknologi berupa bibit unggul akan sangat sulit terlihat karena membutuhkan banyak tahapan dengan waktu yang lama untuk dapat terlihat tumbuh dan menghasilkan manfaat bagi petani.

- h. Materi penyuluhan untuk menerapkannya tidak memerlukan biaya yang tinggi. Hal ini terkadang yang menjadi sumber penyebab petani enggan untuk membudidayakan tanaman dengan biaya input yang tinggi terlebih dengan perawatan yang ekstra.
- i. Materi mudah untuk disebarluaskan. Dalam hal ini peran media sangat berkontribusi atas penyebarluasan informasi terkait inovasi-inovasi penyuluhan pertanian. Materi penyuluhan yang bisa diterapkan dengan mudah di masyarakat akan mempunyai peluang lebih besar untuk tersebar luas dengan harapan untuk berhasil pada usahatani yang digelutinya.
- j. Materi penyuluhan harus memiliki daya atau dapat memberi motivasi kepada petani agar tertarik untuk mencoba di usahatannya. Motivasi tersebut sesuai dengan peran penyuluh salah satunya adalah sebagai motivator, yang mana senantiasa memberikan penguatan kepada petani agar petani dapat lebih berhasil dalam usahatannya.

Masih menurut Gitosaputro & Listiana (2018), materi penyuluhan dapat dikelompokkan berasal dari :

- a. Sumber resmi yang berasal dari lembaga pemerintah yaitu Kementerian Pertanian atau dinas pertanian terkait, lembaga penelitian dan pengembangan yang selalu bekerjasama dengan perguruan tinggi, pusat-pusat pengkajian, pusat informasi, pengujian local yang dilakukan oleh penyuluh.
- b. Sumber resmi yang berasal dari lembaga swasta atau lembaga swadaya masyarakat yang mengkhususkan diri

berkecimpung di bidang penelitian, pengkajian serta penyebaran informasi

- c. Pengalaman yang berasal dari petani dari usahatani sendiri. Materi penyuluhan bisa berasal dari pengalaman petani dan tingkat keakuratannya termasuk yang tinggi karena sudah dilakukan oleh petani tersebut.
- d. Sumber lain, misalnya dari informasi pasar yang berasal dari pedagang, lembaga perguruan tinggi dan stakeholder lainnya.

Melihat pentingnya materi penyuluhan, Mardikanto (1993) membagi dua penggolongan materi menjadi:

- a. Materi Penting, yaitu materi yang dibawakan pada kegiatan penyuluhan diberikan sekitar 30% dari keseluruhan materi yang akan disampaikan. Lebih spesifiknya lagi, arti dari materi penting adalah materi yang memuat tentang dasar-dasar pemahaman dan pengetahuan berkaitan dengan permasalahan dan kebutuhan dari petani
- b. Materi Penunjang, adalah materi yang masih berhubungan dengan permasalahan dan kebutuhan petani yang sudah seharusnya petani ketahui untuk memperluas wawasan pengetahuan baik mengenai usahatannya maupun mengenai permasalahan yang dialaminya, dan untuk presentasi materi ini maksimal diberikan sebanyak 20% dari seluruh materi penyuluhan yang dibawakan pada kegiatan tersebut.

4. Media Penyuluhan Pertanian

Media penyuluhan sesuai dengan sebutannya maka fungsinya adalah sebagai alat untuk menyampaikan isi pesan, informasi, materi penyuluhan kepada sasaran penyuluhan (Puspadi, 2002). Media penyuluhan terbagi atas 2 yaitu media yang hidup dan media yang tidak hidup. Arti dari media hidup adalah pengantar pesannya bisa berupa kelompok tani, kontak tani, penyuluh dan stakeholder lainnya dengan tujuan bahwa mereka dipercaya untuk bisa menyalurkan informasi kembali kepada petani atau

masyarakat lain yang belum mengetahuinya. Sedangkan media tidak hidup adalah media yang berupa alat atau benda yang digunakan sebagai penyampai pesan penyuluhan kepada sasaran penyuluhan. Misalnya, televisi, radio, internet, media massa, media social, dan masih banyak lagi yang lainnya. Saat ini jangkauan media sudah sangat luas hingga sampai ke pelosok. Maka tidak heran, saat ini petani bisa memilih dan memilah sendiri informasi-informasi yang mendukung kegiatan usahataniannya. Berdasarkan penggolongannya menurut Gitosaputro & Listiana (2018), maka media bisa dibagi atas 3 golongan utama, yaitu:

a. Media Grafis

Media grafis adalah media yang berbentuk foto, gambar, tulisan, lukisan yang bisa dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi tentang inovasi-inovasi pertanian. Jika hanya dapat dilihat secara visual saja, maka namanya tetap media grafis. Namun jika sudah dilengkapi dengan suara dan video bergerak maka disebut multimedia. Pada media grafis yang menjadi perhatian adalah bagaimana menyampaikan isi pesan kepada sasaran berdasarkan penampilan huruf, lambang, merek, foto, atau simbol lain yang menampilkan pesan tertentu. Menurut Sadiman (1996), media grafis adalah media visual yang bisa menghasilkan pemahaman akan sebuah informasi secara verbal. Yang artinya bisa dipahami oleh sasaran penyuluhan dengan melihat bentuknya. Secara umum media grafis berbentuk : foto, lukisan, table, grafik, diagram, peta, kartun, gambar. Adapun penyajiannya bisa dalam bentuk flipchart, OHT (Overhead Transparency) yang saat ini sudah sangat jarang dilakukan, poster, dan leaflet.

b. Media Foto

Media menggunakan foto tergolong umum dilakukan pada kegiatan penyuluhan, karena foto bisa menggambarkan banyak hal yang pasti, dengan kualitas gambar yang baik maka percepatan penyebaran informasi

mengenai inovasi-inovasi cenderung mudah dilakukan. Kelebihan dari media foto diantaranya mudah untuk diproduksi baik menggunakan kamera digital ataupun Handphone yang dewasa ini semakin memiliki kualitas yang baik. Penyuluhan menggunakan media foto bisa ditampilkan dalam bentuk foto atau bisa disatukan menjadi film.

c. Media Audio

Media audio mengandalkan pendengaran pada penyampaianannya. Dan memiliki tingkatan yang lebih daripada media foto dan visual, namun tetap tidak bisa mengungguli media audiovisual. Materi atau isi pesan penyuluhan yang disampaikan pada media audio biasa disampaikan dalam bentuk kaset, piringan hitam, cd, file digital, radio, telepon dan masih akan berkembang terus seiring perkembangan teknologi yang semakin tinggi. Meskipun begitu, penggemar media audio misalnya radio adalah mereka yang memiliki daya imajinasi yang tinggi dan tetap hingga saat ini khalayak sasaran radio tetap banyak. Fenomena ini bisa jadi karena media audio memiliki karakteristik, yaitu mudah dinikmati dimana saja, dapat ditampilkan tanpa menghalangi aktivitas lainnya, isi pesannya bisa untuk individu atau kelompok dan tentu saja teknologi yang digunakan radio untuk menghasilkan sebuah siaran tidak semahal media audiovisual.

d. Media Audio-Visual

Media audio visual adalah tingkatan yang paling lengkap disbanding media foto, visual dan audio. Karena telah menggabungkan keseluruhan media untuk bisa menghasilkan sebuah informasi secara kompleks. Bentuk dari media audiovisual ini adalah film, video, televise, media social, dan masih akan berkembang pesat di teknologi 5.0 dewasa ini. Penggabungan keseluruhan media ini juga dipengaruhi perkembangan teknologi yang

saat ini sudah sangat memudahkan untuk diproses menjadi sebuah informasi atau pesan. Dalam kegiatan penyuluhan, yang sering digunakan oleh penyuluh adalah video untuk memberikan informasi secara lengkap kepada petani mengenai inovasi-inovasi teknologi pertanian yang bisa diterapkan pada usahatani. Dengan kemudahan teknologi yang mengikuti kita saat ini, untuk menghasilkan sebuah video penyuluhan sangatlah mudah, karena hanya dengan menggunakan HP milik sendiri kita sudah bisa memberikan penyuluhan dengan kualitas suara dan gambar yang baik. Jika diingat, 5 tahun ke belakang kita harus menggunakan kamera digital yang harganya terlampaui tinggi, dan untuk menghasilkan sebuah video juga membutuhkan keterampilan khusus dengan proses editing. Namun, saat ini hal tersebut sudah sangat sangat terbantu oleh teknologi yang ada di tangan kita sendiri. Kemudian, kemandirian petani untuk bisa mencari informasi sendiri dengan mengakses media sosial yang berisi konten pertanian juga yang membuat penyuluh pertanian dewasa ini harus akrab dengan penggunaan gadget.

Anang *et al.*, (2019), mengatakan bahwa tujuan dari penggunaan media adalah untuk membuat informasi menjadi lebih jelas sehingga diharapkan dapat memberikan stimulus pikiran, atensi dan keinginan di sasaran penyuluhan untuk mengaplikasikan inovasi yang disuluhkan oleh penyuluh. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan media memiliki peran yang penting untuk mendistribusikan inovasi baru di bidang pertanian dan bisa digunakan sesuai dengan apa yang petani butuhkan pada usahatani dengan harapan informasi yang disampaikan penyuluh kepada sasaran penyuluhan bisa menghasilkan sebuah impact yang positif.

Keberhasilan kegiatan penyuluhan pertanian dipengaruhi oleh pemilihan media penyuluhan yang tepat. Di era gempuran teknologi saat ini, media yang kerap

menjadi pilihan dari penyuluh adalah media audiovisual, karena media ini meningkatkan banyak stimulus-stimulus dalam diri petani (Pasaribu *et al.*, 2018). Beberapa studi yang dilakukan mengenai penggunaan media elektronik bahwa masyarakat petani di Indonesia telah terbiasa menggunakan internet untuk menerima dan mencari informasi selain dari media cetak dan media personal (Anthy, 2002; Sopiana, 2002; Ellyta, 2017). Dari media penyuluhan elektronik yang sering digunakan oleh petani adalah video-video inovasi pertanian, yang mana menurut Tubbs, L. Stewart dan Sylvia (1996), media audio visual tersebut memiliki banyak keunggulan jika dibandingkan dengan media komunikasi massa lainnya.

Penggunaan media penyuluhan menurut (Leilani *et al.*, 2015) seharusnya bisa memberi manfaat, seperti memudahkan sasaran penyuluhan dalam menerima informasi atau pesan, jangkauan penerimaan pesan yang luas tidak hanya pada satu kelompok saja, penggunaan alat informasi yang tepat sehingga dapat memberikan gambaran inovasi yang diserahkan lebih nyata, memenuhi kriteria unsur komunikasi (gerak, tulisan, gambar, audio, video), memberikan kesempatan kepada petani untuk belajar seperti pada lingkungan kerjanya, bisa menghasilkan stimulus di banyak indera yang dapat digunakan untuk bisa belajar dan latihan.

5. Alat Bantu dalam Penyuluhan Pertanian

Alat bantu penyuluhan sangat dibutuhkan dalam kegiatan penyuluhan. Hal ini berhubungan dengan tingkat adopsi dari petani yang cenderung tertarik dan memiliki minat jika melihat ada contoh atau bukti inovasi yang akan disuluhkan. Karena yang harus menjadi perhatian dari penyuluh adalah keragaman latar belakang tingkat pendidikan dari petani sehingga tidak semua petani mampu memahami informasi tanpa melihat gambar, metode, tiruan produk dan alat bantu yang lainnya di lapangan. Di bawah ini berikut alat bantu yang digunakan penyuluh dalam melakukan kegiatan penyuluhan pertanian.

Mardikanto (2009) menjabarkan dengan lengkap ragam alat bantu yang digunakan dalam kegiatan penyuluhan yaitu:

a. Kurikulum

Kurikulum adalah sebuah pernyataan tertulis mengenai rencana pendidikan atau terkait materi-materi yang akan disampaikan yang memungkinkan perencanaan tersebut terkait :

- 1) Tujuan yang ingin dicapai. Kurikulum memuat tujuan apa yang ingin dicapai dari kegiatan penyuluhan. Karena dengan mengingat latar belakang sasaran penyuluhan yang sangat beragam, maka penyuluh tidak bisa memaksakan kegiatan tersebut sampai pada tahap terampil misalnya. Jadi, karena penyuluh yang memahami dengan sangat baik karakteristik sasarannya, maka penyuluh yang menetapkan tujuan dari kegiatan penyuluhan yang akan dilakukannya.
- 2) Kegiatan yang dilakukan. Pada kurikulum penyuluhan, penyuluh dan sasaran menetapkan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dengan menggunakan metode atau teknik penyuluhan berdasarkan kesepakatan bersama. Hal ini dilakukan agar kegiatan penyuluhan tetap on track tidak melenceng ke arah kampanye politik misalnya.
- 3) Daftar mata pelajaran. Hal ini menjadi sangat penting untuk dapat mengorganisir kegiatan penyuluhan dengan baik dan benar saat di lapangan. Daftar ini dibuat secara sistematis dan berurutan misalnya pada budidaya berarti dimulai dari pengolahan tanah, pembibitan hingga pasca panen.
- 4) Rencana evaluasi. Pada kegiatan penyuluhan, rencana evaluasi adalah hal yang sangat penting untuk dipersiapkan sebelumnya. Karena terkait dengan penilaian keberhasilan melakukan sebuah penyuluhan. Hal-hal yang berkaitan dengan rencana evaluasi ini adalah menyepakati waktu untuk

melakukan evaluasi. Evaluasi terdiri dari pra test dan post test. Hal ini menjadi perlu untuk dilakukan karena mudah untuk melihat peningkatan pengetahuan, sikap dan keterampilan dari sasaran penyuluhan apakah hasilnya meningkat, tetap atau bahkan menurun. Dari hasil evaluasi yang diperoleh bisa menggambarkan keberhasilan penyuluh melakukan penyuluhan. Yang kemudian bisa digunakan untuk penyuluh mengintropeksi apa yang kurang dari sistematis penyuluhan yang sudah dilakukannya. Karena sebagai seorang pendidik, penyuluh diharapkan bisa senantiasa belajar dan mengembangkan diri agar mempunyai kredibilitas di hadapan para sasaran penjelasannya. Pada kesimpulannya dikatakan bahwa evaluasi dijadikan informasi untuk perbaikan desain, implementasi, dampak sebab akibat, dan dapat digunakan penyuluh dalam mempertimbangkan sebuah keputusan, baik terkait metode, materi, media, dan sarana pembelajaran (Syafiuddin, 2008).

b. Lembar persiapan penyuluhan

Lembar persiapan penyuluhan diperlukan ketika penyuluh akan melakukan kegiatan di lapangan. Lembar persiapan ini terbagi atas :

- 1) Lembar Persiapan Menyuluh (LPM) yang memuat tentang sistematika pokok bahasan yang akan di sampaikan pada saat kegiatan penyuluhan dengan memperhatikan aspek peningkatan pengetahuan dan sikap dari sasaran penyuluhan.
- 2) Lembar Persiapan Latihan (LPL) sama halnya lembar persiapan menyuluh dengan memuat pokok-pokok bahasan yang lebih ke arah latihan. Jadi yang menjadi fokusnya adalah pada peningkatan aspek pengetahuan dan keterampilan sasaran penyuluhan.
- 3) Lembar Persiapan Kerja (LPK) adalah lembar persiapan yang memfokuskan pada kegiatan

penggunaan peralatan atau pada latihan keterampilan sasaran penyuluhan dengan melakukan praktek langsung baik di lapangan maupun dalam ruangan.

c. Papan tulis atau papan penempel

Dalam kegiatan penyuluhan, alat tulis adalah hal yang penting dan disesuaikan dengan kondisi saat melakukannya apakah dalam ruangan atau di luar ruangan. Jika di dalam ruangan, maka sudah pasti penggunaan papan tulis, spidol, atau kapur, penghapus, pulpen dan kertas sudah pasti tersedia. Namun, jika penyuluhan dilakukan di luar, makna dikondisikan sesuai dengan keadaan. Apakah menggunakan papan tulis yang berasal dari kertas karton yang ditempel di pohon atau di saung.

d. Alat tulis

Alat tulis yang digunakan pada saat penyuluhan bisa berupa pensil, pulpen, spidol, crayon, cat air dan alat tulis lainnya yang mendukung dan tidak menyusahkan kedua belah pihak. Selain untuk mempermudah proses penyampaian informasi, penggunaan warna baik spidol warna atau kertas berwarna juga menarik hati yang menyaksikannya.

e. Sarana Ruangan

Pada waktu kegiatan penyuluhan, penting untuk mempersiapkan sarana ruangan yang akan dipakai pada saat penyuluhan. Hal ini berkaitan dengan kenyamanan sasaran penyuluhan. Adapun alat bantu dalam sarana ruangan adalah berikut ini.

- 1) Pengeras suara digunakan jika sasaran penyuluhan banyak. Hal lain yang harus menjadi perhatian adalah jumlah pengeras suara sebaiknya lebih dari satu agar memudahkan untuk terjadi interaksi antara penyuluh dengan sasaran penyuluhan.
- 2) Penataan cahaya. Jika ingin menampilkan video dari proyektor maka penataan cahaya adalah harus dalam

ruangan dengan kain gordien yang gelap agar bisa terlihat jelas. Maka penting untuk mengatur cahaya dalam ruangan.

- 3) Penataan udara. Penyuluhan dalam ruangan cenderung lebih memerlukan sarana dan prasarana yang lengkap, salah satunya adalah udara. Sarana yang digunakan adalah kipas angin dan AC. Karena dengan kelembaban yang tinggi tanpa ada sirkulasi yang baik, maka akan mengurangi konsentrasi untuk mengikuti kegiatan penyuluhan.

f. Projector

Selain sarana-sarana di atas, terkadang dalam ruangan masih menggunakan projector dengan berbagai tujuan penayangannya. Berikut.

- 1) Overhead Projector adalah sarana penyuluhan dalam bentuk tulisan atau gambar yang digunakan pada media berbentuk kertas plastik transparan dengan dominan warna yang dihasilkan adalah krem atau kuning.
- 2) Solid projector digunakan untuk memproyeksikan benda yang tembus pandang. Tujuannya adalah untuk mengamati secara lugas isi dari benda tersebut. Jika dalam kegiatan penyuluhan biasa digunakan ketika menyuluhkan tentang struktur yang ada di dalam biji atau benih tanaman.
- 3) Movie projector digunakan untuk pemutaran film. Tujuan dari menggunakan movie ini adalah agar sasaran penyuluhan lebih tergugah untuk mengaplikasikan inovasi-inovasi yang disuluhkan.
- 4) Slide Projector digunakan untuk memproyeksi tulisan atau gambar yang dirangkum menjadi sebuah slide.

C. Daftar Pustaka

Achmad, F., Dukat, & Susanti, R. (2015). Efektivitas Metode dan Teknik Penyuluhan Pertanian dalam Penerapan Teknologi Budidaya Padi Sawah (*Oryza Sativa L.*) Sistem

- Tanam Jajar Legowo 4:1 (Studi Kasus di Kelompok Tani Silih Asih Desa Ciomas Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan). *Jurnal Agrijati*, 28(1), 45–67. <https://jurnal.ugj.ac.id/index.php/agrijati/article/download/172/121>
- Anang, R. H., Afriyatna, S., & Astutik, T. (2019). Studi Media yang Efektif dalam Penyampaian Materi Penyuluhan Pertanian di Kabupaten Banyuasin. *J. Societa*, 8(1), 1–9.
- Anthy, K. (2002). Hubungan antara Jaringan Komunikasi dengan Sikap Petani terhadap SUTPA/Sistem Usaha Tani Berbasis Padi Berorientasi Agribisnis (Kasus 2 Kelompok Tani pada Sebuah Desa di Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat). IPB University.
- Chambers. (1993). *Challenging the Professions: Frontiers for Rural Development*. Intermediate Technology Publications.
- Ellyta. (2017). Jaringan Komunikasi Petani Dalam Pemasaran Lidah Buaya Di Kalimantan Barat. 42(5), 30–39.
- Gitosaputro, S., & Listiana, I. (2018). Dinamika Penyuluhan Pertanian: dari Era Kolonial sampai dengan Era Digital. In CV. Anugrah Utama Raharja.
- Harinta, Y. W. (2011). Adopsi Inovasi Pertanian di Kalangan Petani di Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo. *Agrin*, 15(2), 164–174. <https://jurnalagrin.net/index.php/agrin/article/download/192/177>
- Imran, A. N., Muhanniah, M., & Widiati Giono, B. R. (2019). Metode Penyuluhan Pertanian Dalam Meningkatkan Pengetahuan Dan Keterampilan Petani (Studi Kasus Di Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros). *Jurnal AGRISEP: Kajian Masalah Sosial Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis*, 18(2), 289–304. <https://doi.org/10.31186/jagrisep.18.2.289-304>

- Kusnadi, D. (2011). *Metode Penyuluhan Pertanian*. . Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian.
- Leilani, A., Nurmalia, N., & Patekkai, M. (2015). Efektivitas Penggunaan Media Penyuluhan (Kasus pada Kelompok Ranca Kembang Desa Luhur Jaya Kecamatan Cipanas Kabupaten Lebak Provinsi Banten) Effectiveness Use Of Extension Media (case study of ranca kembang group in luhur jaya village-cipanas, lebak-bant. *Jurnal Penyuluhan Kelautan Dan Perikanan Indonesia*, 9(1), 11.
- Mardikanto, T. (1993). *Penyuluhan Pembangunan Pertanian (1st ed.)*. Sebelas Maret University Press.
- Mardikanto, T. (2009). *Sistem Penyuluhan Pertanian*. Sebelas Maret University Press.
- Oka, I. . (1995). *Pengendalian Hama Terpadu dan Implementasinya di Indonesia*. Gadjah mada University Press.
- Pasaribu, L., Prangin-angin, M. I., Mariana, M., & Sianturi, A. (2018). Pengaruh Media Audiovisual Terhadap Keberhasilan Kegiatan Penyuluhan Pertanian di Desa Tanjung Merahe Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara. *Agrica Ekstensia*, 12(1), 37-44.
- Purukan, B. N., Nayoan, H., & Pangemanan, F. N. (2021). Kinerja Penyuluh Pertanian Dalam Meningkatkan Swasembada Pangan di Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan. *J.Governance*, 1(2), 1-8.
- Puspadi, K. (2002). *Rekonstruksi Sistem Penyuluhan Pertanian*. Sekolah Pasca Sarjana IPB.
- Rusli, S. (1989). Perkembangan Penduduk dan Masalah Swasembada Pangan di Indonesia. *Jurnal Mimbar Sosek*,. *Jurnal Mimbar Sosek*, 3. Diakses pada 30 Agustus 2023
- Sadiman, A. S. (1996). *Media Pendidikan: Pengertian, Pengembangan, dan Pemanfaatannya*. PT Raja Grafindo Persada.

- Sadono, D. (2008). Pemberdayaan Petani: Paradigma Baru Penyuluhan Pertanian di Indonesia. *Jurnal Penyuluhan*, 4(1). <https://doi.org/10.25015/penyuluhan.v4i1.2170>. Diakses pada 30 Agustus 2023
- Slamet, M. (2001). *Paradigma Baru Penyuluhan Pertanian di Era Otonomi Daerah*. IPB Press.
- Sopiana. (2002). *Hubungan Karakteristik Petani dan Jaringan Komunikasi dengan Perilaku Usahatani Tebu*. IPB University.
- Syafiuddin. (2008). *Hubungan Karakteristik Dengan Kompetensi Pembudidaya Rumput Laut (Euchema spp.) Di Tiga Kabupaten Di Provinsi Sulawesi Selatan [IPB University]*. <https://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/40900>. Diakses pada 31 Agustus 2023.
- Tubbs, L. Stewart dan Sylvia, M. (1996). *Human Communication: Prinsip-Prinsip Dasar*. Remaja Rosdakarya.

BAB

7

DINAMIKA KELOMPOK

Muharama Yora, S.P., M.Si.

A. Pendahuluan

Pembangunan yang banyak dikembangkan oleh sebagian besar negara-negara lebih menitikberatkan terhadap perkembangan pembangunan sektor pertanian. Dalam keberlangsungan suatu negara pembangunan di sektor pertanian memerlukan perhatian khusus, sehingga dapat meningkatkan angka kesejahteraan masyarakat penduduk negara. Hal ini mengingat bahwa pertanian merupakan poin utama yang berperan dalam memenuhi kebutuhan pangan suatu negara. Di Indonesia, terutama pada sektor pertanian telah memberikan kontribusi yang cukup besar, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat dan kestabilan perekonomian negara. Dalam upaya pengembangan sektor pertanian, secara tidak langsung akan selalu berkaitan dengan adanya keberadaan dan kinerja suatu kelompok tani yang saling bersinergi dalam mengembangkan berbagai inovasi budidaya tanaman, sehingga dapat meningkatkan produksi suatu tanaman.

Keberadaan suatu kelompok tani memiliki pengaruh yang besar sehingga terjadinya peningkatan kredibilitas suatu usaha tani. Selain itu, kelompok tani merupakan wadah untuk menggali potensi diri dalam menambah wawasan antar anggota kelompok, sehingga usaha tani yang dijalankan menjadi lebih

baik. Selanjutnya (Lestari, 2015) menjelaskan bahwa untuk mencapai suatu tujuan kelompok, maka perlu adanya keselarasan antara tujuan kelompok tani dengan tujuan individu yang bertindak sebagai anggota kelompok.

B. Kelompok Tani

Kelompok tani merupakan suatu lembaga yang mengkoordinasikan dan mengatur petani dalam upaya meningkatkan hasil usaha tani. Menurut Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 82 Tahun 2013 menerangkan bahwa gabungan beberapa petani/peternak/pekebun yang kelompok tani adalah gabungan beberapa yang terbentuk karena adanya kesamaan visi dan misi dalam pencapaian peningkatan usaha tani disebut sebagai kelompok tani. (Kelbulan, Tambas and Parajouw, 2018). Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kelompok tani adalah suatu organisasi yang terdiri dari gabungan beberapa individu yang bertujuan untuk mempromosikan inovasi berbagai teknologi dan mampu menjembatani anggota kelompok tani sehingga memperoleh layanan bantuan peningkatan produksi usahatannya.

Dalam pembentukan suatu kelompok agar tujuan bersama dapat tercapai, maka terdapat tiga fungsi kelompok tani diantaranya sebagai kelas belajar, wahana kerjasama dan unit produksi. Melihat dari ketiga fungsi kelompok tani tersebut (Kurnianto, 2022) menerangkan bahwa ketiga fungsi ini saling berkesinambungan dan berkaitan sehingga memberikan pengaruh dan kontribusi bagi petani yang tergabung dalam suatu kelompok, antara lain:

1. Kelompok tani sebagai media belajar. Keberadaan kelompok tani dapat menjadi wadah untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan petani sehingga petani menjadi lebih berkembang dari berbagai aspek ilmu yang menunjang untuk usaha tani.
2. Kelompok sebagai unit kerjasama. Kelompok tani ini bertindak sebagai media atau wadah untuk meningkatkan kerjasama antara petani dengan mitra-mitra yang benefit

terutama dalam pengembangan usaha tani. Salah satu contohnya adanya kerjasama antara petani dengan lembaga pengelola budidaya tanaman untuk peminjaman alat traktor untuk pengolahan lahan. Keberadaan kelompok tani juga memberikan kemudahan dalam ketersediaan modal pengembangan usaha tani, melalui koperasi.

3. Sebagai media kerjasama produksi, diharapkan keberadaan kelompok tani mampu menghasilkan jumlah produksi sesuai dengan permintaan dalam kelompok.

Keikutsertaan petani dalam suatu kelompok juga membutuhkan keefektifan dan kedinamisan kelompok. Kedinamisan suatu kelompok dapat tercapai jika adanya faktor-faktor yang saling berpengaruh dan menguntungkan. Faktor-faktor ini akan berpengaruh langsung terhadap dinamika kelompok (Tapi, 2016).

C. Dinamika Kelompok

1. Definisi Dinamika Kelompok

(Kelbulan, Tambas and Parajouw, 2018) menerangkan bahwa terdapat dua definisi kelompok menurut para ahli:

- a. Pera (2001) mengatakan bahwa proses peningkatan nilai kerjasama kelompok merupakan suatu dinamika kelompok.
- b. Santosa (2004) mengartikan kelompok terorganisir yang memiliki beberapa individu dengan adanya ikatan psikologis yang jelas antara satu anggota dengan anggota lainnya yang terjadi dalam situasi yang sama.

2. Sejarah Dinamika Kelompok

Dinamika kelompok ini berkembang seiring dengan perkembangan zaman. (Trimawartinah, 2020), menerangkan terdapat beberapa sejarah perkembangan dinamika kelompok diantaranya:

- a. Era Yunani

Pada era ini muncul istilah “ajaran Plato” yang menerangkan tentang kekuatan individu yang tergambar pada struktur sosial yang memiliki karakteristik berbeda-

beda. Ikatan solidaritas dan interaksi sosial ini akan terjalin erat, karena setiap anggota kelompok menjaga kesatuannya dan tidak terpecah belah menjadi kelompok-kelompok minimalis.

b. Era Liberalisme

Munculnya metode berpikir yang independen untuk mengarahkan masyarakat agar dapat membuat keputusan sendiri. Kebebasan ini merugikan sebagian anggota karena timbulnya kecenderungan tidak memiliki arah yang jelas dalam suatu kelompok. Ide yang muncul adalah mendirikan Leviathan (Negara) dengan misi mengamankan kehidupan suatu kelompok.

c. Era Ilmu Jiwa-jiwa Bangsa

Besarnya efek langsung dari adat istiadat dan bahasa, akan menciptakan keseragaman pada penduduk tersebut. Homogenitas ini bertujuan agar sikap dan perilaku masyarakat tidak berbeda-beda atau memiliki prinsip yang sama. Keberadaan teori ini menjelaskan bahwa suatu masyarakat yang mempunyai ciri-ciri psikologis yang sama akan menjadi suatu bangsa yang mempunyai kepribadian tersendiri.

d. Era Gerakan Bangsa

Bentuk pemerintahan yang otokratis dengan segala bentuk ketegasan yang menimbulkan gejolak dalam masyarakat untuk memerdekakan diri dan membangun rezim yang dikehendaknya.

e. Era Psikologi Sosial

Pada awal abad ke-20, diketahui bahwa adanya istilah situasi sosial yang menerangkan bahwa suatu situasi dimana mengakibatkan berkumpulnya sejumlah individu pada waktu tertentu.

f. Era Dinamika Kelompok

Munculnya *force-field theory*, yang menjelaskan bahwa kelompok berperan sebagai suatu koherensi yang

kompleks dan dibangun oleh kumpulan beberapa individu. Hal ini menjelaskan bahwa kemajuan suatu dinamika kelompok bermula dari perubahan psikologi umum dan psikologi sosial. Saleh (2021) menambahkan bahwa dinamika kelompok sebagai suatu ilmu merupakan salah satu bagian ilmu sosial yang membahas ikatan antara pengaruh individu terhadap kelompok dan sebaliknya pengaruh kelompok terhadap individu. Selain itu, dari sudut pandang ilmu sosial, dinamika kelompok akan membahas dan menerangkan tentang kekuatan-kekuatan yang bertindak dalam kelompok, faktor penyebab kekuatan tersebut dan memiliki dampak langsung pada individu dalam suatu kelompok (Saleh, 2021).

3. Status Perkembangan Dinamika Kelompok

Pertumbuhan dan perkembangan dinamika kelompok dapat ditinjau melalui kajian beberapa ilmuwan yang berasal dari berbagai cabang ilmu. Dewawika (2011) dalam (Hadi, 2017) menjelaskan beberapa pandangan ilmuwan tentang perkembangan dinamika kelompok dari berbagai cabang ilmu:

a. Cabang Sosiologi

Ilmuwan Sosiolog (Homans, Moreno, dan Mitschell) berasumsi bahwa permasalahan kelompok dan struktur kelompok merupakan bagian utama dalam dinamika kelompok yang berperan sebagai bagian dari materi yang menjadi pokok bahasan sosiologi. Moreno menerangkan bahwa antar anggota memerlukan jarak sosial dalam suatu kelompok.

b. Cabang Psikologi

Robert F. Bales mengelompokkan dinamika kelompok bagian dari kelompok ilmu psikologi. Hal ini disebabkan karena dinamika kelompok lebih memfokuskan pada problema kelompok itu sendiri akan tetapi juga berkaitan dengan permasalahan psikologis

individu dalam kelompok yang berdampak terhadap kelompok.

c. Cabang Psikologi Sosial

Ilmuwan Psikolog sosial (Otto Klineberg) menjelaskan bahwa psikologi sosial sangat berperan dalam suatu dinamika kelompok. Hal ini terjadi karena dalam suatu dinamika kelompok lebih memperlihatkan pengaruh interaksi sosial individu dalam kelompok terhadap setiap individu sebagai anggota kelompok. Artinya dinamika kelompok bertujuan untuk menelaah interaksi antar anggota dalam suatu kelompok.

d. Bidang Eksperimen

Dalam buku *Group Dynamics* yang diedit oleh Cartwright dan Zender dikatakan bahwa dinamika kelompok pada hakikatnya merupakan suatu eksperimen, meskipun sifatnya cenderung mengarah pada permasalahan psikologis.

4. Tujuan Dinamika Kelompok

Saleh (2021), menerangkan bahwa ada 4 tujuan dari dinamika kelompok:

- a. Adanya peningkatan proses interaksi antar anggota kelompok yang mengakibatkan terbentuknya hubungan psikologis yang baik antar setiap anggota kelompok. Beberapa contohnya munculnya hubungan psikologis yaitu munculnya rasa solidaritas yang tinggi dalam kelompok, munculnya rasa persaudaraan sehingga adanya rasa saling membutuhkan antar anggota serta menambah rasa kekeluargaan
- b. Meningkatkan nilai produktivitas melalui peningkatan wawasan, sikap dan kreativitas antar anggota dalam kelompok;
- c. Mengarahkan kelompok sehingga menjadi kelompok yang lebih benefit, maju dan saling bersinergi; dan
- d. Menyejahterakan kehidupan anggota dalam kelompok.

5. Faktor Internal dan Eksternal Yang Mempengaruhi Dinamika Kelompok

(Hariadi, 2011) dalam (Suryani *et al.*, 2022) menerangkan beberapa faktor internal dan eksternal yang berdampak terhadap dinamika kelompok diantaranya: (1) Faktor internal yang berpengaruh terhadap dinamika kelompok, yaitu motivasi kerja, rasa percaya diri, kekompakan dan sikap kelompok, norma kelompok dan gaya kepemimpinan kelompok anggotanya, dan (2) faktor eksternal yang dapat berdampak terhadap dinamika kelompok yaitu penyuluhan dan pelatihan yang diberikan oleh lembaga penyuluhan, pengelola desa dan dinas pertanian.

6. Unsur-Unsur Dinamika Kelompok



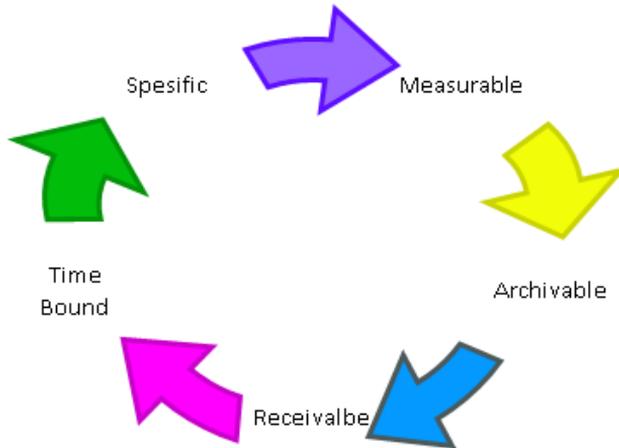
Gambar 4 Unsur Penting dalam Dinamika Kelompok

Thomas (2005) dalam (Kelbulan, Tambas and Parajouw, 2018). mengemukakan bahwa terdapat sembilan unsur-unsur yang perlu diperhatikan dalam dinamika kelompok yang terdiri dari:

a. Tujuan kelompok

Tujuan kelompok adalah pelaksanaan hasil yang diinginkan dapat tercapai oleh anggota kelompok. Dalam mencapai tujuan ini memerlukan kolaborasi dalam suatu

kelompok dan berbagai upaya yang berbeda dari anggota tim. Penetapan tujuan kelompok sangat penting dalam suatu kelompok sehingga dapat melakukan berbagai kegiatan yang bermanfaat dan diselaraskan dengan kebutuhan kelompok.



Gambar 5 Prinsip Perumusan Tujuan Kelompok

Hal ini akan menjadikan tujuan kelompok semakin kuat sebagai unsur dinamis dengan adanya aktivitas kelompok. Sebaliknya jika penetapan tujuan tidak jelas maka akan melemahkan kreativitas anggota karena tidak diketahui tingkat ketercapaian suatu kegiatan kelompok. Saleh (2021) menerangkan bahwa dalam perumusan suatu tujuan kelompok diupayakan harus memperhatikan prinsip "SMART".

b. Struktur kelompok

Korelasi yang terjalin antar anggota dalam kelompok, yang memiliki kejelasan tugas yang diselaraskan dengan posisinya masing-masing dan tetap disesuaikan tujuan kelompok serta memberikan tingkat dinamisme yang tinggi pada kelompok tersebut disebut dengan struktur kelompok. Dengan kata lain, struktur kelompok adalah bagian dari bagaimana suatu kelompok mengorganisasikan dirinya untuk mencapai tujuan.

c. Fungsi tugas kelompok

Fungsi tugas adalah segala aktivitas yang harus diselesaikan suatu tim guna tercapainya kesepakatan untuk melaksanakan tujuan kelompok. Ketercapaian fungsi tugas bisa ditelaah melalui dari berbagai fungsi pendukung diantaranya fungsi kepuasan anggota, fungsi penyampaian informasi, fungsi penyalarsan, fungsi inisiatif, fungsi partisipatif, fungsi pengarahan.

d. Pengembangan dan pembinaan kelompok

Pengembangan dan pembinaan ini berorientasi pada penguatan usaha-usaha pada suatu kelompok. Upaya menjamin keberlangsungan suatu kelompok tercermin dari partisipasi anggota dalam tim, ketersediaan fasilitas, kemajuan kegiatan, koordinasi, adanya komunikasi, penciptaan norma, kemampuan menarik anggota baru, dan proses sosialisasi.

e. Kekompakan kelompok

Kohesi kelompok merupakan kesatuan suatu tim yang ditandai dengan adanya ikatan yang erat antar anggota dan turut menggambarkan kekuatan kelompok untuk berhasil menghadapi intervensi dari dalam dan luar kelompok. Tinggi dan rendahnya nilai kohesi suatu kelompok dilihat dari semangat dan kemampuan individu dalam memotivasi suatu kelompok dalam mencapai tujuannya.

Kekompakan suatu kelompok akan dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya:

- 1) Kepemimpinan Kelompok;
- 2) Keanggotaan Kelompok;
- 3) Nilai Tujuan Kelompok;
- 4) Keseragaman Anggota Kelompok;
- 5) Keterpaduan Kegiatan Kelompok;
- 6) Jumlah Anggota Kelompok;
- 7) Jiwa Kerjasama Anggota Kelompok (Saleh, 2021).

f. Suasana kelompok

Etos kelompok merupakan suasana berupa emosi yang umumnya terjadi di antara anggota kelompok. Dalam kaitannya dengan dinamika kelompok, semangat tersebut dapat berupa suasana kelompok yang memiliki loyalitas tinggi terhadap rekan kerja, saling menghormati dan menerima, penuh kebaikan, di mana antar anggota dapat saling melengkapi atau sebaliknya. ketegangan, kebebasan berpartisipasi dan lingkungan fisik akan turut mempengaruhi suasana dalam kelompok.

g. Tekanan kelompok

Suatu kondisi yang menimbulkan ketidaknyaman dalam suatu kelompok yang berasal dari luar maupun dalam kelompok merupakan dampak dari adanya tekanan kelompok. Tekanan dalam kelompok akan mengakibatkan ketegangan dalam kelompok dan memotivasi atau mendorong kelompok agar dapat mewujudkan tujuannya. Peran tekanan dalam kelompok adalah membantu anggota kelompok mempertegas pendapatnya dan mempererat korelasi antar tim dengan lingkungan sosialnya.

h. Efektivitas kelompok

Efektivitas kelompok berarti mampu menyelesaikan tugas dengan baik dan cepat serta memberikan kepuasan bagi setiap anggota tim untuk mencapai tujuan berikutnya. Keseriusan dan antusiasme anggota kelompok dalam mewujudkan tujuan kelompok sangat berkaitan dengan suasana kelompok.

i. Maksud-maksud tersembunyi

Maksud tersembunyi adalah tujuan yang sulit untuk dipahami dan dikomunikasikan oleh anggota kelompok tersebut. Situasi seperti ini sering muncul dalam suatu kelompok, baik itu berasal dari pemimpin, anggota atau orang-orang yang tumbuh dan berkembang di dalam kelompok itu sendiri.

D. Daftar Pustaka

- Hadi, S. (2017) *Dinamika Kelompok (Sebuah Tinjauan Terhadap Perspektif Pembangunan Masyarakat Petani)*. LPPM-UM Jember Press, Jember.
- Kelbulan, E., Tambas, J.S. and Parajouw, O. (2018) "Dinamika Kelompok Tani Kalelon Di Desa Kauneran Kecamatan Sonder," 14(September), pp. 55-66.
- Kurnianto, B.T. dan M.D.L. (2022) "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Dinamika Kelompok Tani Padi Sawah (*Oryza sativa* L)," *Agribisnis*, 8(1), pp. 24-31.
- Lestari, M. (2015) "Dinamika Kelompok dan Kemandirian Anggota Kelompok Tani Dalam Berusahatani Di Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah," pp. 18-37.
- Suryani, J.A. *et al.* (2022) "Pengaruh Dinamika Kelompok Terhadap Pemberdayaan Kelompok Formal Dan Tidak Formal Pada Peternak Kerbau Di Kabupaten Pematang," *Prosiding Seminar Nasional Teknologi Agribisnis Peternakan (Stap)*, 9, pp. 444-450.
- Tapi, T. (Staf pengajar J.P.P.S.M. (2016) "Dinamika Kelompok Tani Sasaran Program Upaya Khusus Peningkatan Produksi Padi Pada Daerah Sentra Produksi Padi Di Kabupaten Manokwari (Studi Kasus Kampung Prafi Mulya Distrik Prafi)," *Triton*, 7(1), pp. 77-90.
- Trimawartinah (2020) *Buku Ajar Dinamika Kelompok*.

BAB

8

PARTISIPASI PETANI DALAM PENYULUHAN

Yusmi Nelvi, S.P., M.Si.

A. Pendahuluan

Dalam mendukung perekonomian nasional pertanian mempunyai peran yang sangat strategis, untuk mewujudkan ketahanan pangan, penanggulangan kemiskinan, penyerapan tenaga kerja dan peningkatan daya saing,. Sesuai dengan konteksnya, pengelolaan hasil pertanian telah dilakukan berbagai kajian secara menyeluruh dalam aspek kajian lintas komoditi yang sangat berperan penting serta menyediakan informasi tentang pembangunan pertanian. Pembangunan ekonomi adalah bagian dari Pembangunan pertanian itu sendiri. (Effendi, Juita, & Elkana, 2021).

Dalam (Saragih, 2018) menyebutkan Pertanian adalah suatu hal yang sangat penting bagi perekonomian di Indonesia. Maka dari itu, pembangunan ekonomi di Indonesia pada abad ini, tetap akan berpotensi pada aspek pertanian. Namun, sesuai dengan perkembangan dan tahapan ekonomi maka kegiatan yang menggunakan jasa-jasa dan agribisnis akan berkembang secara pesat, yaitu kegiatan agribisnis akan menjadi salah satu kegiatan unggulan (a leading sector) pembangunan ekonomi nasional dalam berbagai aspek yang lebih luas lagi, ini dikarenakan aspek pertanian perkembangannya sangat pesat.

Berhasilnya suatu pembangunan pertanian dapat diartikan kalau terjadi perkembangan pengelolaan komoditas

pangan yang tinggi dan sekaligus terjadi perubahan masyarakat tani dari kurang baik menjadi yang lebih baik, jadi Pembangunan seringkali diartikan pada pertumbuhan dan perubahan. Seperti diketahui sektor pertanian di Indonesia dianggap penting. Kita bisa melihat peran pembangunan pertanian terhadap penyediaan penyedia pangan, lapangan kerja, memberikan sumbangan devisa Negara melalui ekspor dan sebagainya (Soekartawi, 2015)

Pada hakikatnya pembangunan pertanian merupakan sumberdaya pertanian secara optimal dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan, antara lain:

1. Membuat sumber daya manusia yang profesional, kelembagaan yang tangguh dan petani mandiri;
2. Pemanfaatan sumberdaya yang berkelanjutan untuk sumber daya manusia;
3. Kuatnya ketahanan dan keamanan pangan;
4. Tumbuh dan berkembangnya usaha pertanian yang membuat ekonomi di desa meningkat;
5. Berkembangnya usaha pertanian yang membuat pembangunan di desa lebih meningkat;
6. Bisa membuat sistem manajemen yang bagus dalam peningkatan pembangunan pertanian (Hernanda, Fatchiya, & Sarma, 2015).

Menurut (Abubakar & Siregar, 2010) Penyuluhan pertanian didefinisikan sebagai pembelajaran yang ditujukan kepada petani dan keluarganya dengan tujuan yang jelas dan membuat perilaku petani lebih baik dan mempunyai pengetahuan baru yang bisa membuat masyarakat sejahtera,, serta tujuan jangka panjang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Dalam bidang tertentu yang pertama adalah kelompok penyuluh dan yang kedua adalah kelompok yang disuluh. Dalam kegiatan penyuluhan pertanian melibatkan dua kelompok aktif.

Penyuluhan merupakan pembelajaran di luar ruangan bagi petani dan keluarganya kegiatan belajar mengajar yang dilakukan untuk melakukan proses pembelajaran sehingga

sasaran penyuluhan tercapai. Diantara para ahli penyuluhan menyatakan sasaran penyuluhan yang utama yaitu melakukan memperluas berbagai informasi yang berguna bagi masyarakat petani di desa dan perkembangan pertanian di wilayah mereka, melalui pelaksanaan baik percobaan yang dilakukan di lapangan atau pun di dalam ruangan sehingga kegiatan penyuluhan dapat tercapai dan pertukaran informasi dan pengalaman selama menjadi petani atau penyuluh untuk tujuan mencapai kesejahteraan. (Wayan Okiwidiyanti, 2018).

Penyelenggaraan, penyuluhan pertanian di Indonesia sangat cenderung lebih mementingkan program daripada bagaimana membuat petani sejahtera, hal ini akan memberi efek pada prakarsa (inisiatif) dan partisipasi petani yang merupakan salah satu bagian proses pembangunan di masyarakat, masalah yang muncul, prasarana yang ditimbulkan, serta pengaruhnya dapat ditunjukkan dengan analisis pohon masalah (Problem Tree Analisis).

Walau demikian, petani dalam pembangunan pertanian harus mampu dan mau memberikan kontribusinya, maka pembangunan pertanian tersebut harus didasarkan pada prakarsa mereka sendiri nantinya yang bisa membantu petani menjadi mandiri, kemampuan mengambil keputusan adalah alternatif yang baik dalam pemenuhan kebutuhan, mengelola dan memberdayakan secara optimal potensi dan sumberdaya yang dimiliki petani merupakan hal yang harus diupayakan secara benar dan teliti. Tujuannya adalah memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat, sosial dan kebudayaan menuju pertanian yang mandiri dan tangguh (masyarakat yang bermanfaat), (Suprayitno & Lokal, 2008).

Tujuan program penyuluhan pertanian adalah melatih, ketekunan petani untuk saling mengajarkan pembaharuan yang telah diberikan kepada petani sebagaimana dapat menyempurnakan suatu teknologi tersebut sehingga petani bisa termotivasi untuk menjadi petani lebih maju. Melalui pembelajaran dan pengembangan teknologi baru yang dapat diterapkan petani, apa cara yang harus dilakukan untuk

mengembangkan dan menyesuaikan berbagai perkembangan teknologi baru tersebut secara berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kemanfaatan sumber daya mereka. Singkatnya, tujuan program penyuluhan pertanian bukan hanya mengembangkan usahatani para petani, namun juga mengajarkan kepada mereka bagaimana suatu proses yang dapat mereka gunakan sendiri untuk mengembangkan usahatani mereka. (Mahmud, 2019) mengungkapkan bahwa tujuan penyuluhan pertanian yang paling penting yaitu supaya terjadinya perubahan baik yang relevan pada diri petani sebagai pelaku utama pada hasil pertanian dan sebagai pelaku usaha beserta keluarganya. Dinamika serta perubahan-perubahan yang diharapkan meliputi perilaku (behavior) yang menyentuh pengetahuan, keterampilan dan sikap maupun kepribadian (personality) yang meliputi kemandirian, ketidaktergantungan, keterbukaan, kemampuan kerjasama, kepemimpinan, daya saing dan sensitif gender sehingga mereka mau dan mampu menolong dirinya sendiri dalam mengatasi persoalan yang ada untuk meningkatkan daya produksi, pemanfaatan usaha, hasil tani dan kesejahteraannya serta meningkatkan kemauan dalam pelestarian suatu lingkungan hidup.

B. Partisipasi Petani

Partisipasi diartikan sebagai suatu keterlibatan pikiran dan perasaan seseorang di dalam keadaan kelompok yang membuatnya untuk bisa memberikan pikiran supaya usaha kelompok lebih maju. Keikutsertaan aktif dalam partisipasi kelompok, bukan hanya melibatkan individu petani semata-mata tetapi partisipasi dapat diartikan sebagai keterlibatan mental, pikiran, dan emosi atau hati seseorang dalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai suatu tujuan serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang akan mereka lakukan (Sadono, 2008).

Partisipasi adalah keterlibatan secara sadar dengan keinginan sendiri disertai dengan tanggung jawab terhadap kepentingan kelompok untuk mencapai tujuan bersama dalam mencapai kesejahteraan, (Mutolib, 2020) mendefinisikan partisipasi adalah secara sukarela oleh masyarakat dalam hal perubahan yang ditentukannya sendiri. Partisipasi berbasis masyarakat adalah suatu proses aktif dimana petani secara langsung ikut serta dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi suatu proyek atau program pembangunan yang mereka miliki dengan tujuan untuk menumbuhkan kemandirian petani, pendapatan yang meningkat dan keikutsertaan petani dalam suatu kelompok tersebut baik secara pribadi maupun secara kelompok dengan kesadaran sendiri dan tanggung jawab dalam hal usaha pertanian. Di dalam melaksanakan kegiatan program penyuluhan pertanian, keikutsertaan petani sebagai salah satu sasaran penyuluhan pertanian merupakan faktor yang paling utama. Partisipasi tersebut dapat berupa petani berperan serta dalam pertemuan kelompok, memberikan pertanyaan pada saat PPL melakukan penyuluhan dilaksanakan.

Menurut (Asnudin, 2010), ditinjau dari segi motivasi, partisipasi petani terjadi karena:

1. Merasa takut/terpaksa, partisipasi yang dipaksakan untuk melaksanakan kegiatan yang direncanakan, masyarakat dipaksa supaya melakukan apa yang disuruh oleh atasannya sesuai dengan yang direncanakan.
2. Suka ikut-ikutan, partisipasi yang hanya ikut-ikut saja bukan didorong oleh rasa solidaritas yang tinggi diantara sesama petani, jika ketua mereka sudah memuali maka semua anggota akan ikut apa yang akan direncanakan, jadi ini merupakan kebersamaan saja tidak ada dorongan dari hati.
3. Kesadaran sendiri, partisipasi yang timbul karena kehendak dari pribadi anggota petani. Hal ini dilandasi oleh dorongan yang timbul dari hati sendiri. Partisipasi diharapkan dapat berkembang dalam diri petani. Kesadaran sendiri ini tanpa dipaksa oleh siapapun, sehingga masyarakat dapat diajak

memelihara dan merasa memiliki suatu objek pembangunan yang diselenggarakan di desa tersebut tanpa harus diperintah terlebih dahulu.

Partisipasi dalam pembangunan pertanian berperan menjadi jembatan yang dapat menghubungkan antara teori dan praktek yang dijalankan oleh petani dengan pengetahuan dan teknologi petani yang selalu bisa berkembang menjadi keperluan bagi petani. Agar petani dapat melakukan semua praktek-praktek yang mendukung usaha tani mereka maka petani membutuhkan beberapa informasi yang inovatif di bidang pertanian. Nah Informasi yang diberikan dapat diperoleh petani antara lain dari PPL (Penyuluh Pertanian Lapang) melalui penyelenggaraan kegiatan penyuluhan Pertanian (Marliati, Sumardjo, Asngari, Tjitropranoto, & Saefuddin, 2018)

Partisipasi yang berbasis masyarakat adalah suatu proses aktif dimana para petani secara langsung ikut serta dalam merencanakan, melaksanakan, dan menilai kegiatan dalam program pembangunan yang memiliki tujuan dapat membangkitkan kemandirian, meningkatkan pendapatan dan pengembangan usaha dibidang pertanian (Purawou, 2015).

C. Jenis Partisipasi Kelompok Tani

Menurut (Yusmi Nelvi, Delsi Afrini, Mahmud, Edi Firnando, Muharama Yora, 2023) mengemukakan bahwa ada beberapa jenis partisipasi kelompok tani diantaranya:

1. Kekuatan;
2. Pemikiran;
3. Gagasan dan kemampuan;
4. Kemampuan;
5. Barang dan uang.

Dari jenis-jenis partisipasi tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Gagasan: pikiran merupakan suatu jenis partisipasi pada tingkatan ke satu dimana partisipasi tersebut suatu pemikiran seseorang atau kelompok yang bertujuan untuk

mencapai sesuatu yang mereka diinginkan sehingga bisa bermanfaat bagi orang lain.

2. Kemampuan: merupakan jenis partisipasi pada tingkatan kedua dimana partisipasi tersebut dengan mengerahkan seluruh kemampuan yang dimiliki secara kelompok maupun individu untuk mencapai sesuatu yang mereka diinginkan.
3. Gagasan dan Kemampuan: merupakan jenis partisipasi pada tingkatan ketiga partisipasinya dilakukan secara bersama dalam suatu kelompok dalam mencapai tujuan yang sama pada kelompok tersebut.
4. Keahlian: merupakan jenis partisipasi pada tingkatan keempat dimana keahlian tersebut menjadi unsur yang paling diinginkan untuk menentukan suatu keinginan dari suatu kelompok.
5. Barang: adalah partisipasi pada tingkatan kelima dimana partisipasi dilakukan dengan sebuah barang untuk membantu mencapai suatu hasil yang diinginkan.
6. Uang: merupakan jenis partisipasi pada tingkatan keenam dimana uang adalah salah satu alat untuk mencapai sesuatu yang mereka inginkan. Seperti yang kita ketahui partisipasi tersebut yang melakukannya orang-orang yang memiliki keuangan lebih saja. Sehingga pencapaian terhadap uang ini sangat tidak baik

D. Penyuluhan Pertanian

Penyuluh pertanian adalah orang yang mampu melakukan pekerjaan untuk memberikan motivasi kepada petani agar mau mengubah pola/cara pandang mereka, cara kerja dan cara pandang yang lebih sesuai dengan perkembangan saat ini, agar lebih majunya teknologi pertanian. Maka dari itu seorang penyuluh pertanian adalah pelaksana tugas yang mempunyai tiga peranan:

1. Berperan sebagai pendidik, bisa memberikan ilmu yang bermanfaat agar tanaman lebih baik usahatani dan terarah sehingga tidak terjadi kegagalan dalam berusaha taninya.

2. Berperan sebagai pemimpin, yang dapat membimbing dan memotivasi petani agar mau merubah pola berfikir, cara kerja mereka agar timbul ketransparanan dan mau menerima cara-cara bertani baru yang lebih berdaya guna dan berhasil, sehingga tingkat hidupnya lebih akan lebih sejahtera.
3. Berperan sebagai penasehat, penyuluh dapat melayani, memberikan petunjuk-petunjuk dan membantu para petani baik dalam bentuk peragaan atau contoh-contoh kerja dalam usahatani mereka dan memecahkan segala permasalahan yang dihadapi para petani (Kartasaputra, 2018). Peran penyuluh sangat berat yang mengharuskannya memiliki kemampuan tinggi dan penguasaan teknologi terbaru. Oleh karena itu, kualitas penyuluh harus terus mereka tingkatkan sehingga mereka mampu berperan dalam hal memberikan penyuluhan dan mewujudkan pembangunan pertanian yang lebih maju lagi.

Dalam merancang rencana penyuluhan pertanian mengimplikasikan di lapangan dalam bentuk aktivitas yang harus bisa dicapai sesuai dengan program yang telah disusun dengan baik. Pelaksanaan program penyuluhan, bisa kita lihat ini merupakan wilayah kerja petani secara keseluruhan. Artinya, partisipasi petani dalam hal ini harus mendapat prioritas yang sangat tinggi.

E. Tujuan Penyuluhan Pertanian

Penyuluh pertanian sebagai salah satu perantara yang berada pada garis terdepan dalam percepatan pembangunan agribisnis di Indonesia, diharapkan penyuluh mempunyai kekuatan dan kepercayaan diri yang tinggi dalam menyelenggarakan tugas pokoknya yaitu dapat membantu petani meningkatkan kualitas dirinya melalui pengetahuan dan juga keterampilan yang akan merubah perilaku petani. Dalam hal ini penyuluh pertanian adalah pendidikan non formal yang tidak hanya sekedar memberikan pencerahan atau penjelasan, tetapi berupaya untuk mengubah perilaku seseorang agar memiliki pengetahuan di bidang pertanian, pengetahuan

berusahatani, memiliki sikap kearah kemajuan untuk melakukan perubahan dan inovasi terhadap informasi yang terkini, serta terampil melaksanakan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pertanian.

Penyuluhan partisipatif adalah penyelenggaraan penyuluhan yang akan melibatkan secara aktif pelaku utama, yakni petani sebagai aktor pembangunan dan pelaku usaha dalam penyuluhan sejak perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi. Hal ini dimaksudkan agar petani mampu mengambil keputusan secara mandiri terhadap apa yang akan dilakukan dan mengapa harus dilakukan sehingga harapan berkembangnya sistem dan usaha agribisnis akan dapat terwujud dengan segera (Ardita, DWP, & Widjanarko, 2017).

Dalam azas Penyuluhan Pertanian, UU RI No 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Pasal 2 menyatakan bahwa penyuluhan diselenggarakan berdasarkan demokrasi, manfaat, kesetaraan, keterpaduan, keseimbangan, keterbukaan, kerja sama, partisipatif, kemitraan, berkelanjutan, berkeadilan, pemerataan, dan bertanggung gugat. Tujuan penyuluhan pertanian, dalam UU RI No 16 Tahun 2006 Pasal 3, menyatakan bahwa tujuan pengaturan sistem penyuluhan meliputi pengembangan sumberdaya manusia dan peningkatan modal sosial, adalah:

1. Perkembangan pertanian yang semakin menguat, perikanan, serta kehutanan yang maju dan modern dalam sistem pembangunan berkelanjutan;
2. Pelaku utama dan pelaku usaha harus berdaya dalam meningkatkan kemampuan melalui penciptaan suasana usaha yang kondusif, penumbuhan motivasi, pengembangan potensi, pemberian peluang, peningkatan kesadaran, dan pendampingan serta fasilitas;
3. Memberikan kepastian hukum bagi terselenggaranya penyuluhan yang produktif, efektif, efisien, terdesentralisasi, partisipatif, terbuka, berswadaya, bermitra sejajar, kesetaraan gender, berwawasan luas ke depan, berwawasan lingkungan

- dan bertanggung gugat yang dapat menjamin terlaksananya pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan;
4. Memberikan perlindungan, keadilan, dan kepastian hukum bagi pelaku utama dan pelaku usaha untuk mendapatkan pelayanan penyuluhan serta bagi penyuluh dalam melaksanakan penyuluhan; dan
 5. Mengembangkan sumberdaya manusia yang maju dan sejahtera, sebagai pelaku dan sasaran utama pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan.

Tujuan utama penyuluhan pertanian adalah merubah perilaku petani dan keluarganya sehingga diharapkan dapat melakukan pengelolaan usahanya dengan produktif, efektif dan efisien. (Effendi *et al.*, 2021) menyatakan bahwa tujuan penyuluhan yaitu membantu dan memfasilitasi petani dalam memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi dengan memberikan cara-cara baru yang lebih baik lagi, Karena penyuluh merupakan agen dari perubahan sikap dan pola pikir petani yang nantinya petani mampu mengambil keputusan sendiri sehingga mereka mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi .

F. Daftar Pustaka

- Abubakar, & Siregar, A. N. (2010). Kualitas Pelayanan Penyuluh Pertanian dan Kepuasan Petani dalam Penanganan dan Pengolahan Hasil Ubi Jalar (*Ipomoea batatas L.*). *Jurnal Penyuluhan Pertanian*, 5(1), 1-15.
- Ardita, A., DWP, S., & Widjanarko, D. (2017). Kinerja Penyuluh Pertanian Menurut Persepsi Petani: Studi Kasus di Kabupaten Landak. *Journal of Vocational and Career Education*, 2(1), 1-8.
- Asnudin, A. (2010). Pendekatan Partisipatif Dalam Pembangunan Proyek Infrastruktur Perdesaan di Indonesia. *Jurnal SMARTek*, 8(3), 182-190.
- Effendi, M., Juita, F., & Elkana, V. (2021). Peran Penyuluh Pertanian Lapangan Terhadap Tingkat Kepuasan Petani

- di Wilayah Kerja Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Barong Tongkok. *Jurnal Pertanian Terpadu*, 9(1), 66-80.
- Hernanda, T. A., Fatchiya, A., & Sarma, M. (2015). Tingkat Kinerja Penyuluh Pertanian di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan. *Jurnal Penyuluhan*, 11(1), 79-90. <https://doi.org/10.25015/penyuluhan.v11i1.9937>
- Kartasaputra. (2018). Staging stewards of agro-ecosystems in the ecosystem services framework. *Ecosystem Services*, 33(May), 89-101.
- Mahmud, M. D. A. Y. N. (2019). STRATEGI PENGEMBANGAN KOPI DI KOPERASI SOLOK RADJO Mahasiswa Program Studi Agribisnis , Fakultas Pertanian , Universitas Mahaputra Dosen Program Studi Agribisnis , Fakultas Pertanian , Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Email corresponding author : mahm. *JBS*, 1(1), 1-11.
- Marliati, M., Sumardjo, S., Asngari, P. S., Tjitropranoto, P., & Saefuddin, A. (2018). Faktor-Faktor Penentu Peningkatan Kinerja Penyuluh Pertanian Dalam Memberdayakan Petani (Kasus di Kabupaten Kampar Provinsi Riau). *Jurnal Penyuluhan*, 4(2).
- Mutolib, A. (2020). Partisipasi Dan Kepuasan Petani Terhadap Kinerja Penyuluh. (January).
- Purawou. (2015). *ASE ± Volume 11 Nomor 3A*, November: 19 - 32. 11(November), 19-32.
- Sadono, D. (2008). Pemberdayaan Petani: Paradigma Baru Penyuluhan Pertanian di Indonesia. *Jurnal Penyuluhan*, 4(1).
- Saragih. (2018). Hambatan dan strategi pengembangan usahatani dalam upaya peningkatan usaha produksi.
- Soekartawi. (2015). Analisis Usaha Tani.
- Suprayitno, A. R., & Lokal, P. M. (2008). *Jurnal Penyuluhan*. 4(2), 2-5.

WAYAN OKIWIDIYANTI. (2018). Peran Penyuluhan. *Energies*, 6(1), 1-8. Retrieved from <http://journals.sagepub.com>

Yusmi Nelvi, Delsi Afrini, Mahmud, Edi Firnando, Muharama Yora, H. S. (2023). Fruitset Sains: Jurnal Pertanian Agroteknologi ANALISIS TINGKAT KEPUASAN PETANI TERHADAP KINERJA PENYULUH PERTANIAN DI NAGARI KUNCIA KECAMATAN X KOTO DIATAS KABUPATEN SOLOK. *Fruitset Sains*, 11(2), 1-11.

BAB 9

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PENYULUH YANG PROFESIONAL DAN KOMPETEN

Ir. Yani Taufik, M.Si., Ph.D.

A. Pendahuluan

Seiring dengan perkembangan global, sektor pertanian turut mengalami dinamika yang luar biasa. Sebagai konsekuensi dari perubahan tersebut, kegiatan penyuluhan lapangan dituntut untuk dapat menyesuaikan diri dengan tantangan perubahan yang berkembang sangat cepat. Penyuluhan pertanian mempunyai peranan sangat strategis dalam pembangunan pertanian, khususnya dalam mengembangkan kompetensi pelaku utama dan pelaku usaha di bidang pertanian. Melalui peran penyuluh diharapkan masyarakat pertanian sebagai pelaku utama dan pelaku usaha mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi, teknologi, dan sumber daya yang dimiliki sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraan. Pembangunan pertanian pada prinsipnya adalah membangun sumberdaya manusia petani (Chaidirsyah, 2013).

Untuk mewujudkan perannya secara optimal, penyuluh pertanian dituntut untuk dapat meningkatkan profesionalismenya dalam memberikan pelayanan prima kepada petani. Pada saat ini penyuluh lapangan swasta yang juga merupakan pelayan teknis perusahaan sarana produksi nasional dan multinasional juga telah merambah ke desa - desa. Dalam era baru pertanian, sebagaimana dikemukakan dalam

Rencana Strategis Departemen Pertanian tahun 2020-2024 dinyatakan bahwa untuk meningkatkan sumberdaya manusia berkualitas seorang penyuluh lapangan dituntut untuk dapat melakukan pendampingan sebagai konsultan pertanian dan fasilitator lapangan. Oleh karena itu seorang penyuluh pertanian memiliki fungsi paling tidak dalam tiga hal yaitu transfer teknologi (*transfer of technology*), fasilitasi (*facilitation*) dan penasehat (*consultant/advisory*). Untuk mendukung fungsi-fungsi tersebut, penyuluh pertanian lapangan mestinya juga menguasai dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Fungsi kegiatan penyuluhan pertanian salah satunya adalah membantu pelaku utama dan pelaku usaha di bidang pertanian dalam menganalisis dan memecahkan masalah serta merespon peluang dan tantangan yang dihadapinya dalam mengelola sumber daya yang ada dan memanfaatkan berbagai peluang yang ada secara optimal. Untuk itu dalam mewujudkan tujuan pembangunan pertanian yang semakin berat diperlukan penyuluh pertanian yang handal dan profesional.

Seorang penyuluh profesional tidak hanya dituntut mampu menyampaikan materi penyuluhan, tapi harus mempunyai kecakapan dalam penyiapan materi dan penyampaianya. Sehingga dapat mendorong terjadinya transfer teknologi. Untuk mengelola usaha taninya dengan baik, petani memerlukan berbagai sumber informasi, antara lain : kebijakan pemerintah; hasil penelitian dari berbagai disiplin ilmu; pengalaman petani lain; dan informasi terkini mengenai prospek pasar yang berkaitan dengan sarana produksi dan produk pertanian yang kesemuanya itu akan terakomodir apabila penyuluh pertanian dapat secara aktif meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka sesuai dengan perkembangan perubahan teknologi yang terus berkembang, dengan demikian penyuluh pertanian juga sekaligus dapat berfungsi sebagai mitra petani dalam memberikan saran dan pertimbangan (*advisor*) dalam proses pengambilan keputusan.

Penyuluh Pertanian sebagai agen perubahan harus bisa berfungsi juga sebagai fasilitator dalam perubahan Sikap petani sebagai pelaku usaha dalam hal menyampaikan informasi apapun yang berkaitan dengan pertanian melalui Teknologi informasi, untuk itu terlebih dahulu seorang penyuluh dituntut untuk dapat dan mampu menguasai teknologi informasi. Sumber informasi tidak hanya berasal dari media cetak maupun audio visual, peranan teknologi informasi melalui internet adalah salah satu media sarana informasi dan pembelajaran bagi petani dan penyuluh untuk dapat meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya agar pembangunan pertanian dapat seperti apa yang diharapkan. Teknologi Informasi harus dikuasai, sebagai salah satu bentuk pengembangan diri penyuluh dalam menghadapi tantangan di era globalisasi dan era informasi komunikasi saat ini untuk menjadi Penyuluh yang Kompeten dan profesional dalam menjawab tantangan pembangunan pertanian yang berkelanjutan.

B. Profesionalisme Penyuluh

1. Pengertian Profesionalisme

Menurut Kamus Kata-Kata Serapan Asing Dalam Bahasa Indonesia, karangan Badudu & Zain, (1994), definisi profesionalisme adalah mutu, kualitas, dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau ciri orang yang profesional. Sementara kata profesional sendiri berarti, bersifat profesi, memiliki keahlian dan keterampilan karena pendidikan dan latihan, memperoleh bayaran karena keahliannya itu. Definisi tersebut mengandung makna bahwa, seseorang dapat dianggap profesional apabila memiliki keahlian yang layak sesuai bidang tugas yang diembannya. Profesionalisme merupakan suatu sikap yang harus dikembangkan seseorang dalam lingkup kerjanya. Pakar di bidang birokrasi lainnya menyatakan bahwa profesionalisme adalah keandalan dan keahlian dalam pelaksanaan tugas sehingga dapat terlaksana dengan mutu tinggi (Siagian 2009).

Menurut Freidson (2001) dalam Andreassen & Natland, (2022) "professionalism means greater commitment to doing good work than to economic gain, and to quality rather than efficiency ". "profesionalisme berarti komitmen yang lebih besar untuk melakukan pekerjaan dengan baik dari pada keuntungan ekonomi, dan kualitas daripada efisiensi".

Sedangkan menurut Sullivan dan Shulman (2005) dalam Andreassen & Natland, (2022) professionalism includes three elements: a theoretical, academic knowledge base and analytical reasoning, argument and research; the skills and abilities to make effective judgements in the face of uncertainty and to learn from such experiences; and a professional culture with social roles and responsibilities. This third element involves integrity and a sense of direction. It also entails responsibility for the quality of one's own work and 'the capacity and disposition to perform in accordance with the best standards of a field in a way that serves the larger society. Profesionalisme mencakup tiga unsur yaitu basis pengetahuan teoritis, akademik dan penalaran analitis, argumen dan penelitian; keterampilan dan kemampuan untuk membuat penilaian yang efektif dalam menghadapi ketidakpastian dan belajar dari pengalaman; dan budaya profesional dengan peran dan tanggung jawab sosial. Elemen ketiga ini melibatkan integritas. Ini juga memerlukan tanggung jawab atas kualitas pekerjaan sendiri dan 'kapasitas dan disposisi untuk tampil sesuai dengan standar terbaik dari suatu bidang dengan cara yang melayani masyarakat yang lebih luas'

Berdasarkan uraian para ahli tersebut, profesionalisme melibatkan baik kompetensi untuk melakukan tugas-tugas profesional yang diemban (termasuk basis pengetahuan, yang diperoleh melalui pendidikan tinggi, dan keterampilan yang diperoleh melalui pengalaman praktis), dan sikap yang berkaitan dengan menjadi dan bertindak sebagai seorang profesional (seperti etika, integritas, komitmen terhadap

kualitas, orientasi layanan dan kesetiaan terhadap kontrak sosial lapangan). Pengetahuan akan tugas pokok dan fungsi penyuluh harus dimiliki oleh setiap penyuluh dan untuk meningkatkan profesionalismenya maka sangat penting pula bagi seorang untuk meningkatkan kapasitasnya. Peningkatan SDM penyuluh dapat dilakukan melalui Pendidikan formal, maupun pelatihan ataupun melakukan kunjungan lapangan pada lokasi/objek yang dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan penyuluh. Pelibatan para pihak termasuk pihak swasta yang mengusahakan komoditas pertanian di berbagai wilayah juga dapat menjadi salah satu wahana peningkatan profesionalitas penyuluh.

2. Kebijakan Pemerintah

Pembangunan pertanian, memiliki peran sentral sebagai tulang punggung pembangunan ekonomi Indonesia (Chaidirsyah, 2013) Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk Indonesia masih dominan bekerja di sektor pertanian dengan pangsa pasar tenaga kerja sebesar 24,96% pada tahun 2020 atau 35,00 juta orang dari total angkatan kerja 140,22 juta orang (Badan Pusat Statistik, 2021). Oleh karena itu penyelenggaraan penyuluhan pertanian merupakan bagian penting dari proses pembangunan pertanian dan pedesaan pada umumnya. Pembangunan pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan dan kehutanan atau dikenal dengan sektor pertanian dalam arti luas memungkinkan masyarakat pedesaan: (1) belajar teknologi yang dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas usaha, (2) belajar meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan teknologi, dan (3) belajar membentuk struktur sosial dan prosesnya untuk memelihara dan merangsang transformasi perekonomian pedesaan. Oleh karenanya, kegiatan penyuluhan pada dasarnya merupakan usaha terorganisir dalam membawa pengetahuan dan keterampilan, dan berbagai sumberdaya yang dibutuhkan

petani dan keluarganya untuk meningkatkan kualitas kehidupannya.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 448/KPTS/RC.020/M/8/2021 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024, dinyatakan bahwa pembangunan pertanian berkelanjutan mengarahkan agar lahan pertanian dipandang sebagai satu industri dengan seluruh faktor produksi yang menghasilkan produk utama pangan dan produk lainnya (produk turunan atau sampingan, produk ikutan dan limbah) yang dikelola untuk kepentingan industri menuju zero waste (tidak ada yang disia-siakan). Untuk itu diperlukan sinkronisasi dan sinergitas program penelitian, pengkajian dan diseminasi dengan program penyuluhan pertanian serta koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten serta pemangku kepentingan lainnya.

Penyuluh sebagai seseorang yang atas nama pemerintah atau lembaga penyuluhan mempunyai kewajiban untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh petani dalam proses mengadopsi inovasi. Oleh karenanya, penyuluh yang dapat berperan sebagai agen pembaharu (agent of change) seharusnya mempunyai kualifikasi tertentu, baik yang menyangkut kepribadian, pengetahuan, sikap dan keterampilan penyuluh yang profesional.

Urgensi pentingnya penyuluh yang profesional saat ini sangat dirasakan sekali. Berbagai perubahan baik yang berhubungan dengan situasi dan kondisi "sasaran" (petani) maupun keadaan lingkungan regional (ASEAN dan ASIA Pasific) serta dunia internasional, menuntut seorang penyuluh yang mampu menyesuaikan diri dengan dinamika sekelilingnya. Apabila aspek sumberdaya penyuluh ini masih terabaikan, maka peran penyuluh sebagai agen pembaharu akan berkurang atau akan ditinggalkan oleh petani, karena dianggap penyuluh tersebut sudah tidak lagi

mampu membawa inovasi yang sesuai dengan tuntutan petani dan dunia sekelilingnya. Oleh karenanya, amat relevan di dalam menyongsong era globalisasi dan era perdagangan bebas sangat penting dilakukan berbagai upaya peningkatan profesionalisme penyuluh.

Dalam pasal 7 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 03/Permentan/SM.200/1/2018 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian ditegaskan bahwa kebijakan bahwa pengembangan kemandirian dan profesionalisme Penyuluh Pertanian dilakukan melalui peningkatan kompetensi profesi dan Lembaga sertifikasi profesi yang ditunjang oleh pemenuhan prasarana, sarana dan pembiayaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian. Untuk mewujudkan peningkatan kualitas penyuluhan pertanian akan dilakukan melalui penataan, penempatan dan pelatihan peningkatan profesionalisme serta peningkatan sinergitas antar pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian. Dalam rangka peningkatan wawasan, keterampilan, profesionalisme penyuluh pertanian dimungkinkan pula untuk melakukan Kerjasama dengan berbagai lembaga baik di dalam maupun luar negeri. Untuk mewujudkan peningkatan profesionalisme penyuluh pemerintah di tingkat pusat telah membentuk Badan Penyuluh Pertanian Sumberdaya Manusia Pertanian (PPSDMP) serta dinas yang menyelenggarakan fungsi penyuluhan pertanian di tingkat provinsi dan kabupaten/kota serta Balai Penyuluhan Pertanian di tingkat kecamatan.

3. Profesionalitas Penyuluh

Peran penyuluh tidak hanya sebatas pada fungsi menyampaikan inovasi dan mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh sasaran penyuluhannya, akan tetapi harus mampu menjadi jembatan penghubung antara pemerintah atau lembaga penyuluhan

yang diwakilinya dengan masyarakat sasaran, baik dalam hal menyampaikan inovasi atau kebijakan-kebijakan pembangunan maupun untuk menyampaikan umpan balik atau tanggapan petani kepada pemerintah/lembaga penyuluhan yang bersangkutan.

Penyuluh haruslah dapat berperan sebagai pembimbing, organisator, dinamisator, pelatih, teknisi, dan jembatan penghubung antara masyarakat sasaran dan lembaga yang diwakilinya. Penyuluh Pun diharapkan dapat membantu sasaran (petani) mengenal masalah-masalah yang dihadapi petani dan membantu memberikan jalan keluar yang diperlukan. Oleh karenanya, agar penyuluh mampu berperan di dalam memfasilitasi pembelajaran petani, haruslah memiliki kompetensi profesional yang dibutuhkan, yaitu kompetensi yang mengacu kepada bidang pekerjaan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan peranannya, sebagai profesi.

Secara profesional, penyuluh seyogyanya memiliki kualitas kemampuan untuk memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik terhadap petani dan sistem sosialnya, dan mempunyai kemampuan yang baik tentang proses produksi (budidaya). Mardikanto, (1993) menyebutkan beberapa kualitas profesional yang harus dimiliki penyuluh, yaitu: memiliki sikap yang baik terhadap pekerjaan, melakukan persiapan kajian lapang, kesediaan untuk belajar, dan penguasaan terhadap aspek teknis (inovasi) yang akan disuluhkan. Penyuluh adalah orang yang memiliki perhatian, sifat pribadi, keterampilan, kompetensi, strategi, dan kemampuan persuasi yang tinggi dalam mempengaruhi perubahan sosial (pembaharuan).

Lebih lanjut dinyatakan bahwa peran penyuluh sebagai agen pembaharu, harus dapat berfungsi sebagai katalisator (catalyst), pemberi jalan keluar terhadap masalah yang dihadapi petani (solution giver) , membantu petani untuk menolong dirinya sendiri (a process helper) , dan penghubung berbagai sumber yang dibutuhkan petani (a

resource linker). Menurut Mosher (Mardikanto, 1993) setiap penyuluh harus mampu melaksanakan peran ganda sebagai guru yang berperan untuk mengubah perilaku masyarakat sasaran, penganalisa yang selalu melakukan pengamatan terhadap keadaan dan masalah serta kebutuhan sasaran, penasehat untuk memilih alternatif perubahan yang tepat, dan organisator, yang harus mampu menjalin hubungan baik dengan segenap lapisan masyarakat, menumbuhkan kesadaran dan partisipasi masyarakat.

C. Kompetensi Penyuluh

1. Pengertian Kompetensi

Kompetensi berarti kemampuan untuk melakukan sesuatu dengan baik, mampu melakukan tugas atau pekerjaan secara efektif. Competence means that you have the ability to do something well. You are capable of performing a task or job effectively (Sieck, 2021). Kompetensi dapat mencakup pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang dapat terdiri dari sekelompok keterampilan. Kompetensi mengacu pada keterampilan dan karakteristik yang memungkinkan untuk melakukan pekerjaan. Jika seseorang dapat melakukan tugas yang diperlukan pada tingkat kemahiran yang ditargetkan, mereka kompeten. Untuk menjadi kompeten, anda harus mampu bereaksi terhadap suatu situasi dan mengikuti perilaku yang menurut anda berhasil di masa lalu. Untuk melakukan ini, anda harus memiliki daftar rencana (skenario) tindakan yang mungkin dilakukan dan melatihnya. Kompetensi tumbuh dengan pengalaman dan pelatihan. Seseorang harus dapat melakukan berbagai tugas pada tingkat kemahiran sesuai target untuk dapat dikatakan memiliki kompetensi dalam suatu pekerjaan.

Secara umum kompetensi dalam pekerjaan dikategorikan ke dalam 2 tipe:

- a. Kompetensi dalam perilaku (behavioural competencies) dan

b. Kompetensi teknis/fungsional

Kompetensi perilaku dapat berkontribusi pada kesuksesan organisasi. Bukan hanya menyangkut kemampuan untuk melakukan sesuatu, tetapi bagaimana sesuatu harus dilakukan. Kompetensi perilaku dapat berupa keterampilan interpersonal antara lain, kemampuan menerima kritik konstruktif, kemampuan memahami perspektif orang lain, keterampilan membuat keputusan, manajemen waktu, mengambil tanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Beberapa contoh kompetensi perilaku antara lain:

- a. Kompetensi manajerial; gambaran perilaku - mendefinisikan tujuan yang jelas untuk anggota tim, membuat rencana kerja berdasarkan tujuan organisasi, memberikan umpan balik yang jujur dan sistematis.
- b. Kompetensi komitmen; gambaran perilaku - dapat dipercaya secara luas, memiliki rasa memiliki, senantiasa berkomitmen dalam tugas
- c. Kompetensi nilai dan etika; gambaran perilaku - mematuhi kode etik, selaras dengan nilai-nilai organisasi.

Sedangkan kompetensi fungsional lebih mengarah kepada keterampilan teknis seseorang yang berkontribusi terhadap produktivitas organisasi secara keseluruhan. Ini lebih tentang keterampilan yang perlu dimiliki seseorang untuk melakukan kegiatan teknis dalam suatu organisasi, seperti kemampuan Menyusun strategi, Menyusun perencanaan yang sistematis dan kemampuan dalam pengelolaan kegiatan. Kompetensi penyuluh pertanian yang baik akan membantu dalam merumuskan standar perilaku yang diharapkan, meningkatkan tingkat keberhasilan, meningkatkan efisiensi dalam organisasi, merencanakan jenis pelatihan yang tepat dan merumuskan strategi pengembangan keterampilan dan pengetahuan petani.

2. Kebijakan Pemerintah

Penyuluh mempunyai peran penting dalam pembangunan pertanian karena merupakan pihak yang langsung berhubungan dengan pemberdayaan petani. Oleh karena itu, agar dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik, penyuluh harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan kondisi dan tantangan penyuluhan saat ini. Seorang penyuluh pertanian diharapkan memiliki beberapa kemampuan dasar antara lain, melakukan identifikasi potensi wilayah dan agroekosistem, Menyusun program penyuluhan tingkat desa, Menyusun rencana kerja tahunan, Menyusun materi penyuluhan pertanian, menentukan metode penyuluhan, membuat alat bantu atau media penyuluhan, serta melakukan kegiatan penyuluhan pertanian.

Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan seorang aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian (Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian., 2020). Selanjutnya dalam peraturan Menteri tersebut ditegaskan bahwa pengangkatan dalam jabatan fungsional penyuluh harus berijazah paling rendah diploma tiga bidang pertanian bagi Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian kategori keterampilan. Berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat bidang pertanian bagi Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian Ahli Pertama, Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian Ahli Muda, dan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian Ahli Madya. berijazah paling rendah magister bidang pertanian bagi Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian Ahli Utama. Persyaratan selanjutnya adalah telah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural sesuai Standar Kompetensi yang telah disusun

oleh Instansi Pembina. Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran., 2021, bahwa yang dimaksud Kompetensi Teknis meliputi :

- a. Analisis pengembangan teknologi pembelajaran;
- b. Perancangan pengembangan teknologi pembelajaran;
- c. Pengembangan teknologi pembelajaran; penerapan model pembelajaran
- d. Berbasis teknologi;
- e. Difusi hasil pengembangan teknologi pembelajaran; dan
- f. Pengendalian dan evaluasi terhadap penerapan model pembelajaran berbasis teknologi.

Sedangkan Kompetensi Manajerial meliputi:

- a. Integritas;
- b. Kerja sama;
- c. Komunikasi;
- d. Orientasi pada hasil;
- e. Pelayanan publik;
- f. Pengembangan diri dan orang lain;
- g. Mengelola perubahan; dan
- h. Pengambilan keputusan

Sedangkan kompetensi Sosial Kultural yaitu perekat bangsa.

Untuk meningkatkan kompetensinya seorang penyuluh pertanian dapat mengikuti pelatihan fungsional dan pelatihan teknis bidang penyuluhan pertanian, selain itu dapat pula melalui keikutsertaan dalam seminar, lokakarya ataupun konferensi. Peningkatan kompetensi Penyuluh Pertanian dapat diselenggarakan oleh kelembagaan pendidikan dan pelatihan pemerintah daerah yang terakreditasi bekerja sama dengan kelembagaan pendidikan dan pelatihan Pertanian Pemerintah (Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor

3. Kompetensi Penyuluh

Dalam studi tentang kompetensi yang diperlukan bagi penyuluh pertanian yang dilakukan oleh Lindner *et al.*, (2003) di 23 negara, menyatakan bahwa standar kompetensi yang diperlukan pada masing-masing negara berbeda-beda. Namun secara umum ditemukan bahwa kompetensi dasar yang dibutuhkan oleh penyuluh pertanian adalah:

- a. Memiliki pengetahuan yang meliputi; teori, prinsip dan praktek yang berkaitan dengan pembangunan pertanian.
- b. Memiliki keterampilan dalam desain teknologi dan teknologi informasi dan
- c. Memiliki kemampuan komunikasi, manajemen waktu, dan pemecahan masalah (problem solving).

Selanjutnya Dooley & Lindner, (2002) menjelaskan bahwa kompetensi yang tidak kalah pentingnya harus dikuasai oleh penyuluh pertanian adalah dapat berpikir kritis, komunikasi, pengetahuan dalam ekonomi dan bisnis dan membangun hubungan antar manusia (human relations). Selain itu, temuan Sulaiman V & van den Ban, (2000) menunjukkan bahwa memiliki pengetahuan keterampilan praktis dalam ilmu sosial juga sangat penting untuk penyuluhan dan pendidikan pertanian. Di antara keterampilan tersebut adalah: keterampilan dalam pembentukan kelompok, kepemimpinan, resolusi konflik dan negosiasi antara kelompok kepentingan yang berbeda, manajemen sumber daya milik Bersama (common property), pengumpulan data, penggunaan berbagai media komunikasi, dan analisis dan dokumentasi merupakan pengetahuan yang selayaknya dimiliki oleh seorang penyuluh pertanian.

Standar kompetensi yang diperlukan seorang penyuluh pertanian di Indonesia didasarkan kepada upaya untuk mengoptimalkan potensi yang cukup besar dan sekaligus mengatasi berbagai permasalahan dalam

pembangunan pertanian untuk mencapai sasaran strategis pembangunan pertanian 2020-2024 meliputi:

- a. Meningkatnya Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas.
- b. Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian.
- c. Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Pertanian.
- d. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional.
- e. Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif dan Efisien, serta Anggaran yang Akuntabel.

Selain sasaran strategis tersebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 telah menetapkan 4 (empat) pengarusutamaan (mainstreaming) sebagai bentuk pembangunan inovatif dan adaptif, Keempat mainstreaming ini akan mewarnai dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan pertanian. Pengarusutamaan ini juga bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efisiensi tata kelola dan juga adaptabilitas terhadap faktor eksternal lingkungan. dimana antara satu pengarusutamaan dengan yang lainnya saling terkait dan saling mendukung, dengan rinciannya sebagai berikut.

- a. Pengarusutamaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDG's). Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan kesatuan dimensi pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang saling terkait. Kemajuan pada suatu dimensi pembangunan memerlukan keterlibatan aktif dari dimensi pembangunan lainnya. Kementerian Pertanian sebagai bagian dari pendukung pembangunan nasional juga berkewajiban melaksanakan pengarusutamaan tujuan pembangunan berkelanjutan. Kemiskinan, kelaparan dan malnutrisi di pedesaan berhubungan

dengan pertanian, bahkan pertanian diharapkan menjadi sektor unggulan dalam pengentasan kelaparan dengan peningkatan akses pangan masyarakat.

- b. Pengarusutamaan gender (PUG). Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan, mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi. Tujuan dari PUG adalah menjamin terciptanya akses, partisipasi, control, dan untuk memanfaatkan sumber daya atau sumber modal serta merasakan hasil dari pembangunan bagi setiap masyarakat yang seimbang antara perempuan dan laki-laki.
- c. Pengarusutamaan modal sosial budaya merupakan internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan. Pengetahuan tradisional (local knowledge), kearifan lokal (local wisdom), pranata sosial di masyarakat sebagai penjelmaan nilai-nilai sosial budaya komunitas harus menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan serta penyusunan kebijakan dan program pembangunan nasional. Pertanian erat kaitannya dengan pengembangan sosial dan budaya masyarakat, budaya gotong royong, mapalus dan subak merupakan contoh modal sosial yang perlu untuk diperkuat dalam meningkatkan partisipasi dan kepemilikan terhadap program pembangunan pertanian, termasuk berbagai jenis praktik budidaya konservasi yang dilaksanakan secara turun temurun dapat dijadikan sebagai bagian dari pengarusutamaan modal sosial budaya di sektor pertanian.
- d. Pengarusutamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Strategi pengarusutamaan transformasi digital terdiri dari

aspek pemantapan ekosistem (supply), pemanfaatan (demand), dan pengelolaan big data. Penyiapan layanan digital terintegrasi lingkup Kementerian Pertanian mencakup penyiapan regulasi, penguatan kelembagaan, pembangunan jaringan, sarana dan prasarana, meningkatkan kapasitas SDM dengan keahlian digital, melakukan kerja sama untuk menyediakan layanan digital dan one data penerapan, termasuk penataan sistem perizinan berbasis web (on-line), serta pengembangan dan peningkatan usaha melalui e-commerce.

Sebagai penerjemahan visi “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, maka pembangunan pertanian dan pangan diarahkan dalam mewujudkan Pertanian Maju, Mandiri dan Modern untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan bermuara pada peningkatan kesejahteraan petani.

- a. Pertanian maju bisa diartikan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia pertanian yang mampu meningkatkan produktivitas kerja dan kesejahteraannya. Apabila ditinjau dari indikator ekonomi, dicirikan dengan kestabilan lembaga dan pranata pertanian dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi sekaligus menyumbang penciptaan/penyerapan tenaga kerja. Pertanian maju juga ditandai dengan peran serta masyarakat secara nyata dan efektif dalam pembangunan pertanian.
- b. Pertanian mandiri bisa diartikan bahwa dalam pembangunan pertanian berdasarkan kemampuan dalam negeri sesuai dengan kondisi masyarakat. Pertanian mandiri diindikasikan dengan memiliki kemampuan ilmu pengetahuan dalam pengelolaan sumber daya pertanian, memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dalam memenuhi kebutuhan pembangunan pertanian, mampu mendorong tumbuhnya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang maju dan memiliki kemampuan

mendorong tumbuhnya kreativitas untuk selalu aktif dan bekerjasama dengan pihak lain.

- c. Pertanian modern diartikan bahwa pembangunan pertanian berbasis inovasi yang sejalan dengan revolusi industri 4.0 sehingga pertanian modern yang dikembangkan memiliki karakteristik: memproduksi sesuai kebutuhan, bernilai ekonomi tinggi, produktivitas tinggi serta bersifat ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024 serta 4 (empat) pengarus utamaan yang telah dirumuskan pemerintah dalam RPJMN dalam rangka mewujudkan pertanian Indonesia yang Maju, Mandiri dan Modern menjadi tantangan bagi para penyuluh pertanian saat ini dan dimasa yang akan datang untuk terus meningkatkan profesionalisme dan kompetensi mereka.

D. Daftar Pustaka

- Andreassen, T. A., & Natland, S. (2022). The meaning of professionalism in activation work: frontline managers' perspectives. *European Journal of Social Work*, 25(4), 630-642.
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Indonesia dalam Angka*.
- Badudu, Y., & Zain, S. M. (1994). *Kamus umum bahasa Indonesia*. Pustaka Sinar Harapan.
- Chaidirsyah, R. M. (2013). *Agriculture Extension in Indonesia: Moving Towards Farmer Empowerment*. National Center of Agricultural Extension, Ministry of Agriculture, Republic of Indonesia.
- Dooley, K. E., & Lindner, J. R. (2002). Competency-based behavioral anchors as authentication tools to document distance education competencies. *Journal of Agricultural Education*, 43(1), 24-35.
- Lindner, J. R., Dooley, K. E., Wingenbach, G. J., Murphrey, T., Baker, M., Miller, L. E., Jones, L., Ali, T., Annor-Frempong,

- F., & Dolly, D. (2003). A cross-national study of agricultural and extension education competencies. *Journal of International Agricultural and Extension Education*, 10(1), 51-59.
- Mardikanto, T. (1993). *Penyuluhan pembangunan pertanian*. Surakarta. UNS Press.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian., (2020).
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2021 tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran., (2021).
- Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 03/Permentan/SM.200/1/2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian.
- Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 448/KPTS/RC.020/M/8/2021 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian tahun 2020-2024, (2021).
- Sieck, W. (2021). What is Competence and Why is it Important? *Global Cognition*.
<https://www.globalcognition.org/what-is-competence/>
- Sulaiman V, R., & van den Ban, A. W. (2000). Reorienting agricultural extension curricula in India. *The Journal of Agricultural Education and Extension*, 7(2), 69-78.

BAB 10

PERENCANAAN PENYULUHAN PERTANIAN

Salahuddin, S.P., M.Sc.

A. Pengertian Perencanaan Program Penyuluh Pertanian

Perencanaan adalah suatu proses pengambilan keputusan berdasarkan fakta, mengenai kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan demi tercapainya tujuan yang diharapkan. Perencanaan merupakan suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efisien dan efektif. Perencanaan merupakan pedoman, garis besar, atau petunjuk yang harus diikuti jika menginginkan hasil yang baik. Dalam menyusun sebuah rencana, hal yang harus dilakukan adalah harus memusatkan pikiran kepada apa yang ingin dikerjakan, tujuan jangka pendek dan jangka panjang untuk organisasi serta memutuskan alat apa yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Harus menduga sejauh mana kemungkinan dapat dicapai, baik dilihat dari aspek ekonomi, sosial, maupun lingkungan politik tempat organisasi berorganisasi serta dihubungkan dengan sumber-sumber yang ada untuk mewujudkan rencana tersebut (Taufiqurokhman, 2008).

Usman (2008), menyebutkan perencanaan adalah proses mempersiapkan kegiatan-kegiatan secara sistematis yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Perencanaan adalah perhitungan dan penentuan tentang sesuatu yang akan dijalankan dalam rangka mencapai tujuan tertentu, siapa yang

melakukan, bilamana, dimana, dan bagaimana cara melakukannya. Perencanaan pada dasarnya berkisar pada dua hal:

1. Penentuan pilihan secara sadar mengenai tujuan-tujuan konkrit yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu atas dasar nilai-nilai yang dimiliki masyarakat yang bersangkutan.
2. Pilihan diantara cara-cara alternatif yang efisien serta rasional guna mencapai tujuan-tujuan tersebut, baik untuk penentuan tujuan yang meliputi jangka waktu tertentu maupun bagi pemilihan cara-cara tersebut diperlukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria tertentu yang terlebih dahulu harus dipilih pula.

Perencanaan merupakan suatu cara rasional untuk mempersiapkan masa depan. Perencanaan adalah suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai pada masa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Sebagian kalangan berpendapat bahwa perencanaan adalah suatu aktivitas yang dibatasi oleh lingkup waktu tertentu, sehingga perencanaan lebih jauh diartikan sebagai kegiatan berkoordinasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam waktu tertentu.

Artinya perencanaan adalah suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai pada masa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Dengan demikian, proses perencanaan dilakukan dengan menguji berbagai arah pencapaian serta mengkaji.

Perencanaan adalah sesuatu yang diorganisir, disengaja dan merupakan usaha yang berkesinambungan untuk memilih alternatif yang terbaik agar mencapai tujuan-tujuan khusus. Perencanaan dapat dilihat sebagai suatu alat atau cara untuk mencapai tujuan secara lebih baik (Mardikanto, 1993) karena:

1. Dengan adanya perencanaan diharapkan terdapat suatu pengarahan kegiatan, adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditujukan kepada pencapaian tujuan Pembangunan

2. Dengan perencanaan maka dilakukan suatu perkiraan/forecasting terhadap hal-hal dalam masa pelaksanaan yang akan dilalui. Perkiraan dilakukan mengenai potensi-potensi dan prospek-prospek perkembangan, tetapi juga mengenai hambatan-hambatan dan resiko-resiko yang mungkin dihadapi. Perencanaan mengusahakan supaya ketidakpastian dapat dibatasi sedikit mungkin
3. Perencanaan memberikan kesempatan untuk memilih berbagai alternatif tentang cara yang terbaik atau kesempatan untuk memilih kombinasi cara yang terbaik
4. Dengan perencanaan dilakukan penyusunan skala prioritas. Memilih urutan-urutan dari segi pentingnya suatu tujuan, sasaran maupun kegiatan usahanya.
5. Dengan adanya rencana maka akan ada suatu alat ukur atau standar untuk mengadakan pengawasan/evaluasi. Dengan demikian, kegiatan penyuluhan pembangunan yang efektif harus didahului dengan perencanaan program penyuluhan yang baik.

Menurut George (2021), perencanaan adalah: "planning is the selecting and relating of fact and the making and using of assumption regarding the future in the visualization and formulating of proposed activities believed necessary to achieve desired result". Perencanaan merupakan salah satu proses lain, atau merubah suatu keadaan untuk mencapai maksud yang dituju oleh perencanaan atau oleh orang/badan yang diwakili oleh perencanaan itu. Perencanaan itu meliputi : Analisis, kebijakan dan rancangan. Ciri-ciri pokok dari perencanaan umum mencakup serangkaian tindakan berurutan yang ditujukan pada pemecahan persoalan-persoalan pada masa datang dan semua perencanaan mencakup suatu proses yang berurutan yang dapat diwujudkan sebagai konsep dalam sejumlah tahapan.

Definisi perencanaan dikemukakan oleh Suandy (2003) sebagai berikut: Secara umum perencanaan merupakan proses penentuan tujuan organisasi (perusahaan) dan kemudian

menyajikan (mengartikulasikan) dengan jelas strategi-strategi (program), taktik-taktik (tata cara pelaksanaan program) dan operasi (tindakan) yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan secara menyeluruh. Definisi perencanaan tersebut menjelaskan bahwa perencanaan merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan secara menyeluruh. Karena tindakannya berurutan, berarti ada tahapan yang dilalui dalam perencanaan, antara lain :

1. Perumusan tujuan umum dan sasaran khusus hingga target-target yang kuantitatif
2. Proyeksi keadaan di masa akan datang
3. Pencarian dan penilaian berbagai alternatif
4. Penyusunan rencana terpilih

Pengertian Program

Program adalah perencanaan yang bersifat umum, menyeluruh tentang kegiatan/usaha tertentu. Umumnya ditujukan untuk menjawab pertanyaan apa dan mengapa.

Program adalah suatu pernyataan yang dikeluarkan untuk menimbulkan pengertian dan perhatian mengenai suatu kegiatan. Dalam pernyataan itu ada:

1. Situasi dimana orang-orang itu berada
2. Masalah-masalah yang merupakan bagian dari situasi
3. Tujuan yang ingin dicapai bersangkutan dengan masalah
4. Cara-cara untuk mencapai tujuan

Program merupakan kegiatan yang lebih luas dari hanya sekedar kurikulum. jadi (Boyle, (1981) dalam Saleh (2022), menyatakan program adalah suatu bentuk hasil dari semua kegiatan-kegiatan yang dirancang dimana tenaga pendidik yang profesional dan mereka yang belajar saling terlibat.

Pengertian Perencanaan Program Penyuluhan Pertanian

Dalam merencanakan program penyuluhan, tujuan program perlu dirumuskan secara spesifik dan jelas. Hal ini dikarenakan perencanaan program penyuluhan merupakan pedoman bagi pelaksana program penyuluhan, memberikan

arah dan bila ditemui hambatan, dapat dengan cepat dilakukan revisi. Perencana program harus mampu mengenali adanya prospek, tantangan, dan kebutuhan masyarakat. Terkadang seorang perencana berupaya merumuskan masalah atau mengharapkan terwujudnya perubahan yang diinginkan. Secara sederhana, masalah merupakan kesenjangan antara kondisi yang diharapkan. Perubahan yang diharapkan dari program penyuluhan sifatnya perilaku dan non perilaku. Dalam program penyuluhan semua perubahan harus dapat dikelola, jelas, dan mengarah pada transformasi perilaku (Amanah & Farmayati, 2013).

Setiana (2005), Perencanaan program penyuluhan adalah sesuatu yang harus dilakukan, karena untuk mencapai keberhasilan dari program maka fakta-fakta dilapangan perlu diketahui, dihubung-hubungkan dan ditarik asumsi-asumsi. Perencanaan program adalah merupakan perumusan, pengembangan dan pelaksanaan program itu sendiri. Perencanaan program harus merupakan perencanaan tertulis tentang kegiatan yang akan dikembangkan secara bersama-sama oleh masyarakat, penyuluh, pembina, spesialis, dan para petugas lapangan lainnya.

B. Tahapan Perencanaan Program Penyuluhan Pertanian

1. Pengumpulan data keadaan

Pengumpulan data keadaan, merupakan kegiatan pengumpu-lan data-dasar (data-base) yang diperlukan untuk menentukan masalah, tujuan, dan cara mencapai tujuan atau kegiatan yang akan direncanakan. Karena itu, data yang dikumpulkan harus mencakup:

- a. Keadaan sumberdaya, yang meliputi: sumber daya alam, baik yang berupa ciri-ciri umum keadaan alam (jenis dan sifat tanah, keadaan iklim, dll) maupun hal-hal khusus yang sering dihadapi (banjir, kekeringan, dan bencana alam yang sering terjadi), maupun prakiraan dan kecenderungan-kecenderungan yang dapat diduga bakal terjadi selama kurun waktu pelaksanaan kegiatan yang

akan berkaitan dengan sumberdaya alam ini, perlu juga dicatat hal-hal yang menyangkut produktivitas potensial yang seharusnya dapat dicapai dan tingkat produktivitas yang sudah dapat dicapai.

- b. Sumber Daya manusia, baik yang menyangkut ciri-ciri penduduk (keragaman jenis kelamin, umur, pekerjaan, pendidikan, dll), kelembagaan (kelompok dan organisasi sosial), maupun adat, agama/kepercayaan, kebiasaan, serta nilai-nilai sosial budaya yang berkembang serta dianut oleh masyarakat setempat. Kelembagaan, baik kelembagaan-ekonomi maupun kelembagaan sosial yang berkaitan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan.
- c. Sarana dan prasarana yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan, baik untuk kegiatan penyuluhannya sendiri maupun untuk pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masyarakat penerima manfaat.
- d. Teknologi yang telah digunakan, baik yang menyangkut: bahan, alat/perengkapan, teknik atau cara-cara, maupun “rekayasa sosial” yang sudah diterapkan.
- e. Peraturan, termasuk didalamnya kebijakan-kebijakan pembangunan nasional yang sudah ditetapkan dan ketentuan-ketentuan khusus yang diberlakukan di tingkat lokal.

Data keadaan yang berhasil dikumpulkan (baik yang berupa data primer maupun data sekunder), sejauh mungkin harus disajikan dalam bentuk data kuantitatif yang dilengkapi dengan penjelasan-penjelasan kualitatif.

2. Analisis keadaan

Pada tahap ini merupakan tahap penganalisaan data yang diperoleh dari lapangan, termasuk didalamnya menganalisis sumber daya yang potensial untuk dikembangkan, perilaku masyarakat sasaran, keadaan yang ingin dicapai dan yang sudah dicapai. Yang dimaksudkan dengan analisis keadaan ialah, kegiatan yang mencakup:

- a. Analisis tentang deskripsi data keadaan,

- b. Penilaian atas keadaan sumberdaya, teknologi, dan peraturan yang ada, dan
- c. Pengelompokan data-keadaan kedalam:
 - 1) Data aktual dan data potensial.
 - 2) Keadaan yang ingin dicapai dan yang sudah dapat dicapai.
 - 3) Teknologi yang dapat digunakan/dikembangkan dan yang sudah digunakan.
 - 4) Peraturan-peraturan yang sudah berlaku dan yang dapat diberlakukan.

Seperti halnya data-keadaan, analisis data keadaan sejauh mungkin juga disajikan dalam bentuk data kuantitatif yang dilengkapi penjelasan-penjelasan kualitatif.

3. Identifikasi masalah

Identifikasi masalah merupakan upaya untuk merumuskan hal-hal yang tidak dikehendaki atau faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya tujuan yang dikehendaki.

Identifikasi masalah, dapat dilakukan dengan menganalisis kesenjangan:

- a. Antara data-potensial dengan data aktual,
- b. Antara keadaan yang ingin dicapai dengan yang sudah dicapai,
- c. Antara teknologi yang seharusnya dilakukan/diterapkan dengan yang sudah diterapkan, dan
- d. Antara peraturan yang harus dilaksanakan/diberlakukan dengan praktek atau kenyataan yang dijumpai dalam penerapan peraturan-peraturan tersebut.

Sehubungan dengan identifikasi masalah, ada 4 (empat) kondisi yang dapat menyebabkan terjadinya masalah, yaitu:

- a. Bila terjadi penyimpangan dengan pengalaman masa lalu, atau adanya suatu kondisi “baru” yang berbeda dengan kondisi yang “lama” atau yang sudah biasa dihadapi. Karena itu, munculnya suatu inovasi atau hasil-hasil

pengkajian yang “baru” dapat menyebabkan masalah yang dirasakan oleh sistem sosial masyarakat penerima manfaat penyuluhan.

- b. Bila terjadi penyimpangan antara rencana atau harapan-harapan dengan kenyataan-kenyataan yang dihadapi.
- c. Bila ada orang “luar” yang membawa masalah baru kepada sistem sosial yang bersangkutan.
- d. Bila ada pesaing yang dirasakan akan membahayakan atau mengurangi kepuasan-kepuasan yang sudah dapat dinikmati.

Di samping itu, pengenalan masalah juga dapat dilakukan dengan mengkaji pengalaman-pengalaman yang pernah dialami sendiri atau pengalaman yang dilakukan/dialami oleh pihak lain yaitu dengan menganalisis tentang: segala sesuatu yang menyebabkan ketidakpuasan atau berkurangnya kepuasan-kepuasan yang semestinya dapat dirasakan. Sebagai contoh, dengan mengamati terjadinya kemiskinan, kita akan dapat mengenali masalah-masalah yang terjadi didalam lingkungan (masyarakat penerima manfaat) sendiri melalui telaahan tentang sebab-sebab terjadinya kemiskinan (seperti keterbatasan-keterbatasan dalam: pemilihan aset, pendidikan, pengetahuan, keterampilan, kemampuan tawar-menawar, dll).

4. Perumusan tujuan-tujuan

Dalam perumusan tujuan seperti ini, perlu diperhatikan agar penerima manfaat yang hendak dicapai haruslah “realistis”, baik ditinjau dari kemampuan sumberdaya (beaya, jumlah dan kualitas tenaga) maupun dapat memecahkan semua permasalahan sampai tuntas, tetapi dapat dirumuskan secara bertahap dengan target-target yang realistis. Seperti halnya dalam analisis data keadaan, perumusan tujuan sejauh mungkin juga dinyatakan secara kuantitatif. Hal ini sangat penting, agar memudahkan perumusan rencana evaluasi yang akan dilakukan.

5. Penyusunan Rencana Kegiatan

Tahap ini merupakan penyusunan rencana kerja yang meliputi:

- a. Penjadwalan
- b. Metode yang digunakan
- c. Pihak-pihak yang terlibat
- d. Lokasi kegiatan
- e. Bahan dan peralatan yang dibutuhkan
- f. Pembiayaan dan sebagainya.

6. Pelaksanaan

Tahap ini merupakan tahap pelaksanaan dari rencana kerja yang telah disusun. masalah utama yang harus diperhatikan dalam tahap ini adalah partisipasi masyarakat sasaran. Oleh karenanya perlu dipilih waktu yang tepat, lokasi yang tepat, agar masyarakat ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang dilakukan. Masalah utama yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan kegiatan adalah, harus memperoleh partisipasi sebesar-besarnya dari masyarakat penerima manfaat. Tidak hanya dalam pengertian memperoleh sumbangan input (dana, tenaga, sarana, peralatan), tetapi juga partisipasi dalam pemantauan pelaksanaan kegiatan, pemeliharaan hasil-hasil yang dapat dicapai, serta partisipasi masyarakat dalam ikut menikmati hasil-hasil yang dicapai. Karena itu, pelaksanaan kegiatan harus dilakukan pada waktu yang tepat (sesuai dengan tujuan dan kebutuhan penerima manfaat), serta di lokasi yang tepat (sesuai dengan kondisi lokasi penerima manfaat kegiatan, lebih disukai lagi kalau dapat dilaksanakan di lokasi penerima manfaatnya sendiri).

7. Penentuan Kemajuan Kegiatan

Tahap ini merupakan kegiatan monitoring yang dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan, untuk melihat sejauh mana tujuan kegiatan dilaksanakan.

8. Rekonsiderasi

Rekonsiderasi dimaksudkan untuk meninjau kembali rumusan program, termasuk kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan. Pada tahap ini dilihat hal-hal yang menjadi kendala atau sebaliknya keberhasilan yang dicapai, dalam rangka menyusun program berikutnya.

C. Manfaat Program Penyuluhan

1. Memberi acuan dalam mempertimbangkan tentang hal-hal yang harus dilakukan dan cara melaksanakannya
2. Merupakan acuan yang dapat digunakan untuk menghindari terjadinya salah pengertian
3. Sebagai pedoman pengambilan keputusan terhadap adanya usul/saran penyempurnaan
4. Mencegah adanya salah pengertian tentang tujuan akhir
5. Memberikan keterlibatan personil dalam setiap tahapan program yang berkesinambungan tersebut, hingga tercapainya tujuan.

D. Daftar Pustaka

- Amanah, S., & Farmayati, N. (2013). *Pemberdayaan Sosial Petani-Nelayan, Keunikan Agroekosistem dan Daya Saing*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- George, R, T. (2021). *Dasar-dasar Manajemen Edisi Revisi*. Bumi Aksara.
- Mardikanto, T. (1993). *Penyuluhan Pembangunan Pertanian*. 11 Maret University Press.
- Saleh, K. (2022). *Evaluasi dan Programa Penyuluhan Pertanian*. Penerbit: Media Edukasi Indonesia.
- Setiana, L. (2005). *Teknik Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Ghalia Indonesia.
- Suandy, E. (2003). *Perencanaan Pajak (Revisi)*. Salemba Empat.
- Taufiqurokhman. (2008). *Konsep dan Kajian Ilmu Perencanaan*. In *Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof.*

Dr. Moestopo Beragama.
<http://fisip.moestopo.ac.id/storage/Buku/buku-04-taufiquokhman-konsep-dan-kajian-ilmu-perencanaan-belum-isbn.pdf>

Usman, H. (2008). Manajemen. Bumi Aksara.

TENTANG PENULIS



Sukmawati Abdullah, S.P., M.Si. Lahir di Sulawesi Selatan tepatnya di Kabupaten Bone, pada Tanggal 25 Juni 1976. Anak pertama dari tiga bersaudara. Pada Tahun 1999 penulis menyelesaikan Strata 1 (S1) pada Program Studi

Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian di Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo (UHO), kemudian pada Tahun 2006 penulis menyelesaikan pendidikan Magister Sains (M.Si) di Institut Pertanian Bogor (IPB) pada Program Studi Ilmu Penyuluhan Pembangunan. Sejak Tahun 2001 sampai sekarang, penulis menjadi Dosen tetap pada Jurusan Penyuluhan Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo, Kendari Sulawesi Tenggara.

Penulis adalah salah satu tim penyusun Buku *Referensi Pengantar Penyuluhan Pertanian*, buku ini sangat berkaitan erat dengan Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang penulis lakukan terutama bidang Pendidikan dan Pengajaran yaitu penulis sebagai dosen mata kuliah Dasar-Dasar Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian. Untuk kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, penulis pernah menulis jurnal dengan Judul: *Implementation of Cyber Extension of Fisheries Product Marketing*, Pelatihan Pemanfaatan Sistem Informasi Kelurahan (SIK) dalam Pelayanan Penerbitan Surat Bagi Staf Kelurahan Anduonohu Kota Kendari, Pengembangan dan Pemasaran *Online* Produk Aneka Olahan Ikan Sebagai Sumber Pendapatan Alternatif Wanita Nelayan di Masa Pandemi Covid-19 Di Kelurahan Purirano Kota Kendari. Semoga Buku *Referensi* Pemasaran

Bisnis Era Digital, dapat bermanfaat bagi peserta didik dan pendidik dalam proses pembelajaran.

Motto: Menjadi Orang Beruntung Dunia Akhirat adalah Impiannya, dan Bermanfaat bagi Masyarakat adalah Harapannya.

Email Penulis: sukmawati.abdullah_faperta@uho.ac.id



Dr. Ima Astuty Wunawarsih, S.P., M.Si. lahir di Kendari pada 27 Desember 1974. Menyelesaikan pendidikan dasar di SDN 2 Kemaraya pada tahun 1987, dan melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Kendari dan tamat pada tahun 1990 dan SMAN 1 Kendari tamat pada tahun 1993. Selanjutnya menyelesaikan pendidikan strata 1 di Universitas Halu Oleo

Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian pada tahun 1998. Pada tahun 2004 menyelesaikan pendidikan strata dua di Institut Pertanian Bogor Jurusan Komunikasi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan, pada tahun 2020 menyelesaikan pendidikan strata tiga di Universitas Halu Oleo pada program studi Ilmu Pertanian Konsentrasi Komunikasi Pengembangan Masyarakat. Saat ini Penulis merupakan dosen tetap pada Jurusan Penyuluhan Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo



Rahayu Endah Purwanti, S.P., M.Si. lahir di Kendari, 29 Mei 1989. Putri pertama dari pasangan Bapak Suwarso, S.P dan Ibu Triyana Wijayanti, S.Pd ini mengenyam pendidikan (S1) di Universitas Halu Oleo (UHO) pada Jurusan Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian (PKP) pada tahun

2010 dan melanjutkan pendidikannya (S2) pada Jurusan Agribisnis minat Pengembangan Masyarakat tahun 2012 di Universitas Halu Oleo (UHO). Ibu dari empat anak ini memulai pengabdianya pada almamater tercinta sebagai dosen Fakultas Pertanian Jurusan Penyuluhan Pertanian sejak tahun 2015 hingga saat ini. Aktif menjalankan Tridharma perguruan tinggi seperti pendidikan pengajaran, penelitian kolaborasi serta kegiatan-kegiatan pengabdian pada masyarakat yang diharapkan akan membawa perbaikan kualitas hidup bagi masyarakat sekitar.

Penulis dapat ditemui di

E-mail : rpurwanti@uho.ac.id

FB : Rahayu Endah Purwanti

IG : @rahayuendahpurwanti



Dr. Hj. Hartina Batoa, S.P., M.Si. lahir di Raha, pada tanggal 20 Mei 1969. Ia tercatat sebagai lulusan S3 pada Program Studi Ilmu Pertanian Universitas Halu Oleo Kendari. Wanita yang kerap disapa Tina ini adalah anak dari pasangan (alm H. La Batoa, ayah) dan (alm Hj. Wa Fiini, ibu). **Hartina Batoa** merupakan salah satu tenaga

pengajar tetap pada Jurusan Penyuluhan Pertanian Fakultas Pertanian UHO, dan juga mengajar di beberapa jurusan pada fakultas yang sama, serta mengajar pula pada Program Pascasarjana UHO. Hartina juga berperan pada berbagai organisasi baik lokal, nasional, maupun dalam lingkup universitas, diantaranya organisasi PERHEPI, PAPPI, ICMI, PERGIZI PANGAN, DHARMA WANITA, PSG DAN PPA, DEKRANASDA, dll. Di samping itu Hartina juga pernah menjadi narasumber dan penyaji pada berbagai kegiatan, serta mendapat penghargaan Satya Lencana Karya Satya dari Presiden RI.



Megafirmawanti Lasinta, S.I.Kom., M.Si. lahir di Banggai-Sulawesi Tengah, pada tanggal 8 September 1990. Ia tercatat sebagai lulusan Institut Pertanian Bogor (IPB) pada tahun 2019. Wanita yang kerap disapa Mega ini adalah anak kedua dari pasangan Sidin Lasinta (ayah) dan Sukrina Jafar (ibu). Selain menjalani hari-hari sebagai ibu rumah tangga, **Mega** saat ini

aktif sebagai dosen di Jurusan Penyuluhan Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo. Ia juga sering terlibat dalam forum seminar ilmiah dan rutin melakukan publikasi hasil penelitian. Mega dapat dihubungi melalui email: lasinta.mf@uho.ac.id



Yoenita Jayadisastra, S.ST., M. Si.

Lahir di Muna Barat pada tanggal 17 Juni 1987. Menyelesaikan Pendidikan Strata 1 di Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Bogor pada tahun 2009, yang kemudian melanjutkan pendidikan Magister di Universitas Sebelas Maret

Surakarta dari Tahun 2011-2013. Dan saat ini penulis sedang melanjutkan pendidikan Doktoral di Universitas Halu Oleo Prodi Ilmu Pertanian

Penulis saat ini bekerja sebagai dosen pada Jurusan Penyuluhan Pertanian Universitas Halu Oleo yang terletak di Kota Kendari, Kota Anoa julukannya. Penulis aktif terlibat di kegiatan penelitian CSR atau Comdev pada sektor Pertambangan yang saat ini sedang menjadi sumber utama mata pencaharian warga Sulawesi Tenggara. Fokus kegiatan penelitian dan pengabdian penulis saat ini adalah pada lingkup pemberdayaan masyarakat pesisir dan pedesaan. Selain itu penulis juga aktif menulis di beberapa bidang ilmu, misalnya Komunikasi Pendidikan, Psikologi Pendidikan, Komunikasi Pembangunan dan masih ada beberapa kolaborasi buku yang penulis akan rampungkan. Penulis berharap, dengan berbuat maka akan memberikan kontribusi pada masyarakat luas.

E-mail Penulis : uyoenita@gmail.com.

FB : [yoenitajayadisastra](#)

IG : [@yoenitajayadisastra](#)



Muharama Yora, S.P., M.Si., lahir di Solok, pada 27 Juli 1992. Penulis menempuh pendidikan Sarjana pada Program Studi Agroteknologi, Fakultas Pertanian di Universitas Andalas dan lulus pada tahun 2015. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan magister pada tahun 2016 pada program studi Pemuliaan dan Bioteknologi Tanaman di Institut Pertanian Bogor yang lulus pada tahun 2019. Sejak tahun 2021, penulis diangkat sebagai dosen tetap yayasan Universitas Mahaputra Muhammad Yamin hingga sekarang. Perempuan yang kerap disapa dengan nama panggilan Yora merupakan anak bungsu dari pasangan Yanuar (ayah) dan Mirdelni (ibu).



Yusmi Nelvi, S.P., M. Si., lahir di Muara Labuh, pada 18 Juli 1983. Penulis tercatat sebagai lulusan magister bidang Pembangunan Wilayah Pedesaan di Universitas Andalas Padang pada tahun 2014 . Perempuan yang kerap disapa dengan nama panggilan Nelvi merupakan anak bungsu dari pasangan Alm Marliyus (ayah) dan Erni (ibu).



Ir. Yani Taufik, M.Si., Ph.D.

lahir di Kendari pada 13 Juli 1966. Lulus pada Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Universitas Halu Oleo tahun 1989, menyelesaikan jenjang Magister Ekonomi Pertanian di Institut Pertanian Bogor pada tahun 1998, kemudian menyelesaikan program doctoral di bidang

Anthropologi tahun 2016 pada Australian National University. Saat ini tercatat sebagai dosen tetap pada Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo, Jurusan Penyuluhan Pertanian.



Salahuddin, S.P., M.Sc., Lahir

Tanggal 01 Nopember 1977 di Desa Wawonggole Kabupaten Konawe, Melanjutkan Pendidikan Sarjana pada Program Studi Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian Universitas Halu Oleo pada Tahun 1996-2000.

Melanjutkan Pendidikan Pascasarjana pada Program Studi Penyuluhan dan Komunikasi

Pembangunan Universitas Gadjah Mada dan selesai pada tahun 2008-2011. Pada tahun 2019 melanjutkan pada Program Doktor Ilmu Pertanian Universitas Halu Oleo. Menikah dengan Nurhayu Malik, S.Si., M.Sc., pada tahun 2001 dan sudah dikaruniai delapan putra/putri. Saat ini penulis aktif sebagai pengajar pada Jurusan/ Program Studi Penyuluhan Pertanian Universitas Halu oleo. Pernah menulis buku yang berjudul Etika Profesi Penyuluh yang diterbitkan oleh Universitas Halu Oleo Press.